

**DATA DASAR ASPEK SOSIAL
TERUMBU KARANG
DAN EKOSISTEM TERKAIT
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**Ali Yansyah Abdurrahim
Ary Wahyono
Sudiyono
Andi Adri Arief**



**COREMAP-CTI
PUSAT PENELITIAN OSEANOGRAFI
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**



**DATA DASAR (*BASELINE*) SOSIAL-EKONOMI
TERUMBU KARANG DAN EKOSISTEM TERKAIT
DI LOKASI COREMAP-CTI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Oleh:

Ali Yansyah Abdurrahim

Ary Wahyono

Sudiyono

Andi Adri Arief



COREMAP-CTI
Pusat Penelitian Oseanografi
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia



KATA PENGANTAR

Dalam upaya pengelolaan sumber daya laut, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan suatu program yang dikenal dengan COREMAP (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program*). COREMAP adalah program nasional untuk upaya rehabilitasi, konservasi dan pengelolaan ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan. Program COREMAP tersebut dirancang dalam 3 (tiga) fase: Fase I mulai tahun 1998-2004 merupakan fase Inisiasi; Fase II adalah fase Akselerisasi yang programnya dimulai pada tahun 2005 sampai dengan 2011; dan Fase ke III adalah fase Penguatan Kelembagaan yang pelaksanaannya dirancang mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. COREMAP fase III disejalankan dengan program nasional dan regional tentang pengelolaan terumbu karang di wilayah segitiga terumbu karang dunia yang dikenal dengan *Coral Triangle Initiative* (CTI), sehingga COREMAP Fase III selanjutnya disebut dengan COREMAP - CTI. Tujuan COREMAP-CTI adalah melakukan pengelolaan sumber daya terumbu karang dan ekosistem terkait secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Lokasi program COREMAP- CTI di 7 kabupaten wilayah Indonesia bagian timur dan 7 kabupaten/kota di wilayah Indonesia bagian barat.

Pemahaman aspek sosial ekonomi masyarakat sangat diperlukan untuk merancang, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi suatu program pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Oleh karena itu, sebelum COREMAP - CTI dilaksanakan, dilakukan riset sosial ekonomi untuk mengumpulkan data dasar (*baseline data*) di lokasi program dan kontrol. Data dasar sosial ekonomi ini diperlukan sebagai dasar dan masukan-masukan dalam merancang program dan merupakan titik awal (T0) yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum adanya intervensi dari program yang akan dilakukan.

Buku laporan ini berisi data dasar dan kajian tentang kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan terumbu karang dan ekosistem terkait di Kabupaten Selayar. Data dasar tentang aspek sosial-ekonomi penduduk ini merupakan bahan yang dapat dipakai oleh para perencana, pengelola dan pelaksana dalam merancang, melaksanakan dan memantau program COREMAP - CTI. Di samping itu, data dasar ini juga dapat digunakan oleh *stakeholders (users)* sebagai bahan pembelajaran dalam pemanfaatan terumbu karang dan ekosistem terkait.

Terlaksananya kegiatan penelitian dan penulisan buku laporan melibatkan berbagai pihak. Kepada para informan: masyarakat nelayan, pemimpin formal dan informal, tokoh masyarakat dan kelompok perempuan di lokasi baseline Desa Kahu-kahu, Bontoborusu, dan Bontolebang, Pulau Pasi Gusung, Kecamatan Bontoharu. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survai. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua narasumber dari berbagai unsur dari Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Selayar serta narasumber dari unsur yang telah membantu memberikan data dan informasi.

Jakarta, Desember 2015

Drs Susetiono, MSc
Ketua NPIU COREMAP- CTI LIPI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR DIAGRAM	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	5
1.3. Metodologi	5
1.3.1 Pemilihan Lokasi	5
1.3.2. Pengumpulan data	6
1.3.3. Analisis Data	8
1.4. Pembabakan Penulisan	8
BAB II PROFIL LOKASI PENELITIAN	11
2.1. Keadaan Geografis dan Sumber Daya Alam	11
2.1.1. Gambaran di Kabupaten Selayar	11
2.1.2. Gambaran di Kawasan Kecamatan Bontoharu	12
2.1.3. Gambaran di Desa Penelitian	14
2.1.3.1. Desa Bontoborusu	14
2.1.3.2. Desa Kahu-Kahu	16
2.1.3.3. Desa Bontolebang	19
2.2. Sarana dan Prasarana Sosial-Ekonomi	21
2.4. Kelembagaan Sosial-Ekonomi	23
2.5. Program Pemberdayaan Masyarakat	31
2.6. Pengelolaan Sumber Daya Laut	36

BAB III	POTRET PENDUDUK	47
3.1.	Jumlah dan Komposisi	47
3.1.1	Gambaran umum jumlah dan karakteristik penduduk di Kabupaten Selayar	47
3.1.2.	Gambaran Umum Jumlah dan Komposisi Penduduk di Desa Lokasi Penelitian	48
3.2.	Kualitas Sumber Daya Manusia	49
3.2.1.	Pendidikan dan Keterampilan	49
3.2.2.	Pekerjaan Utama dan Tambahan	54
3.3.	Kesejahteraan	61
BAB IV	PENGETAHUAN DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT TERHADAP TERUMBU KARANG, PADANG LAMUN DAN MANGROVE	65
4.1.	Pengetahuan Masyarakat tentang Keberadaan dan Kegunaan Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang	66
4.2.	Persepsi Masyarakat tentang Kondisi dan Faktor yang Menyebabkan Kerusakan Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang	73
4.3.	Patisipasi dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Upaya Perlindungan dan Penyelamatan Terumbu, Padang Lamun dan Mangrove.	83
BAB V	PENDAPATAN DAN PENGELUARAN PENDUDUK	89
5.1.	Pendapatan dan Perekonomian Kabupaten Selayar	89
5.2.	Pendapatan di Desa-desi Lokasi Penelitian	90
5.2.1.	Pendapatan Per Tahun/Bulan Menurut Sumber Pendapatan	90
5.2.2.	Pendapatan Nelayan	95
5.3.	Pengeluaran Rumah Tangga	100

BAB VI	FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT	105
6.1.	Faktor Internal	105
6.1.1.	Sumber Pendapatan	105
6.1.2.	Teknologi Alat Tangkap/Produksi dan Wilayah Tangkap	105
6.1.3.	Biaya Produksi	118
6.1.4.	Kualitas Sumber Daya Manusia	119
6.2.	Faktor Eksternal	119
6.2.1.	Pemasaran: Harga dan Pemasaran	119
6.2.2.	Permintaan Terhadap Hasil Tangkap/Produksi	124
6.2.3.	Musim/Iklim	125
6.2.4.	Degradasi Sumber Daya Pesisir dan Laut	125
6.3.	Faktor Struktural (Program Wilayah Pesisir dan Laut serta Program Pembangunan Lainnya)	131
BAB VII	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	133
7.1.	Kesimpulan	133
7.2.	Rekomendasi	137
	DAFTAR PUSTAKA	139
	DAFTAR SINGKATAN/ ARTI /INDEKS	140
	LAMPIRAN ALBUM FOTO	141

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Letak Desa, Ketinggian dari Permukaan laut dan jaraknya	13
Tabel 2.2.1.	Jenis dan Jumlah Fasilitas / Pusat Pelayanan di Lokasi Penelitian	22
Tabel 3.1.1	Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Persentase)	49
Tabel. 3.2.1.	Komposisi Penduduk Desa Bontobarusu	50
Tabel 3.2.2.	Komposisi Penduduk Desa Bontolebang Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2014	51
Tabel 3.2.3.	Distribusi Penduduk Berumur 7 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Persentase)	53
Tabel 3.2.3.	Distribusi Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Persentase)	54
Tabel 3.2.4.	Distribusi Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Persentase)	55
Tabel 3.2.5	Distribusi Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Persentase)	56

Tabel 3.2.6.	Distribusi Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Tambahan Utama di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Persentase)	58
Tabel 3.2.7.	Distribusi Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tambahan Utama di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Persentase)	59
Tabel 3.3.1	Distribusi Rumah Tangga Terpilih menurut Kepemilikan Alat/Sarana Produksi di Lokasi Penelitian Kabupaten Selayar, Tahun 2015	61
Tabel 3.3.2	Statistik Kepemilikan Barang-barang Rumah Tangga Terpilih di Lokasi Penelitian Kabupaten Selayar, Tahun 2015	62
Tabel 5.1.1.	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 - 2013 (Juta Rupiah)	82
Tabel 5.2.1.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga, di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Rupiah/bulan)	89
Tabel 5.2.2	Distribusi Rumah Tangga Menurut Besar Pendapatan Rumah Tangga Per Bulan di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Persentase)	80
Tabel 5.2.3.	Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Pendapatan di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Rupiah/bulan)	91
Tabel 5.2.4.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Nelayan dari Perikanan Tangkap dan Budidaya di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Rupiah/bulan)	92

Tabel 5.2.5.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga dari Perikanan Tangkap dan Budidaya di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Persentase)	93
Tabel 5.2.6	Statistik Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga Nelayan dari Perikanan Tangkap Menurut Musim di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Rupiah/bulan)	94
Tabel 5.2.7	Distribusi Rumah Tangga Nelayan Menurut Besar Pendapatan Per Musim dari Perikanan Tangkap di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Persentase)	95
Tabel 5.3.1.	Statistik Pengeluaran Rumah Tangga di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Rupiah/bulan)	96
Tabel 5.3.2	Distribusi Rumah Tangga Menurut Besar Pengeluaran Rumah Tangga Per Bulan di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Persentase)	97
Tabel 5.3.3.	Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Menurut Penggunaan di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Rupiah/bulan)	98
Tabel 6.2.1	Kemampuan Akses dan Kontrol Kelembagaan <i>Punggaha- Sahi</i> dalam Relasi Pola Hubungan Produksi dan Pemasaran di Wilayah Kajian	116
Tabel 6.2.1.	Kemampuan Akses dan Kontrol Kelembagaan <i>Punggaha- Sahi</i> dalam Relasi Pola Hubungan Produksi dan Pemasaran di Wilayah Kajian	118
Tabel 6.2.3.	Jenis-Jenis Ikan Karang yang Memiliki Nilai Ekonomis Penting di Lokasi Penelitian	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1.	Peta lokasi-lokasi COREMAP-CTI di Seluruh Indonesia	3
Gambar 2.1.1.	Persentase Luas Per Kelurahan/Desa Sumber: BPS Kabupaten Selayar (2014)	13
Gambar 2.1.2	Dusun Dongkalan, Desa Bontoborusu	14
Gambar 2.1.3.	Salah Satu Alat Tangkap Jaring yang Digunakan Masyarakat	15
Gambar 2.1.4.	Desa Kahu-Kahu	17
Gambar 2.1.5.	Potensi wisata bahari yang dimiliki Desa Kahu-Kahu	18
Gambar 2.1.6.	Pemukiman di Desa Bontolebang	19
Gambar 2.1.7.	Alat Tangkap Sero di Desa Bontolebang	20
Gambar 2.4.1.	Kelembagaan di Lokasi Penelitian	31
Gambar 3.1.1.	Grafik Penduduk Kabupaten Selayar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2013 Sumber: BPS Kabupaten Selayar (2014)	47
Gambar 3.1.2.	Piramida Penduduk Kabupaten Selayar Tahun 2013 Sumber: BPS Kabupaten Selayar (2014)	48
Gambar 6.2.1.	Skematik Pola Jaringan <i>Punggaha</i> dan <i>Sahi</i> dalam Konteks Hak dan Kewajiban Masing-Masing	117
Gambar 6.2.2.	Lembaga dan Saluran Pemasaran untuk Ikan-ikan Karang di Lokasi Penelitian	119

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.2.1. Distribusi Penduduk Berumur 7 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015	53
Diagram 3.2.2. Distribusi Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015	56
Diagram 3.2.3. Distribusi Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Tambahan Utama di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015	59
Diagram 4.1.1. Persentase Responden yang Mengetahui Fungsi Terumbu Karang di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar	67
Diagram 4.1.2. Persentase Responden yang Mengetahui Fungsi Padang Lamun di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar	68
Diagram 4.1.3. Persentase Responden yang Mengetahui Fungsi Mangrove di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar	69
Diagram 4.1.4. Persentase Responden yang Mengetahui Manfaat Terumbu Karang di Lokasi Penelitian Kabupaten Selayar	70
Diagram 4.1.5. Persentase Responden yang Mengetahui Manfaat Padang Lamun di Lokasi Penelitian Kabupaten Selayar	71

Diagram 4.1.6. Persentase Responden yang Mengetahui Manfaat mangrove di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar	72
Diagram 4.2.1. Persentase Responden Menurut Pendapat tentang Kondisi Terumbu Karang di Lokasi Penelitian Kabupaten Selayar, Tahun 2015	73
Diagram 4.2.2. Persentase Responden Menurut Pendapat tentang Kondisi Padang Lamun di Lokasi Penelitian Kab. Selayar, Tahun 2015	75
Diagram 4.2.3. Persentase Responden Menurut Pendapat tentang Kondisi Mangrove di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015	76
Diagram 4.2.4. Persentase Responden yang Mengetahui Penyebab Kerusakan Terumbu di Lokasi Kabupaten Selayar, Tahun 2015	77
Diagram 4.2.5. Persentase Responden yang Mengetahui Penyebab Kerusakan Padang Lamun di Lokasi Kabupaten Selayar, Tahun 2015	78
Diagram 4.2.6. Persentase Responden yang Mengetahui Penyebab Kerusakan Mangrove di Lokasi, Kabupaten Selayar, Tahun 2015	79
Diagram 4.2.7. Distribusi Responden Menurut Pendapat tentang Pelaku Perusakan Mangrove di Lokasi, Kabupaten Selayar, Tahun 2015	80
Diagram 4.2.8. Distribusi Responden Menurut Pendapat tentang Pelaku Perusakan Padang Lamun di Lokasi, Kabupaten Selayar, Tahun 2015	81
Diagram 4.2.9. Distribusi Responden Menurut Pendapat tentang Pelaku Perusakan Terumbu Karang di Lokasi Kabupaten Selayar, Tahun 2015	82

Diagram 4.3.1. Distribusi Responden yang Terlibat dalam upaya Perlindungan/Pelestarian Terumbu Karang, Padang Lamun, Mangrove dan Wilayah Pesisir di Lokasi Kabupaten Selayar, Tahun 2015	83
Diagram 4.3.2. Distribusi Responden yang Terlibat dalam upaya Perlindungan/Pelestarian Terumbu Karang di Lokasi Kabupaten Selayar, Tahun 2015	84
Diagram 4.3.3. Distribusi Responden yang Terlibat dalam upaya Perlindungan/Pelestarian Padang Lamun di Lokasi Kabupaten Selayar, Tahun 2015	85
Diagram 4.3.4. Distribusi Responden yang Terlibat dalam Upaya Perlindungan /Pelestarian Mangrove di Lokasi Kabupaten Selayar, Tahun 2015	84
Diagram 4.3.5. Distribusi Responden menurut Jenis Kegiatan Perlindungan/Pelestarian Wilayah Pesisir di Lokasi Kabupaten Selayar, Tahun 2015	87
Diagram 5.2.1. Statistik Pendapatan Rumah Tangga di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015	91
Diagram 5.2.2. Distribusi Rumah Tangga Menurut Besar Pendapatan Rumah Tangga Per Bulan di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

The Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) yang dilaksanakan dan didanai oleh Asian Development Bank (ADB) untuk Kawasan Indonesia Barat dan World Bank (WB) untuk Kawasan Indonesia Timur, merupakan program lanjutan dari program COREMAP-II. COREMAP-CTI secara umum bertujuan untuk memperkuat kapasitas lembaga dalam konservasi dan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait (padang lamun dan mangrove) serta sumber dayanya. Program ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pesisir untuk mengelola terumbu karang dan ekosistem terkait secara berkelanjutan, dan melalui upaya-upaya tersebut, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pendekatan COREMAP-CTI dilakukan melalui sistem dukungan dari lembaga pemerintah ke desa-desa pesisir untuk mempromosikan manajemen dan kontrol atas sumber daya pesisir secara desentralisasi (KKP, 2013).

Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, program COREMAP-CTI dirancang untuk memiliki empat komponen utama yang lengkap dengan sub-komponennya, yaitu:

1. Penguatan kelembagaan untuk pengelolaan terumbu karang.
 - a. Penguatan dan ekspansi pendekatan COREMAP.
 - b. Pemantauan ekologi dan sosial-ekonomi melalui CRITIC.
 - c. Penguatan pengawasan ekosistem pesisir.
 - d. Pengembangan SDM.
2. Pengembangan pengelolaan sumber daya berbasis ekosistem.
 - a. Dukungan untuk pengaturan tata ruang kelautan.
 - b. Penerapan Pengelolaan Zona Pesisir Terpadu.
 - c. Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut dan Spesies Terancam.

- d. Perintisan komunitas berdasarkan pendekatan yang tepat.
 - e. Pengelolaan perikanan berkelanjutan.
3. Penguatan ekonomi berkelanjutan berbasis kelautan.
 - a. Pembangunan infrastruktur dasar untuk ekoinvestasi.
 - b. Pembangunan model usaha berbasis kelautan Kelompok Produksi Berkelanjutan (KPB).
 4. Pengelolaan proyek, koordinasi, dan pembelajaran.

Keluaran dari COREMAP-CTI antara lain:

1. Pengelolaan yang efektif dari 10 Kawasan Konservasi Laut Nasional dan 13 Kawasan Konservasi Laut Kabupaten dan pengelolaan perikanan berkelanjutan pada terumbu karang dan ekosistem terkait.
2. Penguatan kelembagaan di 8 provinsi, 14 kabupaten/kota, 6 Unit Pelaksana Lokal KKP, serta Pusat Pelatihan dan Informasi Terumbu Karang Lokal dan Nasional (CRITIC).
3. Dihasilkannya 100 unit kegiatan ekonomi berbasis konservasi.
4. Status pengamanan untuk enam spesies punah dan terancam punah.

Hasil yang diharapkan dari COREMAP-CTI adalah pengelolaan berkelanjutan sumber daya terumbu karang dan keanekaragaman hayati untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir di lokasi proyek, termasuk:

1. Bertahannya dan/atau peningkatan tutupan karang pada tingkat optimal di lokasi proyek (dibandingkan dengan survei proyek awal dasar di lokasi proyek).
2. Peningkatan pendapatan rumah tangga penerima manfaat inti proyek 10-15 persen pada akhir proyek (dibandingkan dengan baseline awal tahun 2014).
3. Efektivitas DPL meningkat setidaknya satu tingkat dalam status mereka berdasarkan efektivitas DPL dan sistem Pemerintah Indonesia (misalnya, dari kuning ke hijau, berdasarkan survei awal proyek tahun 2014).
4. Peningkatan pendapatan penerima di lokasi proyek (dibandingkan dengan survei baseline awal proyek).
5. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan terumbu karang menjadi rata-rata 85 persen di lokasi proyek.

1.2. Tujuan

Tujuan umum dari penelitian aspek sosial-ekonomi ini adalah

1. Memahami kondisi sosial-ekonomi masyarakat, permasalahan dan kebutuhan masyarakat, serta potensi dan alternatif solusi terkait dengan pengelolaan terumbu karang dan ekosistem terkait.
2. Memantau pelaksanaan dan dampak program penyelamatan terumbu karang terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, tujuan khusus dari penelitian data dasar (*baseline*) T0 ini adalah

1. Memberikan gambaran umum tentang lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografis, sarana dan prasarana, potensi dan pemanfaatan terumbu karang dan ekosistem terkait.
2. Menggambarkan kondisi sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraannya.
3. Mendeskripsikan tingkat pendapatan dan pengeluaran masyarakat serta faktor-faktor yang berpengaruh.
4. Mendeskripsikan pengetahuan, persepsi dan kepedulian masyarakat terhadap terumbu karang dan ekosistem terkait.

1.3. Metodologi

1.3.1 Pemilihan Lokasi

Penelitian penelitian data dasar (baseline) T0 ini dilakukan di tiga desa di Pulau Pasi Gusung, Kecamatan Bontoharu yang menjadi salah tiga dari beberapa desa yang menjadi lokasi COREMAP-CTI. Ketiga desa tersebut adalah Desa Kahu-kahu, Desa Bontoborusu, dan Desa Bontolebang. Selain pernah menjadi lokasi COREMAP II, wilayah perairan ketiga desa telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Selayar melalui Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 466/IX/2011 yang dilengkapi dengan Penetapan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pulo Pasi Gusung melalui SK Bupati Nomor 61/III/2014.

Seperti yang telah disampaikan pada uraian latar belakang, poin pertama dari keluaran COREMAP-CTI adalah "Pengelolaan yang efektif dari 10 Kawasan Konservasi Laut/Perairan Nasional dan 13 Kawasan Konservasi Laut/Perairan Kabupaten dan pengelolaan perikanan berkelanjutan pada terumbu karang dan ekosistem terkait." Oleh karena itu, pemilihan ketiga desa ini sebagai lokasi penelitian diharapkan dapat memberikan banyak masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan COREMAP-CTI yang berguna bagi pencapaian keluaran yang diinginkan tersebut.

1.3.2. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian/publikasi/laporan teknis pihak lain. Data sekunder yang dikumpulkan berupa buku, laporan teknis, data statistik, monografi, peta dari instansi pemerintah, universitas, LSM, dan lain-lain. Pengumpulan data sekunder dilakukan sepanjang waktu riset, baik sebelum, ketika, maupun setelah pelaksanaan pengumpulan data lapangan.

Sementara itu, Pengumpulan data primer dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mix-methode*). Penggunaan kedua pendekatan ini dilakukan agar data yang diperoleh lengkap dan holistik sehingga prinsip triangulasi data penelitian bisa tercapai.

Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei rumah tangga dan survei individu (anggota rumah tangga) dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya. Survei rumah tangga terdiri dari berbagai pertanyaan tertutup yang menanyakan profil rumah tangga, pendapatan, pengeluaran, dan aset. Sementara itu, survei individu terdiri dari berbagai pertanyaan tertutup yang menanyakan pengetahuan, persepsi, dan kepedulian terhadap ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan mangrove.

Survei dilakukan peneliti yang terdiri dari empat orang dan dibantu oleh 20 enumerator/pewawancara lokal yang telah diberi pelatihan intensif sebelumnya.

Survei dilakukan terhadap 200 rumah tangga dan 200 individu secara acak dan proporsional di ketiga desa, dengan perincian sebagai berikut:

- Kahu-kahu: 80 responden rumah tangga dan 80 responden individu.
- Bontoborusu: 80 responden rumah tangga dan 80 responden individu.
- Bontolebang: 40 responden rumah tangga dan 80 responden individu.

Pengumpulan data dengan pendekatan kuantitatif melalui survei ini bertujuan untuk:

1. Mendapat informasi yang bersifat kuantitatif terhadap isu spesifik terkait pengelolaan terumbu karang dan ekosistem terkait.
2. Mendapat data yang secara statistik dapat mewakili kelompok masyarakat.
3. Mengetahui distribusi data tertentu, misal pekerjaan, pendapatan, pengeluaran, pengetahuan, persepsi, dan lain-lain, dalam dan antar kelompok masyarakat.
4. Dapat membandingkan data antar kelompok (misalnya pendapatan rumah tangga yang dapat dan tidak dapat dana program) dan antar waktu (sebelum program dimulai, pertengahan, dan setelah program berakhir).

Sementara itu, untuk pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif dilakukan dengan tiga cara, yaitu wawancara terbuka dan mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta observasi langsung dan partisipatif. Wawancara dilakukan terhadap narasumber kunci secara purposive dan snowballing. Meskipun telah dibekali panduan, dalam pelaksanaannya, wawancara dilakukan dengan beberapa pengembangan. FGD dilakukan di setiap desa terhadap kelompok nelayan, pengurus LPSTK, dan pemerintahan desa (laki-laki) dan kelompok perempuan/wanita, baik istri nelayan, guru, dan pemilik usaha rumah tangga. Observasi dilakukan langsung sendirian oleh peneliti maupun melibatkan partisipasi masyarakat desa. Observasi dilakukan di antaranya dengan:

- Mengamati lingkungan/ekosistem di lokasi penelitian
- Mengamati aktivitas masyarakat di lokasi penelitian.
- Melengkapi (*check recheck*) informasi hasil wawancara, FGD, atau pewawancara data kuantitatif (kuesioner).

Pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk:

1. Mendapat informasi yang lebih mendalam/rinci tentang isu yang spesifik.
2. Menjelaskan latar belakang, proses, dan hubungan sebab akibat.
3. Memberikan kesempatan pertukaran informasi antara pewawancara dengan narasumber/informan.
4. Mengetahui bahasa istilah lokal yang berkaitan dengan potensi dan permasalahan lokal.

1.3.3. Analisis Data

Analisis data primer yang bersumber dari survei didasarkan hasil pengolahan data yang umumnya mendasarkan pada distribusi frekuensi dan tabulasi silang. Sesuai dengan tujuan penelitian dalam menganalisis cukup melakukan deskripsi. Bahkan dalam melihat hubungan data tabulasi silang pun tidak diadakan uji statistik. Dari tabel yang dimuat hanya dilihat pola hubungan dua variabel. Adapun dari data kualitatif dan observasi dapat dianalisis tentang dinamika kehidupan sesuai dengan isu yang diteliti. Dengan demikian data kuantitatif di balik data survei dapat dijelaskan melalui analisis data dan informasi kualitatif.

1.4. Pembabakan Penulisan

Tulisan ini terdiri dari tujuh bab. *Bab pertama* merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian yang digunakan dan pembabakan penulisan. *Bab kedua* memberikan gambaran profil lokasi penelitian. Profil ini meliputi kondisi

geografis, kondisi sumber daya alam, sarana dan prasarana sosial ekonomi, kelembagaan sosial ekonomi, program pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya laut. *Bab ketiga* mendeskripsikan potret penduduk yang terdiri dari jumlah dan komposisi penduduk, kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan penduduk.

Bab keempat mengemukakan tentang pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap upaya perlindungan dan penyelamatan *mangrove*, padang lamun dan terumbu karang. *Bab kelima* menyajikan tentang pendapatan dan pengeluaran rumah tangga penduduk. *Bab keenam* membahas tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan dan pengelolaan sumber daya laut, meliputi faktor internal, eksternal dan struktural. Kemudian yang terakhir akan ditutup dengan kesimpulan dari seluruh tulisan dari buku ini dan dari kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat diangkat beberapa rekomendasi.

BAB II

PROFIL LOKASI PENELITIAN

2.1. Keadaan Geografis dan Sumber Daya Alam

2.1.1. Gambaran di Kabupaten Selayar

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu di antara 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di ujung selatan Pulau Sulawesi dan memanjang dari Utara ke Selatan. Daerah ini memiliki kekhususan yakni satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi dan terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga membentuk suatu wilayah kepulauan. Gugusan pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan berjumlah 130 buah, 7 diantaranya kadang tidak terlihat (tenggelam) pada saat air pasang. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi 1.357,03 km² wilayah daratan (12,91%) dan 9.146,66 km² wilayah lautan (87,09%).

Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada koordinat (letak astronomi) 5°42' - 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30' bujur timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba dan Teluk Bone di sebelah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur di sebelah Selatan, Laut Flores dan Selat Makassar di sebelah Barat dan Laut Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur di sebelah Timur. Kabupaten ini, terdiri dari 11 Kecamatan, 81 Desa dan 7 Kelurahan. Sub area wilayah pemerintahan terdiri dari 2 sub area, yaitu: *wilayah daratan* yang meliputi Kecamatan Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene, dan Bontosikuyu serta *wilayah kepulauan* yang meliputi Kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Takabonerate, Pasimarannu, dan Pasilambena.

Dipandang dari sudut topografinya Kabupaten Kepulauan Selayar yang mempunyai luas kurang lebih 1.357,03 Km² (wilayah daratan) dan terdiri dari kepulauan besar dan kecil. Topografinya cukup variatif dari yang datar hingga

agak miring. Kondisi iklim wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dan sekitarnya secara umum ditandai dengan curah hujan dan pengaruh angin musiman, sebab wilayahnya berbatasan langsung dengan laut lepas. Tipe iklim di wilayah ini termasuk tipe B dan C, musim hujan terjadi pada bulan November hingga Juni dan sebaliknya musim kemarau pada bulan Agustus hingga September.

Posisi Kabupaten Kepulauan Selayar secara nasional dapat menjadi koridor penghubung bagian Barat & Timur, Alur pelayaran kapal niaga dan transportasi massal. Potensi Sumberdaya Alam yang dapat dikembangkan di kabupaten kepulauan ini, antara lain potensi perikanan, pariwisata bahari, sumberdaya mineral dan pertambangan serta perkebunan. Disamping itu, terdapat Taman Nasional Takabonerate yang merupakan atol terbesar ketiga di dunia setelah Kwajifein di Kepulauan Marshal dan Suvadiva di Kepulauan Maldives.

2.1.2. Gambaran di Kawasan Kecamatan Bontoharu

Secara administrative Kecamatan Bontoharu sebagai wilayah kecamatan penelitian, bagian Utaranya berbatasan dengan Kecamatan Bontomanai dan Kecamatan Benteng. Bagian Baratnya berbatasan dengan Kecamatan Benteng dan laut Flores, bagian timurnya berbatasan dengan laut banda dan bagian selatannya berbatasan langsung dengan Kecamatan Bontosikuyu. Kecamatan ini terbagi menjadi 6 desa dan 2 kelurahan. Kelurahan yang dimaksud, yaitu; Kelurahan Bontobangun dan Kelurahan Putabangun. Sementara desa, terdiri dari Desa Bontolebang, Desa Bontosunggu, Desa Bontoborusu , Desa Kalepadang, Desa Bontotangnga dan Desa Kahu-Kahu. Ibu kota Kecamatan Bontoharu terletak di kelurahan Bontobangun. Luas wilayah Kawasan Kecamatan Bontoharu adalah 129,75 km² atau 9.56 % dari luas wilayah Kabupaten. Populasi Penduduk 11.801 (tahun 2012). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang agar ketersediaan sumberdaya ikan di wilayah perairan terjaga. Saat ini Desa Bontolebang dijadikan sebagai desa keramba dan pusat pengembangan budidaya ikan laut di Sulawesi Selatan.

2.2. Sarana dan Prasarana Sosial-Ekonomi

Pemukiman Penduduk di Tiga Pulau Wilayah Penelitian

Kondisi pemukiman di tiga desa, menyebar di empat sudut masing-masing pulau. Pola *lay-out* pemukiman masing-masing pulau berupa tipe menyebar dan memusat mengikuti topografi atau kontur pulau. Untuk Desa Bontolebang dan Desa Bontoborusu tata letak pemukiman masih tertata dengan baik, tetapi di Desa Kahu-Kahu tata letak pemukiman sangat padat dan terkesan semerawut, kondisi ini disebabkan karena populasi penduduk di pulau ini cukup tinggi yaitu kurang lebih 2000 jumlah penduduk. Rumah tempat tinggal di masing-masing pulau didirikan pada posisi diatas hamparan tanah datar, sedangkan perumahan perbukitan kadangkalah mencari posisi strategis yang cocok untuk membangun perumahan yang kecenderungannya membangun dengan bangunan rumah batu dan semi permanen. Kondisi perumahan di masing-masing pulau cukup bervariasi antara rumah panggung, rumah kayu yang beralas tanah, rumah semi permanen dan rumah tembok. Atap rumah terdiri dari atap seng dan atap dari daun rumbia. Disamping itu terdapat pula bentuk rumah bawah. Rumah-rumah yang bentuknya rumah bawah terdiri dari dua bentuk, untuk kalangan nelayan yang memiliki tingkat perekonomian yang lebih baik pada umumnya adalah rumah batu (permanen) sedang rumah bawah dikalangan para nelayan *grassroot* adalah dari papan atau bambu. Konstruksi bangunan ini juga sekaligus menjadi salah satu ciri khas yang membedakan antara rumah-rumah dari golongan masyarakat ekonomi menengah keatas seperti *punggaha* dan rumah-rumah golongan ekonomi bawah seperti *sahi* atau nelayan *grassroot* lainnya.

Infrastruktur di Tiga Desa Wilayah Penelitian

Di masing-masing pulau memiliki prasarana jalan setapak yang sebagian besar telah disemen beton, pavin blok dan selebihnya berupa jalan tanah. Untuk sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian masih tergolong minim. Sarana transportasi yang menghubungkan antara satu dusun dengan dusun lainnya dapat ditempuh dengan jalan kaki atau dengan kendaraan sepeda motor. Jalan beton, pavin blok dan jalan tanah memiliki lebar jalan kurang lebih 1 meter. Jalan tersebut merupakan jalan desa dan jalan dusun. Sistem transportasi darat tidak terlalu penting di masing-masing pulau untuk bepergian antar dusun, kecuali interaksi antar pulau mereka menggunakan perahu *bise*, *katinting* atau perahu *jolloro*.

Untuk sarana transportasi ojek laut yang dapat menghubungkan masyarakat di Desa Bontoborusu dan Desa Kahu-Kahu ke pasar Padang pengoperasiannya setiap hari mulai pagi dan sore hari dengan bayaran Rp. 5000,-. Begitu pula dengan penduduk di Desa Bontolebang ke Pasar Bonea dan TPI yang berada di Benteng (Ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar).

Sarana perdagangan di masing-masing pulau di lokasi penelitian masih berupa kios-kios kecil yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat. Karena tidak terdapat pasar, maka sebagian besar transaksi jual beli, seperti kebutuhan rumah tangga maupun hasil bumi dilakukan di luar pulau (daratan; Pasar Padang; Pasar Bonea). Kebutuhan rumah tangga misalnya, seperti beras, minyak tanah, bensin, solar, garam, mie instan, bumbu dapur, dan sebagainya didatangkan dari luar pulau. Hal tersebut menyebabkan timbulnya biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh penduduk pulau untuk transportasi air ke daratan.

Dalam hal keperluan administrasi desa, terdapat bangunan kantor desa di masing-masing pulau-pulau. Lampu penerangan bagi penduduk sebagian besar menggunakan lampu penerangan dari tenaga listrik generator yang dikelola oleh pemerintah desa dengan jadwal pemakaian mulai dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00. setiap harinya. Gambaran infrastruktur masing-masing pulau dapat di lihat pada Tabel .

Tabel 2.2.1.

Jenis dan Jumlah Fasilitas / Pusat Pelayanan di Lokasi Penelitian

Infrastruktur	Desa		
	Bontolebang	Bontoborusu	Kahu-Kahu
Kantor Desa	√	√	√
Dermaga	√	√	√
Pasar	-	-	-
Puskesmas Pembantu	√	√	√
Sekolah			
TPA	√	√	√
Taman Kanak-Kanak	√	√	√
Sekolah Dasar	√	√	√
Sekolah Menengah Umum	√	√	√
Sekolah Menengah Atas			√
Mesjid/Mushola	√	√	√
Toko, Kios dan Warung	√	√	√
Penyulingan Air Galon	√	-	√ (tidak berfungsi)
Gardu Listrik	√	√	√
MCK/Sumur Umum	√	√	√

2.4. Kelembagaan Sosial-Ekonomi

Struktur Sosial Masyarakat Pulau/Desa Penelitian

Struktur sosial merupakan pola-pola perilaku dan interaksi sosial dalam suatu masyarakat. Pada setiap masyarakat bagaimanapun sederhananya, umumnya memiliki struktur sosial. Demikian halnya dengan masyarakat di ketiga pulau sebagai wilayah penelitian, telah terwujud menjadi suatu kelompok masyarakat, berdasarkan kesatuan tempat dan kesamaan tujuan, yang menciptakan suatu struktur sosial. Struktur sosial di masing-masing pulau ini mengkombinasikan dua struktur dominan yakni struktur masyarakat komunal dan struktur berdasarkan produksi. Struktur masyarakat komunal menggambarkan pola hubungan sosial berdasarkan ikatan ketetanggaan, kekerabatan, dan kepercayaan/ keagamaan. Sementara untuk struktur berdasarkan produksi mempolakan hubungan sosial dalam sistem produksi khususnya menyangkut dengan mata pencaharian sebagai aktivitas kehidupan

masyarakat. Gambaran struktur sosial yang dimaksud secara sederhana tergambarkan sebagai berikut :

Struktur Masyarakat Komunal

Struktur masyarakat komunal umumnya dicirikan oleh masih rendahnya pembagian kerja, menonjolnya hubungan primer, dan masih kuatnya ikatan pada tradisi. Struktur masyarakat komunal di masing-masing pulau ini telah melibatkan dua golongan sosial utama, yakni tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh terpelajar dan orang kaya) dan orang biasa (*common people*).

Pola hubungan sosial berdasarkan ikatan ketetanggaan tergambarkan melalui kerjasama-kerjasama dalam rangka hubungan komunal yang terwujud dalam berbagai bentuk tindakan kolektif, seperti kegiatan tolong-menolong dengan memberikan tenaganya baik diminta maupun tidak kepada tetangga yang melakukan kegiatan seperti hajatan sunatan, resepsi perkawinan dan sebagainya. Sementara itu kegiatan tolong-menolong untuk kepentingan bersama tampak pada kegiatan kerja bakti, menyiapkan acara-acara keagamaan seperti Maulid, Isra Mi'raj dan kegiatan-kegiatan tradisi lainnya. Integrasi sosial di kalangan masyarakat komunal terjaga dan dipelihara melalui berbagai aktivitas yang telah melembaga, khususnya aktivitas yang berhubungan dengan tradisi Islam setempat, seperti *barasanji*, *tahlilan*, *mammaulid* dan aktivitas yang berhubungan dengan upacara siklus hidup seperti kelahiran (*haqiqa*), potong rambut, khitanan/sunatan (*massunna*) dan kematian (*tahlilan*).

Pola hubungan sosial yang dianut berdasarkan sistem kekerabatan adalah sistem *bilateral* atau *parental*, yaitu mengakui kedua garis keturunan orang tua (bapak dan ibu). Hubungan kekerabatan ada yang dekat dan ada yang jauh. Kalangan orang-orang mereka yang terhisab sebagai kerabat dekat adalah satu sampai dengan tiga derajat vertikal dan horisontal (*kali*, *pindu*, *pinta*), sementara selebihnya adalah kerabat jauh atau apa yang mereka sebutkan dengan istilah *bija* (turunan) atau *bija dere* (kerabat jauh).

Satu rumah tangga di masing-masing pulau, biasanya terdiri atas beberapa orang yang diam bersama dan hidup bersama dari satu anggaran belanja (seperiuk), mereka itu biasanya terdiri atas kepala rumah tangga dan anggota lainnya adalah istri dan anak-anak yang dilahirkan. Selain itu, juga adakalanya ditambah dengan keluarga atau kerabat dekat lain baik dari pihak suami maupun dari pihak istri, bisa saja mertua, mungkin pula ipar bahkan juga menantu. Suami bersama istri dan anak-anaknya, khususnya anak yang masih kecil atau belum kawin untuk kehidupan sehari-hari masih dalam tanggungan ayah dan ibu atau kedua orang tuanya yang merupakan keluarga batih atau keluarga inti (*nuclear family*).

Dalam struktur sosial masyarakat di masing-masing pulau, menurut informan bahwa hubungan kekerabatan secara konkrit dan menonjol dapat diamati melalui peristiwa perkawinan dan upacara-upacara adat. Sebagai sebuah fenomena adat, perkawinan oleh masyarakat dipahami sebagai media pembentukan dan mempertahankan eksistensi keluarga. Oleh karena itu konteks kekerabatan tergambar dalam konsekuensi tentang keharusan cara-cara perkawinan dalam kelompok. Perkawinan bagi masyarakat nelayan di masing-masing pulau ini merupakan realisasi dari suatu kompleks yang memadukan sejumlah unsur budaya dalam sebuah setting meliputi unsur sosial, unsur ekonomi, sistem pengetahuan, kepercayaan, seni, teknologi dan unsur kekerabatan itu sendiri.

Perkawinan itu sendiri juga dipahami sebagai sebuah aplikasi dari sistem adat yang dianggap memiliki makna yang sangat mendasar karena berbagai hal penting dalam kehidupan manusia ikut ditentukan dalam peristiwa tersebut. Nilai kehormatan dan harga diri, martabat pribadi dan keluarga, bahkan klasifikasi golongan dari kelompok ikut terakomodasi di dalam penyelenggaraan perkawinan yang ditunjukkan melalui penampakan simbol yang diawasi oleh sistem norma.

Mencari pasangan dalam kalangan sendiri menjadi hubungan perkawinan yang ideal dalam masyarakat, seperti perkawinan antara sepupu derajat kesatu, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu; perkawinan antara sepupu derajat kedua baik dari pihak bapak maupun ibu; dan perkawinan antara sepupu derajat ketiga dari kedua orang tua. Oleh karena itu, pada umumnya

perkawinan yang berlaku pada masyarakat nelayan pulau ini adalah sistem endogami, dalam arti perkawinan dilakukan dalam rumpun keluarga. Namun demikian, tidak berarti tidak terjadi perkawinan diluar rumpun keluarga, perkawinan diluar suku atau orang yang sama sekali tidak seketurunan (eksogami). Namun realitasnya sistem endogami masih dominan dan terus dipertahankan sampai saat ini.

Struktur Berdasarkan Produksi

Serupa dengan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya, masyarakat nelayan di masing-masing pulau ini juga terdapat *working groups* yang seluruh anggotanya adalah nelayan. Dalam bahasa daerah Selayar, pemimpin kelompok ini disebut “*punggaha*”, sedang warga lainnya yang merupakan pengikut dalam kelompok, disebut “*sahi*”. Eksistensi dari kelompok ini dikenal dengan sebutan kelompok “*punggaha-sahi*”. Istilah (gelar) *punggaha* secara terminologi merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu dari kata *pawang* (bahasa Indonesia) berarti pelindung (dukung yang melindungi) dan kata *gawe* (bahasa Jawa) berarti kerja.

Dengan demikian, *punggawa* atau *punggaha* dapat diartikan sebagai pelindung kerja, yaitu orang yang berperan melindungi para *sahi* (pekerja) dari berbagai kesukaran, khususnya dalam pengelolaan modern (investasi usaha melalui *intensif capital*), misalnya kekurangan modal, teknologi dan fasilitas materil lain yang diperlukan. *Punggaha* dalam eksistensinya sebagai pelindung kerja senantiasa menggerakkan kekuatan-kekuatan modal, dalam sosiabilitasnya.

Secara fungsional keberadaan *punggaha* dalam aktivitas kenelayanan di masing-masing pulau adalah sebagai berikut; ; (1) menyediakan modal produksi (2) menyediakan kredit alat tangkap (*fishing gear*) (3) menyediakan kredit kapal tangkap atau perahu dan (4) membeli hasil tangkapan nelayan. Pemberian pinjaman kepada para *sahi* dalam bentuk uang atau bahan sebagai biaya hidup (*cost of living*), termasuk keluarganya yang mereka tinggalkan selama mereka berada di laut melahirkan hubungan ketergantungan yang sifatnya patron-klien.

Dalam perkembangannya, keberadaan *punggaha* pada aktivitas kenelayanan di masing-masing pulau terbagi atas dua, yaitu : (1) *punggaha darat* yang biasa juga digelar sebagai *punggaha bonto* (*bonto* dalam bahasa Selayar bermakna “bukit”) atau bos yang diperankan oleh warga keturunan Cina yang ada di Kota Benteng , dan (2) *punggaha pulau* atau *pa'erang juku*, yang ada dimasing-masing pulau dan menjadi pedagang pengumpul “kaki-tangan” (broker) dari “bos” yang ada di Kota Benteng.

Stratifikasi Sosial Masyarakat Pulau/Desa Penelitian

Masyarakat di masing-masing pulau penelitian mengenal adanya pelapisan masyarakat, secara lahiriah diwujudkan dalam lambang-lambang dan gelar, warisan masa lampau. Simbol-simbol pada rumah seperti hubungan atap rumah bersusun tiga atau lebih, jumlah anak tangga, bentuk-bentuk rumah dan lain-lain, menunjukkan anggota masyarakat yang mendiami rumah itu tergolong dalam lapisan tertentu dalam masyarakat.

Demikian juga dengan gelar-gelar kebangsawanan juga masih terkontekskan seperti gelar *Andi*, *Puang*, *Opu*, *Datu* dan sebagainya. Persepsi mengenai stratifikasi sosial oleh informan yang sekaligus berfungsi sebagai responden menunjukkan bahwa lapisan elit atau atas terdiri dari tiga dimensi, yakni ketokohan, ekonomi (*property*) dan sosial, namun yang lebih dominan adalah dimensi ekonomi. Kepala desa ditempatkan menempati lapisan atas karena ketokohan sebagai kepala desa bukan karena faktor kekuasaan, ini terbukti ABRI, POLISI ditempatkan pada lapisan menengah-atas.

Pemilik keramba dan pemilik kapal, menempati lapisan atas karena kepemilikannya atas alat produksi. Sementara petugas kesehatan (bidan) menjadi bagian lapisan atas karena dianggap sangat berjasa dalam kelangsungan kehidupan sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan. Begitu pula yang terjadi pada lapisan atas-bawah dimana sebagian diisi oleh kalangan yang memiliki alat produksi sehingga semakin mengukuhkan bahwa dimensi kepemilikan menjadi ukuran penting dalam menentukan pelapisan sosial. Sementara penempatan untuk lapisan menengah-atas adalah pekerjaan yang

menyangkut pelayanan publik dan pemilik alat produksi skala kecil, seperti tenaga pendidik, pegawai kecamatan/desa, pemilik perahu, dan sebagainya.

Untuk lapisan menengah-bawah, diisi oleh tenaga kerja terampil dan juga pemilik usaha skala rumah tangga, seperti juru kemudi ojek laut, tukang kayu, tukang jahit, pemilik kios dan pemilik warung. Pada lapisan bawah, baik bawah-bawah maupun bawah-atas terdiri dari pekerjaan yang benar-benar hanya membutuhkan keterampilan yang rendah dan hanya mengandalkan tenaga fisik. Buruh (*sahi*) disemua sektor, pengurus keramba maupun tukang gerobak tergolong pada lapisan ini. Kesimpulannya bahwa model stratifikasi pada masyarakat di masing-masing pulau lebih cenderung pada model Weberian yang bersifat multidimensi (ketokohan, ekonomi (*property*) dan sosial) dibanding dengan model Marxis yang hanya satu dimensi, yakni kepemilikan (*property*).

Pranata Agama dan Kepercayaan Masyarakat Pulau/Desa Penelitian

Mengenai pranata agama dan kepercayaan, pada umumnya masyarakat di pulau ini mayoritas beragama Islam, oleh karena itu hanya ada sarana peribadatan untuk pemeluk agama Islam, yaitu Masjid dan Mushollah. Ketaatan mereka memeluk agama Islam dapat dilihat dari jumlah jemaah yang memadati ruangan Mesjid pada saat hari Jum'at, shalat lima waktu setiap hari. Menurut informan tradisi upacara keagamaan yang dilakukan, bukan hanya diperuntukkan kepada orang yang masih hidup, tetapi juga diperuntukkan kepada orang yang telah meninggal dunia.

Dalam kegiatan upacara termaksud, mereka berharap dapat diberi keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan dalam perjalanan hidupnya. Keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara disebutkan bahwa hingga sekarang upacara adat tradisional dan upacara adat keagamaan masih saja dilakukan, seperti penghormatan terhadap leluhur yang dilakukan dikuburan dan di pinggir laut dengan membacakan mantera-mantera berdasarkan tradisi budayanya dan doa-doa keselamatan berdasarkan ajaran Alqu'ran. Demikian pula pada setiap pembelian peralatan baru dalam kegiatan produksi, seperti perahu, alat tangkap dan sebagainya kesemuanya harus diselamati melalui

upacara-upacara *barasanji* yang biasanya dipimpin oleh seorang imam desa yang di panggil dengan istilah “*Guru Baca*”.

Berdasarkan informasi dari informan, nelayan di pulau ini sangat mempercayai tentang adanya kekuatan-kekuatan roh yang terdapat pada pantai dan laut,. Ada kecenderungan bagi mereka unsur alam tersebut adalah suatu benda hidup yang sakral. Maka muncullah pemujaan-pemujaan dalam kegiatan ekonomi nelayan terhadap unsur alam tersebut dengan harapan supaya kekuatan-kekuatan gaib penuh misteri yang terdapat di darat dan laut tetap stabil dan memberikan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perjuangan hidupnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sinkritisasi antara kepercayaan lama yang bersifat imanensi dengan kepercayaan dari agama profetis, khususnya Islam yang bersifat transendensi, telah melembaga pada masyarakat nelayan. Kekuatan nilai kepercayaan, diwujudkan pada sikap pandangan dan cara berfikir dalam berinteraksi dengan alam sekitarnya. Mereka memandang bahwa nilai-nilai kepercayaan merupakan hal yang fundamental dalam proses pemanfaatan sumberdaya laut. Pemitos-sakralan terhadap unsur-unsur alam tersebut, dalam kenyataannya telah melahirkan kearifan ekologi yang dilihat dari cara berpikir (*the way of thinking*) yang memandang manusia bersama dengan alam fisik berada dalam ‘satu sistem’ sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan internal dan bersifat persuasif.

Penyimpangan-penyimpangan atau hal-hal yang mengganggu harmonisasi hubungan mikrokosmos terhadap makrokosmos dilakukan pemulihan melalui berbagai upacara ritual, oleh karena itu yang banyak dijumpai adalah tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kepercayaan, khususnya mitos, kultus, dan ritus serta fetis dan magis

Namun dalam perkembangannya, keterangan yang diperoleh dari informan, bahwa kini tampaknya kepercayaan-kepercayaan tersebut lambat laut mulai tererosi. Selain pengaruh agama Islam yang telah dianut dengan baik, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi membawa perubahan-perubahan pada nilai kepercayaan yang cenderung semakin menipis, maka adakalanya dikalangan masyarakat di masing-masing pulau ini, seseorang atau kelompok melakukan pemujaan-pemujaan secara diam-diam dan bahkan sudah ada yang

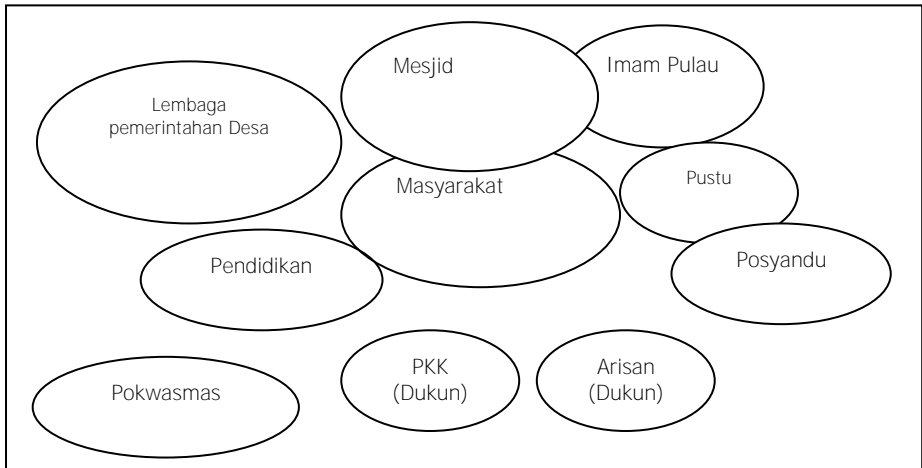
malu untuk melakukan hal seperti termaksud diatas. Namun demikian, tidak berarti nilai-nilai dasar atau keyakinan dasar dari kepercayaan nelayan terhadap kekuatan gaib yang terdapat di alam ini telah berubah.

Kegiatan Istri Nelayan

Sistem pembagian kerja secara seksual yang berlaku di dalam masyarakat nelayan di masing-masing pulau kajian nampak bahwa tugas-tugas di darat sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan atau istri nelayan, sedangkan laut merupakan ranah laki-laki. Hal ini menandakan bahwa peluang besar telah tercipta bagi perempuan atau istri nelayan untuk terlibat secara intensif dalam kegiatan produktif (ekonomi). Namun demikian, keterbatasan akses dalam mengelola sumber daya pesisir menyebabkan mereka tampak tidak berdaya dan nampak hanya berperan dalam kegiatan domestik. Secara umum kegiatan wanita/perempuan atau istri-istri nelayan di masing-masing pulau kajian hampir serupa dengan kehidupan wanita atau istri-istri nelayan pada umumnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kegiatan domestik masih dominan dibanding kegiatan publik. Meskipun demikian sudah ada juga wanita yang turut serta melakukan kegiatan yang dapat menambah penghasilan keluarganya. Konteks yang dimaksud terlihat pada kegiatan menjual kue-kue, menjual sayur dan ikan keliling di pagi dan sore hari disekitaran pulau. Keterlibatan dalam usaha kelompok juga ditemukan, khususnya di Pulau Kahu-Kahu melalui usaha pembuatan terasi.

Ikhtisar Kelembagaan

Kelembagaan di pulau-pulau kajian hampir sama atau serupa, disamping mengacu pada bentuk dan struktur kelembagaan kelurahan nasional, dimana di tingkat eksekutif dikepalai oleh seorang Kepala Desa, dibantu oleh perangkat desa lainnya (sekertaris desa, bendahara desa, kepala RW, dan kepala RT). Juga ditemukan kelembagaan umum lainnya (non struktural), seperti posyandu, imam pulau, arisan serta pranata-pranata sosial lainnya.



Gambar 2.4.1.
Kelembagaan di Lokasi Penelitian

Keterangan :

- Besarnya lingkaran mencerminkan pentingnya Lembaga menurut masyarakat
- Semakin dekat dengan lingkaran masyarakat artinya Hubungannya dengan masyarakat semakin dekat

Dari keterangan gambar diatas memperlihatkan bahwa keberadaan Kepala RT, Pustu dan Iman Pulau menjadi kelembagaan yang penting di pulau ini. Sementara, lembaga lainnya menjadi kelembagaan pelengkap dari aktivitas kehidupan masyarakat Pulau

2.5. Program Pemberayaan Masyarakat

Selain kebijakan pengelolaan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, program pemberdayaan masyarakat seperti apa yang telah dilakukan pemerintah selama ini sehingga diharapkan masyarakat dapat menolong dirinya dari ketidakberdayaan ? Sesungguhnya sudah banyak program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah, antara lain: Bantuan budi daya ikan kerapu sebanyak 10 unit pada tahun 2010 yang dikelola secara kelompok berjumlah 12 anggota, dalam perkembangannya kini telah

mencapai 94 unit keramba. Sebelumnya mereka diajak melakukan studi banding di P. Seribu, sepulang dari studi banding, maka segera direalisasikan usaha budi daya ikanerapu. Dalam waktu yang tidak lama kurang lebih 4 bulan, usaha tersebut sudah dapat dipanen, dan hasilnya sangat menguntungkan nelayan.

Selain itu, di Desa Bontolebang juga diberikan bantuan modal usaha kepada kelompok Perempuan Pengolah Hasil Perikanan Kembang Dahlia, Ibu Rusminah dengan kelompok usahanya telah berhasil membuat abon ikan, Dengan modal Rp 250.000,- dapat dijual dengan harga Rp 600.000,-. Keuntungan usaha itu telah dibagi merata kepada anggota. Selain itu juga melakukan pembuatan arang batok kelapa dan pembuatan minyak kelapa. Keberhasilan usahanya, membuat kelompok ini sibuk memberikan pelatihan ke desa-desa yang lain.

Di Desa Barak Lambongan, telah disalurkan bantuan modal usaha kepada sejumlah 131 wanita nelayan. Jumlah total bantuannya sebesar Rp 197.000.000,- (eratus sembilan tujuh juta rupiah) melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Juga diintroduksikan alat tangkap ikan baru yang ramah lingkungan. Dalam satu kali melaut Mali salah seorang penerima bantuan jaring mengatakan dapat sejumlah 1000 ekor ikan banjar, suatu jumlah yang tidak pernah didapat selama ini. Mali juga menceritakan kegiatannya menyelam di lokasi DPL untuk mengetahui pertumbuhan terumbu karang dan keberadaan ikan seperti yang biasa dilakukan. Dari hasil pengamatannya dia menemukan bahwa ikan sudah banyak, bahkan ikan napoleon yang dulu tidak ada, sekarang mulai banyak ditemukan di perairan DPL.

Di Desa Kahu-Kahu, pemberdayaan juga dilakukan dengan memberikan bantuan mesin penggiling tepung terasi. Tetapi masyarakat tidak memakainya, alasannya hasil trasi gilingan mesin rasanya kurang enak, sehingga banyak konsumen yang tidak mau membeli. Kenyataan ini membuat wanita yang bergerak dalam industri pengolahan terasi beralih kembali menggunakan alat yang lama. Industri pengolahan terasi ini, kini juga dihadapkan pada masalah kelangkaan bahan baku, karena ikan dan udang kecil sulit didapat. Hal ini diduga akibat terjadinya pencemaran perairan pantai.

Kendatipun berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya laut dan program pemberdayaan nelayan sudah dilakukan, bukan berarti bahwa persoalan kenelayanan dan lingkungan perairan telah selsai, temuan penelitian menunjukkan bahwa berbagai kebijakan tersebut masih menyisakan berbagai permasalahan yang justru semakin kompleks. Berbagai permasalahan tersebut meliputi; ketidakberlanjutan program pemberdayaan masyarakat, dan permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan konservas.

Banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak berlanjut, seperti budi daya ikan kerapu, pembuatan minyak kelapa, pembuatan abon ikan, tidak dapat dimanfaatkannya mesin penggiling terasi, tidak berjalannya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Bontolebang, dan pembuatan arang batok kelapa. Semua itu menunjukkan masih lemahnya studi kelayakan yang dilakukan, serta pendampingan yang tidak berkelanjutan. Permasalahan beralihnya budi daya ikan kerapu menjadi pembesaran ikan kerapu yang berkembang pesat dengan memanfaatkan bibit alami, mendorong tingkat eksploitasi ikan kerapu secara berlebihan. Perkembangan ini tanpa dikuti dengan peningkatan pengawsan, justru berpotensi merusak trumbu karang.

Produk-produk hasil penciptaan MPA dalam kenyataannya megalami kesulitan dalam pemasaran. Persoalan teknis menyangkut teknik pengemasan produk, promosi, dan membuka jaringan pemasaran merupakan kendala utama yang mbuat terhentinya kegiatan MPA. Lemahnya disiplin, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan mikro, membuat lembaga ini mengalami kesulitan keuangan akibat tidak lancarnya pengembalian pinjaman (kredit macet simpan pinjam perempuan). Pada wanita yang bergerak diidang industri rumah tangga pembuatan terasi sempat trkendala meyangkut perubahan citra rasa terasi yang berubah, sehingga produk tidak aku dijual. Bila hal ini berklanjutan, tentu akan berdampak serius yakni hilangnya kepercayaan konsumen. Beruntung keadaan seperti ini cepat diketahui oleh wanita yang tergabung dalam pembuatan terasi di Desa Kahu-Kahu, dan mereka kembali keada cara-cara lama.

Bila merujuk pada konsep pemerdayaan (Eddy Ch Papilaya, 2001, 1) Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan menorong, memotivasi, membangkitkan akan potensi yang dimiliki,

dan berupaya mengembangkan potes itu menjadi tindakandan hasil nyata. Menurut Chambes pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat “*people-centered*”, *participatory*, *empowering*, and *sustainable*. Karena itu, konsep pemberdayaan lebih luas dari hanya sekedar upayantuk memenuhi kebutuhan dasar, atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses peiskinan lebih lanjut (*safety net*). (Zubaidi, 2013, 25).

Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep yakni konsep (*power*) dan konsep (*disadvantaged*). Dengan pemberdayaan diharapkan dapat untuk mengatasi ketimpangan yang selama ini dianggap sebagai penyebab ketidakberdayaan masyarakat. (Ife Jim, 1997, 60 – 62). Program-program MPA yang telah dilakukan sesungguhnya sudah berangkat dari potensi yang ada, tetapi belum menjawab kebutuhan yang dirasakan masyarakat, seperti perlunya pengandan mesin pengupas biji mete di Desa Bontobarusu yang selama ini masih menghadapi permasalahan pengupasan secara manual, hasilnya banyak biji meteyang pecah, sehingga mengurangi kualitas dan harga jualnya. Bila hal ini dapat ditangani akan dapat memberi nilai tambah produk mete. Kemudian menyangkut buah metenya sendiri sesungguhnya masih bisa diolah menjadi produk minuman segar. Selama ini buah mete hanya dibuang begitu saja di kebun. Program-program MPA juga masih menghadapi persoalan klasik, yakni tidak intensif dan berkelanjutannya kegiatan pendampingan, saehingga banyak kegiatan yang berhenti di tengah jalan.

Berkaitan dengan masalah kebijakan pengelolaan sumber daya laut, penerapan KKLD telah berdampak pada surutnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan wilayah perairan konservasi. Masuknya DPL kedalam kawasan konservasi KKLD memunculkan kesalahpahaman masyarakat seolah-olah kewenangan pengelolaan kawasan perairan DPL suda diambil alih oleh pemerintah daerah, sehingga masyarakat besikap masa bodoh terhadap ktivitas kenelaynan yang gtejadi di kawasan konservasi Hal ini disebabkan karena tidak maksimalnya upaya mendorong partisipasi masyarakatdalam pengelolaan sumber daya laut.

Ketidajelasan tanda batas zona kawasan KKLD serta aturannya, karena ketiadaan tanda batas, minimnya informasi yang diterima masyarakat, tidak ditemukannya papan-papan plank yang menunjukkan bahwa suatu kawasan peraran tertentu menjadi kawasan konservasi. Munculnya inkonsistensi kebijakan, dalam Perda No: 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang, dalam perda tersebut sudah dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 4, ayat 1, yang menyatakan bahwa aturan pemilihan lokasi konservasi (KKLD an DPL) hanya berlaku pada wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam hubungannya dengan Taman Nasional Laut Takabonerate yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, aturan ini tidak berlaku. Dalam kenyataannya banyak dijumpai lokasi DPL justru masuk dalam kawasan Zona Inti, pada hal sudah dinyatakan dengan tegas dalam UU No: 5 Tahun 1990, tentang Perlindungan Keragaman Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 33 ayat 1, berbunyi setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya keutuhan Zona Inti Taman Nasional. Ayat 2, setiap orang dilarang, mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas Zona Inti Taman Nasional, serta menambah jenis tumbuhan lain yang tidak asli. Ayat 3, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Zona Pemanfaatan dan Zona lain di Taman Nasional. Dengan ketentuan ini keberadaan DPL di kawasan Taman Nasional Laut Takabonerate jelas melanggar ketentuan hukum.

Inkonsistensi kebijakan juga terjadi dalam kaitannya dengan penggunaan kompresor sebagai alat bantu pencarian ikan. Ketentuan ini diatur dalam UU No: 45 tentang Perikanan, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa kompresor termasuk alat bantu penangkapan ikan yang dilarang. Dalam Perda No: 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Terumbu Karang, Pasal 39 ayat 1 point h, dalam rangka melindungi keberadaan ekosistem terumbu karang, setiap orang, pribadi, atau badan hukum, dilarang membawa alat bantu yang dapat digunakan untuk menangkap ikan secara destruktif. Dalam kenyataannya malah muncul isu beredarnya surat Bupati yang membebaskan pengguna alat bantu kompresor. Tampaknya ada indikasi kuat bahwa permainan politik lokal ikut bermain dalam penggunaan kompresor. Indakan ini jelas merupakan tindakan tidak terpuji secara moral, serta jelas melanggar hukum.

2.6. Pengelolaan Sumber Daya Laut

Seperti telah disebutkan pada uraian yang terdahulu, Kabupaten Kepulauan Selayar, memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah. Salah satu potensi unggulan tersebut adalah keindahan alam dasar laut yang menjadi daya tarik wisata bahari. Melalui promosi wisata yang dilakukan secara intensif keindahan Taman Laut Nasional Takabonerate dikenal di seluruh belahan dunia. Karena itu, wilayah Kabupaten Selayar tidak dapat dipisahkan dengan nama besar Taman Naional Takabonerate. Sukses ini telah mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan sektor pariwisata ke depan sebagai lokomotif penarik gerbong pembangunan sektor yang lain. Untuk menunjang pembangunan sektor pariwisata, pemerintah daerah telah menetapkan wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah konservasi, target pencapaiannya telah ditetapkan pada tahun 2014.

Tujuan konservasi kawasan perairan bukan semata-mata untuk pengembangan wisata bahari, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya pembangunan sektor perikanan tangkap secara berkelanjutan. Secara implisit pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menghadapi permasalahan kerusakan ekosistem kawasan perairan pantai yang dampaknya telah dirasakan langsung oleh masyarakat nelayan, yakni kelangkaan sumber daya ikan, yang pada ujungnya telah menjadi kendala dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan. Bertolak dari permasalahan seperti ini, maka kebijakan pengelolaan sumber daya laut menjadi penting.

Persoalan kelangkaan ikan tentu bukan saja dihadapi oleh masyarakat nelayan Kabupaten Kepulaun Selayar, di tingkat nasional, bahkan internasional, permasalahan kelangkaan ikan sdah menjadi isu yang sangat serius. Di Indonesia, kelgkaan sumber daya ikan sesungguhnya juga sudah dirasakan sejak lama. Secara keseluruhan baik di perairan teritorial maupun Zona Ekonomi Eksklusif, diperkirakan terdapat ,1 juta ton ikan yang dapat ditangkap secara lestari sepanjang tahun. Pemanfaatan potensi ini sdah mencapai sekitar 60%. Persentase ini sebenarnya sudah lampu kuning, karena berdasarkan tanggung jawab komitmen internasional mengenaiperikanan yang dibuat oleh *Food and Agririculture Organisation (FAO)* dan *Code of onduct for Responsible Fisheries (CCRF)*, hanya sekitar 80% ikan yang boleh ditangkap.

Ituberarti hanya tersisa sekitar 20% penambahan produksi penangkapan ikan sepanjang tahun.

Berdasarkan potensi dan pemanfaatan sumber daya ikan ini, meskipun ada sumber daya ikan yang dimiliki Indonesia, secara nasional dapat dikatakan bahwa peluang pengembangan pemanfaatan sumber daya ikan sudah berkurang. Jika dipotret per prairan, umumnya dapat dikatakan bahwa perairan teritorialkawasan barat Indonesia Selat Malaka, Laut Jawa, Laut Flores, dan Laut Cina Selatan , telah mengalami gejala tangkap lebih (*over-fishing*) bagi jenis-jenis ikan yang tinggi nilai ekonominya. Sementara itu sudah ditemukan indikasi kuat bahwa perairan ZEE juga telah mengalami tangkap lebih seperti perairan Laut Arafura di Kawasan Timur Indonesia (Nikijuluw, 2003, 2 – 3)

Di tingkat dunia gejala kelangkaan ikan ditunjukkan oleh Mc Godwin (1990, 1). Dalam bukunya ia menulis kembali kepada Hardin dan pengikutnya:

All araround of the world, from the coldest arctic region to the warmest tropical seas, there is a crisis in the world fisheries Quite simply, there are to many people cashing to few fish...trought the 1970,s the worlds per capita fish produktion actually declined. Corespondingly, the catch per unit of fishing effort and the catch per dollar invested in the fisheries also stadily declined”.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kebijakan peglolaan sumber daya ikan/laut menjadi penting. Apapun cara atau pendekatan yang dilakukan manusia dalam memanfaatkan sumber daya ikan, jika pemanfaatan itu dilakukan secara berlebihan, pada akhirnya sumber daya itu aka mengalami tekanan secara ekologi dan pada ujungnya akan mengalami penurunan kualitas maupun jumlahna Pengelolaan, penataan, ataupun dalam terminologi umum manajemensumber daya perikanan ptut dilakukan agar supaya pembangunan sektor perikanan tangkap dapat dilkukan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Dalam tulisan ini dimaksud dengan terminologi manajemen atau pengelolaan adalah suatu angkaian aksi yang terorganisasi untuk mencapai tujuan yang telahditetapkan sebelumnya.

Adapun tujuan dari manajemen perikanan Indonesia sudah dinyatakan dengan jelas pada visi pembangunan peikanan Indonesia, adalah mewujudkan usaha perikanan produktif dan efisien berdasarakan pengelolaan sumber daya ikan

secara bertanggung jawab (DKP, 2001). Sementara itu pada bagian ketentuan umum Undang-Undang o: 9 tahun 1985 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah ke dalam UU No: 4 tahun 2009 tentang Perikanan, sudah dinyatakan dengan tegas bahwa pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya itu dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung secara terus menerus. Upaya pengelolaan sumber daya ikan dilakukan secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber daya ikan itu sendiri beserta lingkungannya. Jadi bagi Indonesia pengelolaan sumber daya ikan adalah sesuatu kebijakan yang sangat penting untuk dilaksanakan.

Demikian juga masyarakat perikanan Internasional juga menganggap sangat penting manajemen perikanan, seperti yang dianut dalam Pasal 7 CCRF, menyatakan bahwa negara harus mengadopsi pendekatan manajemen sumber daya perikanan yang tepat berdasarkan bukti dan fakta ilmiah yang tersedia. Selain itu, pendekatan harus diarahkan untuk mempertahankan atau memulihkan stok ikan di laut pada tingkat kemampuan maksimum menghasilkan ikan tanpa merusak lingkungan dan mengganggu stabilitas ekonomi. CCRF juga menyarankan agar setiap negara mempromosikan kegiatan konservasi dan pengelolaan sumber daya serta menjamin pendekatan dan kebijakan setiap negara didukung melalui perundangan yang baik, dan disosialisasikan kepada masyarakat (Nikijuluw, 2003.)

Berkaitan dengan pilihan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, para ahli telah mengajukan beberapa pilihan, antara lain (Gulland, 1982, 287 – 292) mengajukan enam pendekatan manajemen sumber daya perikanan, (1) pembatasan alat tangkap ikan, (2) penutupan daerah penangkapan ikan (3) penutupan musim penangkapan ikan, (4) pemberlakuan quota penangkapan ikan (5) pembatasan ukuran penangkapan ikan yang menjadi sasaran operasi penangkapan ikan, (6) pembatasan jumlah kapal serta jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan untuk setiap kapal. Ahli lain (Panyotou, 1992, 53) Pendekatan pengelolaan sumber daya ikan seperti penetapan alat tangkap ikan yang selektif, penetapan musim, atau penutupan daerah penangkapan secara sementara atau permanen, bertujuan untuk membatasi ukuran dan umur ikan ketika ditangkap. Pendekatan dengan melakukan pembatasan jumlah kapal dan penetapan quota bertujuan untuk membatasi jumlah ikan yang tertangkap.

Pendekatan kebijakan pengelolaan yang mana yang akan dipilih, sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan perairan laut dan tujuan pembangunan sektor perikanan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Hal yang harus diperhatikan apa pun pendekatan yang dipilih adalah: (1) pendekatan tersebut harus diterima oleh masyarakat. Kriteria ini sangat penting terutama pada perikanan skala kecil, karena penegakkan hukum dan peraturan sangat sulit untuk dilakukan. Penerimaan masyarakat mengenai hal baru tersebut terletak pada sejauh mana hal baru tersebut telah disosialisasikan kepada nelayan sebelum diimplementasikan. (2) pendekatan pengelolaan yang sudah dipilih harus dilakukan secara bertahap untuk memberi kesempatan kepada nelayan untuk melakukan penyesuaian dengan hal yang baru tersebut (3) Pendekatan manajemen pengelolaan tersebut harus dilakukan secara fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekologi dan ekonomi (4) nelayan harus didorong dan dimotivasi untuk melakukan pendekatan manajemen yang baru. Sudah barang tentu jika dengan pendekatan manajemen yang baru tersebut dapat memberikan insentif atau keuntungan lebih banyak kepada nelayan, maka mereka akan termotivasi untuk melaksanakannya. (5) pendekatan yang baru harus dapat dilaksanakan pemerintah selaku pemegang otoritas pengelola, karena itu, pemerintah harus memiliki dana yang cukup untuk menjalankan aturan-aturan yang baru tersebut. (6) penerapan manajemen yang baru harus dapat memberikan keadilan, meningkatkan produktifitas, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan nelayan yang lebih baik dibanding dengan pendekatan sebelumnya.

Bertolak dari kondisi lingkungan perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, serta tujuan pembangunan sektor perikanan dan pariwisata, maka pilihan kebijakan ditentukan bahwa daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah konservasi, dengan menutup secara permanen sebagian wilayah perairan. Kebijakan ini dikukuhkan melalui UU No: 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan PP No: 60 tahun 2007 tentang Konservasi Wilayah Perairan dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Selayar No: 8 tahun 2010. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjadikan daerah perlindungan khusus guna menjaga kelestarian hayati laut dan mencegah kerusakan terumbu karang.

Sebelum diperkenalkan dengan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD), masyarakat sudah diperkenalkan dengan konsep Daerah Perlindungan Laut (DPL) melalui program Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP II 2004 – 2009), yang implemensinya secara teknis dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah, serta melibatkan peneliti dari LIPI dan Perguruan Tinggi Universitas Hasanudin Makassar. Keinginan Pemerintah Daerah untuk mengejar target sebagai daerah konservasi didorong melalui Peraturan daerah No: 8 tahun 2010 tentang Pengelolaan Terumbu Karang dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No: 10 tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Ke dua Perda ini merupakan tindak lanjut dari UU No: 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Peraturan Pemerintah No: 60 tahun 2007 tentang Konservasi Wilayah Perairan Tujuannya adalah menyediakan daerah perlindungan khusus untuk menjaga kelestarian hayati laut dan mencegah kerusakan terumbu karang.

Hingga tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah membentuk 57 DPL yang tersebar di 52 desa. Diharapkan dengan terbenaknya DPL tersebut akan menjadi jembatan bagi pemerintah daerah dalam membentuk KKLD. Sambil merancang terbentuknya KKLD, pemerintah memberikan berbagai bentuk kegiatan kenelayanan seperti; menciptakan mata pencaharian alternatif, memperkenalkan teknologi alat tangkap ikan baru yang ramah lingkungan, dan memberikan bantuan suntikan modal untuk mengembangkan usaha kecil melalui pembentukan Lembaga Keuangan Mikro. Kecuali itu, untuk mengefektifkan pengelolaan yang telah dilakukan pendekatan budaya kepada masyarakat yang selama ini telah mempraktekkan tradisi pengelolaan sumber daya laut, seperti yang dilakukan di Desa Parak, Bontobarusu, dan Bontolebang. Lokasi DPL tersebut mengambil wilayah perairan “Ongko”.¹

¹ Ongko adalah suatu kawasan perairan yang dikuasai seseorang atau keluarga karena wilayah tersebut memiliki sumber daya ikan yang melimpah. Tanda-tanda wilayah ini adalah terdapat pusaran air, permukaan laut berbusa, banyak didatangi burung, tetapi perairan ini sangat berbahaya. Penguasaan wilayah ini dirahasiakan, dan dikeramatkan oleh penguasanya. Penguasaan wilayah ini diwariskan melalui penuturan lisan kepada anggota keluarganya.

(Pemetaan Partisipatif KKLD Pasigusung Bersama Bapak-Bapak di Desa Bontobarusu 6 Mei 2015.

Keluarnya SK Bupati Kepulauan Selayar No: 03a, ahun 2009 dan SK Bupati Kepulauan Selayar No: 465/IX/tahun 2011 menunjukkan bukti atas capaian program konservasi. Ke dua SK Bupati tersebut telah menetapkan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Pasi Gusung seluas 5.018 ha, dengan rincian Zona Inti 128 ha, Zona Perikanan Berkelanjutan 4.677 ha, Zona Pemanfaatan 197 ha, dan Zona Rehabilitasi 26 Ha. Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) wilayah konservasi Kauna- Kayuadi seluas 3.983 ha dengan rincian Zona Inti 294 ha, Zona Pemanfaatan Berkelanjutan 3.446 ha, Zona Pemanfaatan 99 ha, dan Zona Rehabilitasi 144 ha.

Dengan kebijakan pengelolaan sumber daya laut yang diterapkan pemerintah yang secara kuantitas telah dicapai targetnya pdatahun 2014, apakah kemudian praktek peanfaatan sumber daya ikan yang bersifat destruktif selama ini kemudian berhenti ? Pertaaan ini mengarahkan perhatian kita pada bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya ikan yang dilakukan oleh masyarakat.

Seperti diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas, panjang garis pantainya mencapai 670 km, luas keseluruhan wilayahnya mencapai 1.503,69 km², luas wilayah daratan 1.357,08 km², dan luas wilayah perairannya mencapai 9.146,66 km², Di dalamnya terkandung potensi ikan pelagis sebesar 6.330 ton per tahun , dan ikan demersal sebesar 11.409 ton per tahun (Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar 2013) (BPS Kabupaten Kepulauan Selayar 2013)

Selama ini sumber daya ikan tersebut lah dimanfaatkan, baik oleh masyarakat nelayan setempat, apun nelayan pendatang dari Suawesi Selatan dan Tenggara, seperti Bulukumba, Buton, Bugis dan Makasar. Usah perikanan tangkap yang dilakuan oleh masyarakat elayan Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya masih bersifat usaha skala rumah tangga dengan ciri-ciri, (1) skala usaha relatif kecil (2) dilakukan sebagai usaha keluarga (3) menggunakan teknologi yang masih sederhana, seperti pancing tunggal, pancing rawai, paning tonda, bubu, bagan tancap, bagan perhu, jaring insang, purse seine, dan gil net. Demikianuga sarana tangkap yang digunakan masih sederhana, yakni hanya dengan menggunakan perahu lepa yang dilengkapi

dengan mesin perahu ketinting berukuran 5 PK dan perahu jolor dengan kekuatan mesin 15 PK dengan bobot dibawah 5 GT. Kapasitas perahu ini hana bermuatan 1 – 2 orang, dengan daya jelajah sekitar 4 mil laut dar garis pantai. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki nelayan, telah berujung pada rendahnya tingkat pendapatan nelayan tradisiona (Kusadi, 2002, 19) (Arif Satria, 2002, 25 – 29).

Ikan-ikan pelagis seperti tembang, kembung, ekor kuning, selain dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, untuk konsumsi rumaangga, juga dijual untuk pakan ikan pada pembesaran ikan kerapu yang diusahakan oleh nelayan setempat dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA). Usaha ini semula dirintis oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2010 untuk mengembangkan usaha budi daya ikan kerapu yang pengadaa ibitnya dibeli dari Bali. Usaha ini dinilai cukup berhasil dan atas keberhasilannya Presiden Susilo Bambang Yudhyono telah menetapkan Desa Bontolebang sebagai sentra produksi ikan kerapu hasil budi daya dengan sistem KJA. Usaha ini dalam perjalanannya terhenti karena sulitnya pengadaan pasokan pengadaan bibit dari Bali. Sisa-sisa keramba jaring apung tersebut oleh masyarakat setempat kemudian digunakan untuk media pembesan ikan kerapu yang bibitnya diambil dari alam (skitarperairan setempat). Usaha ini bnyak dijumpai pada nelyan Desa Bontolebang dan Kahu-Kahu, Kcamatan Bontoharu. Sedang nelayan Bontobarusu tidak banyak mengusahakan ikan kerapu, masyarakat lebih memilih menekuni pekerjaan sampingan sebagai petani lahan kering./pekebun.

Dalam perkembangannya kemudian, ikan-ikan demersal yang memiliki nilai ekonomi tinggi tersebut kemudian dijadikan sebagai sasaran tangkap utamanya. Selain ikan kerapu, sasaran tangkap ikan lainnya adalah teripang, kepiting, dan udang lobster. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan sunu dan kerapu ini antara lain, pancing rawai tunggal, pancing rawai, dan bubu. Hasil pancingan ikan sunu yang berada di bawah ukuran 0,5 kg yang masih dalam kondisi hidup akan dibesarkan terleih dahulu pada keramba jaring apung, sedangang berukuran besar sekitar 7 ons ke atas, atau yang sudah mati akan dijual kepada pedagang penampung ikan di Benteng. Harga kankerapu sunu ukuran besar sekitar 7 ons – 1 kg per ekor hidup sekitar Rp

300.000,-, dalam keadaan mati sekitar Rp 150.000,-. Ikan-ikan sunu dalam ukuran di bawah 0,5 kg akan dipelihara sendiri, atau dijual kepada nelayan yang melakukan usaha pembesaran ikan sunu, dengan harga berkisar antara Rp 30.000,- - Rp 50.000,- perekor. Harga ikan kerapu macan per ekor ukurn 7 ons – 1 kg akan dibeli Rp 250.000,- dalam kondisi hidup dan akan dibeli Rp 100.000 dalam kondisi mati.

Para pedagang penampung ikan di Benteng beroperasi dengan mempercayakan orang kepercayaan tinggal di Desa Bontolebang, untuk menampung penjualan ikan dari nelayan. Selain membeli ikan yang iap dikirim untuk diekspor, pedagang pengumpul juga dipekerjakan sebagai pekerja pembesaran ikan kerapu. Menurut informasi dari Kepala Desa Bontolebang, di desanya ada sekitar 10 orang pedagang pengumpul. Atas jasa pedagang pengumpul ini dalam mengoleksi sejumlah ikan, maka setiap ekor ikan kerapu/sunu akan diberi insentif sebesar Rp 50.000,-. Usaha pembesaran ikan kerapu sunu ini juga berkembang di Desa Kahu-Kahu, hal ini tampak dari banyaknya keramba jaring apung yang berderet di sepanjang perairan pantai Desa Kahu-Kahu, demikian juga di Desa Bontobarusu walaupun jumlahnya sedikit.

Usaha ikanerapu sunu ini kemudian memiliki keterkaitan dengan usaha penangkapan ikan pelais, baik yang menggunakan pancing, jaring, bagan tancap dan perahu bagan. Keutuhan untuk satu unit keramba jaring apung yang berisi sekitar 750 ekor – 1000 ekor tidak kurang dari 50 kg per hari. Menurut perkiraan Kepala Desa Bontolebang, dalam satu hari paling tidak sejumlah 4,5 – 5 ton ikan rucah ditebar. Besarnya permintaan akan pakan ikan, menjadikan ladang usaha bagi para nelayan kecil yang hanya bisa mengoperasikan perahu lepa-lepa dengan jaring, pancing, atau bagan. Harga jual ikan-ikan kecil pelagis seperti tembang Rp 5000,- per kg, ikan kembung Rp 10.000,- -- Rp 15.000,-. Dalam sekali melaut bisa dipeoleh antara 5 kg – 10 kg. Biaya sekali melaut sekitar Rp 30.000,-. Perahu bagan dalam sekali melaut bisa mencapai antara 150 kg – 500 kg ikan pelagis kecil. Jenis perahu bagan ini hanya beroperasi di perairan pantai Depan Desa Bontobarusu. Berbeda dengan biaya operasional penangkapan ikan sunu/kerapu, harus menggunakan perahu jolor, dengan menggunakan kapasitas mesin 15 PK – 40 PK,

beroperasi pada perairan dalam yang relatif jauh menghabiskan bahan bakar sekitar 60 liter premium dalam sekali melaut. Harga premium per liter Rp 8000,- di tingkat pedagang eceran, belum termasuk makan dan rokoknya serta ian umpan yang dibutuhkan sekitar 20 kg ikan pelagis.

Usaha pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain kondisi ekosistem perairan pantai yang rentan terhadap berbagai aktivitas manusia, baik di darat, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, serta perubahan alam seperti perubahan iklim akibat pemanasan global. Disamping kelemahan dari sifat sumber daya ikan itu sendiri, antara lain, (1) sulitnya menebak keberadaan ikan dan jumlahnya, mengingat ikan bersifat *mobil* (2) sifat ikan yang mudah rusak (3) kepemilikan ikan yang bersifat milik bersama, dan terbuka untuk dieksploitasi oleh siapa saja. Oleh karena itu, setiap kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, musti harus mempertimbangkan dari berbagai aspek, seperti, biologi, sosial, ekonomi, teknologi dan ekologi (Rokmin Dahuri, dkk 204, 150)

Kendatipun demikian, tingginya permintaan ikan di pasar dunia di satu pihak, dan sikap pandang masyarakat yang menempatkan sumber daya ikan sebagai milik bersama (*common property right*) di lain pihak, serta meningkatnya kebutuhan hidup, telah mendorong semakin meningkatnya eksploitasi terhadap sumber daya ikan. Bahkan disinyalir kompetisi dalam memperebutkan sumber daya ikan yang semakin langka telah mengarah pada praktek-praktek penangkapan ikan yang bersifat destruktif, seperti penggunaan bom dan racun potasium, walaupun frekuensinya sudah mulai menurun dibanding dengan sepuluh tahun yang lalu (Wawancara dengan Kepala Desa Bontolebang Mei 2015). Sudah barang tentu aktivitas penangkapan ikan yang tergolong sebagai tindakan *illegal fishing* itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Meskipun demikian banyak masyarakat yang mengetahui. Secara berseloroh ibu-ibu yang diwawancarai dalam *Focus Group Discussion (FGD)* di Desa Bontobarusu mengatakan bahwa mereka yang terlibat dalam tindakan praktek *illegal fishing* tersebut lazim disebut sebagai “mafia nelayan/mafia perikanan” (Wawancara FGD dengan Ibu-Ibu Desa Bonobarusu, 6 Mei 2015).

Praktek *illegal fishing* masih terus berlangsung hingga sekarang kendatipun kebijakan konservasi wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar telah

ditetapkan, bahkan secara kuantitatif telah tercapai target daerah Konservasi pada tahun 2014. Lemahnya penegakkan hukum, inkonsistensi kebijakan, tumpang tindih kewenangan pengelolaan, buruknya mental sebagian oknum aparat pemerintah daerah, kesemunya telah berkontribusi terhadap kerusakan wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sangat boleh jadi berlangsungnya praktek *illegal fishing* sesungguhnya merupakan manifestasi dari ketidakberdayaan nelayan. Banyak faktor yang menyebabkan ketidakberdayaan nelayan, antara lain; keberadaan ikan semakin langka, lokasi pencarian semakin jauh, tingkat persaingan dalam memperebutkan sumber daya ikan semakin ketat, biaya operasional semakin mahal lebih-lebih dengan peningkatan harga bahan bakar minyak, kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara harga-harga kebutuhan hidup juga semakin meningkat. Dalam situasi ketidakberdayaan inilah prinsip efisiensi digunakan, walaupun dilakukan dengan cara-cara yang kurang terpuji seperti penggunaan bom dan potasium.

Tabel 3.1.1
 Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Lokasi Penelitian,
 Kabupaten Nias Utara, Tahun 2015
 (Persentase)

Kelompok Umur	Kahu-kahu			Bontoborusu			Bontolebang			Total		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
0 – 4	5,9	5,0	5,4	6,6	3,0	5,0	13,1	10,8	12,0	7,5	5,4	6,5
5 – 9	9,6	11,1	10,4	13,8	9,8	11,9	7,1	14,5	10,8	10,9	11,2	11,1
10 – 14	19,8	15,6	17,7	13,8	15,9	14,7	15,5	8,4	12,0	16,5	14,3	15,4
15- 19	10,2	11,7	10,9	10,2	14,6	12,2	4,8	13,3	9,0	9,2	13,1	11,1
20 - 64	49,7	52,8	51,2	53,1	53,0	53,1	59,5	53,0	56,3	52,9	52,9	52,9
65+	4,8	3,9	4,4	2,6	3,7	3,1	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
N	187	180	367	196	164	360	84	83	167	467	427	894

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2015.

3.2. Kualitas Sumber Daya Manusia

3.2.1. Pendidikan dan Keterampilan

Seperti telah diketahui bersama, kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Terbukti bahwa negara-negara yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul, telah menjadi penopang utama kemajuan bangsa, contoh Jepang, Korea, Vietnam, dan Thailand. Sebaliknya, negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia, tetapi memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah, kekayaan sumber daya alam yang ada hanya akan menjadi rebutan oleh investor-investor asing, atau memunculkan praktek illegal fishing yang melibatkan nelayan dari negara lain, akibatnya kekayaan sumber daya alam yang ada hanya dinikmati oleh negara-negara lain, sementara nelayan sendiri tetap hidup dalam kubangan kemiskinan.

Seperti halnya nasib nelayan lain di Indonesia, nelayan Peairan Kabupaten Kepulauan Selayar juga masih hidup dalam kemiskinan. Teknologi alat tangkap ikan yang sederhana, daya jelajah yang terbatas, dan tingkat eksploitasi yang rendah, kesemuanya akan berujung pada rendahnya tingkat pendapatan masyarakat nelayan. Rendahnya tingkat pendapatan tidak memungkinkan nelayan melakukan investasi perbaikan teknologi alat tangkap,

bahkan memperbaiki dan mempertahankan alat produksi yang ada sekalipun nelayan masih menghadapi kesulitan. Dalam kondisi demikian, nelayan juga tidak memiliki akses terhadap sumber daya keuangan yang resmi, seperti perbankan atau koperasi nelayan. Demikian juga karena rendahnya tingkat pendapatan, tidak memungkinkan nelayan melakukan investasi jangka panjang seperti pendidikan formal maupun informal yang memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tabel. 3.2.1.
Komposisi Penduduk Desa Bontobarusu
Berdasarkan Tingkat Pendidikannya Tahun 2014

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tamat TK	37
Tamat SD	149
Tamat SMP/SLTP	102
Tamat SMU/SLTA	62
Tamat D1	6
Tamat S1	33
Jumlah	389

Sumber: Monografi Desa Bontobarusu (2014)

Berdasarkan data monografi desa tahun 2014, tingkat pendidikan masyarakat nelayan masih tergolong rendah. Di Desa Bontobarusu, yang dihuni oleh sejumlah 1647 jiwa, yang terbagi kedalam 428 KK. Dari jumlah tersebut penduduk yang berusia 10 tahun ke atas yang berpendidikan sampai tamat Sdebanyak 149 Orang, tamat SLTP 102 orang. Selebihnya tamat SLTA 62 orang, D1 6 orang, dan S1 33 orang. Perlu diketahui, bahwa angka 33 orang yang tamat S1 ini termasuk dari tenaga-tenaga guru SMA, SMP, dan SD yang ada, yang umumnya berasal dari luar daerah, seperti dari Benteng dan Padang. Bila tidak dicermati, seolah-olah tingkat pendidikan penduduk Desa Bontobarusu sudah lumayan tinggi, pada hal yang sebenarnya yang berpendidikan tinggi adalah petugas yang berasal dari luar. Adapun angka detailnya dapat dilihat pada Tabel 3.2.1.

Angka tersebut di atas bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 1647, dan hanya terdapat sejumlah 389 orang yang dapat mengenyam pendidikan, maka secara keseluruhan tingkat pendidikan penduduk Desa Bontobarusu masih tergolong rendah.

Rendahnya tingkat pendidikan juga dialami oleh masyarakat nelayan Desa Bontolebang. Catatan Monografi Desa Bontolebang. Secara keseluruhan penduduk Desa Bontolebang berjumlah 935 jiwa yang terbagi ke dalam 260 KK. Dari jumlah penduduk tersebut sejumlah 503 orang hanya mengenyam pendidikan utama SD, tidak tamat SD, sedang menempuh pendidikan, dan malah tidak pernah sekolah. Selebihnya 40 orang tamat SMP/SLTP, 43 orang tamat SMU/SLTA, tamat D2 3 orang, D3 1 orang, dan S1 2 orang. Angka detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.2.

Komposisi Penduduk Desa Bontolebang Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2014.

Umur dan Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
5 – 6 tahun, belum masuk TK	19	12	31
5 – 6 tahun, sudah masuk TK	16	24	40
7 – 18 tahun tidak pernah sekolah	105	93	198
7 – 18 tahun, sedang sekolah	109	98	207
8 – 56 tahun tidak tamat SD	1	-	1
12 – 56 tahun, tidak tamat SLTP	-	-	-
12 – 56 tahun tidak tamat SLTA	1	-	1
Tamat SD	34	22	56
Tamat SMP sederajat	16	24	40
Tamat D1	-	-	-
Tamat D2	1	2	3
Tamat D3	1	-	1
Tamat S1	-	2	2
Jumlah	376	368	744

Sumber : Monografi Desa Bontolebang (2014).

Angka-angka dalam tabel tersebut di atas, menegaskan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Bontolebang masih rendah. Selanjutnya Desa Kahu-Kahu tidak ditemukan catatan monografi desa, tetapi dapat diperkirakan tingkat pendidikannya lebih rendah bila dibandingkan dengan ke dua desa yang

lain, sebab di Desa Kahu-Kahu hanya terdapat fasilitas pendidikan SD saja. Anak-anak segenerasi Kepala Desa (56) rata-rata hanya tamat SD. Menurut informasi Bpk Kepala Desa, penduduk yang tamat SLTP jumlahnya bisa dihitung dengan jari antra lain mereka-mereka yang sekarang duduk dealam perangkat desa, selebihnya lulus D3 atau S1 terutama guru-gru yang mengajar di SDN Kahu-Kahu. Penduduk desa yang pendidikannya tamat SMA atau SLTA ke atas, biasanya mereka ada di luar desa menjadi pegawai Pemda, atau menjadi buruh/karyawan toko di Kota Benteng.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga dipengaruhi oleh beberapa faktorter utama adalah tingkat kesehatan, pekerjaan, lingkungan tempat tinggal, pendapatan keluarga, terbaasnya akses informasi. Faktor kesehatan dapat dilihat misalnya, buruya sanitasi lingkungan di Desa Kahu-Kahu, keurangan air bersih, sumber mata air yang kotor seperti dua tempat pemandian umum yang dipergunakan secara beramai-ramai untuk berbagai aktifitas, seperti mandi, mencuci prabotan dapur, air minum, tidak tertatanya saluran cair limbah rumah tangga, membuang sampah disembarang tempat, tidak tertatanya permukiman penduduk, tidak terdapatnya MCK, kebiasaan membuang hajat besar di pantai, dan sebagainya. Menunjukkan la hidup bersih dan sehtbelum menjadi bagian dari hidup masyarakat di tiga lokasi desa penelitian, khususnya pada masyarakat Desa Kahu-Kahu yang memiliki tingkat kepadatan permukimn yang tinggi. Kesemuanya telah berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Kondisi sanitasi lingkungan yang buruk, telah memicu berkembangnya berbagai wabah penyakit menular, seperti radang tenggorokan saluran pernapasan (ispa), diare, dan desentri. Catatan Monografi Desa Bontolebang mencatat sejumlah warga yang menderita diare/desentri; pada tahun 2011, 9 orang terkena diare, tahun 2012. Sejumlah 78 orang terkena diare, dan tahun 2013 sejumlah 19 orang terkena diare.

Seragan wabah penyakit yang mendera kelompok miskin akan menjadi prangkap kemiskinan, sebab akan berdampak pada menurunnya prodktifitas kerja. Kalau misalnya penyakit seperti malaria menyerang warga desa, kebetulan yang terserang adalah satu-satunya orang pencari nafkah, maka bisa dibayangkan perekonomian keluarga akan ambruk, bahkan seluruh sendi

Tabel 3.2.4.
 Distribusi Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Bekerja
 Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Lokasi Penelitian,
 Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Persentase)

Lapangan Pekerjaan Utama	Kahu- kahu	Bontoborusu	Bontolebang	Total
Pertanian (pangan, perkebunan dan peternakan, kehutanan)	6,0	3,6	2,0	4,2
Perikanan Tangkap	75,0	89,1	90,2	83,9
Perikanan budidaya	0,0	0,0	0,0	0,0
Pertambangan dan Penggalian	0,0	0,9	0,0	0,4
Industri (pengolahan dan rumah tangga)	0,0	0,0	2,0	0,4
Listrik, Gas, dan Air	0,0	0,0	0,0	0,0
Konstruksi	0,0	0,0	0,0	0,0
Perdagangan Perikanan	8,0	0,9	3,9	4,2
Perdagangan Non perikanan	5,0	0,9	0,0	2,3
Transportasi Sungai dan Laut	0,0	0,0	2,0	0,4
Transportasi Darat	0,0	0,0	0,0	0,0
Lembaga Keuangan dan Usaha Persewaan	0,0	0,0	0,0	0,0
Jasa Kemasyarakatan	0,0	0,9	0,0	0,4
Lainnya	6,0	3,6	0,0	3,8
N	100	110	51	261

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2015.

Untuk perikanan budidaya, tidak ada satu pun penduduk yang menjadikannya sebagai pekerjaan utama, padahal kondisi ekologi perairan laut dan juga pesisir ketiga desa cocok untuk dilakukan kegiatan budidaya. Penduduk desa mengatakan sebetulnya kegiatan budidaya pernah dilakukan di semua desa, apalagi ketiga desa pernah menjadi lokasi COREMAP II. Namun, biaya yang cukup mahal, proses yang merepotkan, pengelolaan yang tidak baik karena berbasis kelompok, kendala pemasaran, dan alasan lainnya menyebabkan kegiatan perikanan budidaya tidak dilanjutkan, kecuali di Bontolebang. Di Bontolebang, saat ini masih ada beberapa penduduk yang menjalankan perikanan budidaya sebagai pekerjaan tambahan

Untuk industri rumah tangga, persentasenya masih sangat kecil, yaitu 0,4 persen saja untuk total lokasi penelitian. Padahal, berdasarkan hasil diskusi, pada saat COREMAP II, semua pokmas perempuan di ketiga desa pernah mendapat pelatihan pembuatan terasi, lengkap dengan bantuan peralatan produksinya. Pada waktu, produksi terasi pernah berjalan, bahkan Kahu-kahu terkenal sebagai produsen terasi Selayar. Namun, saat ini dengan berbagai alasan, produksi terasi tidak lagi dijalankan.

Tabel 3.2.5
Distribusi Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama di Lokasi Penelitian,
Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Persentase)

Status Pekerjaan	Kahu-kahu	Bontoborusu	Bontolebang	Total
Berusaha sendiri	75,0	65,5	76,5	71,3
Berusaha dibantu buruh tidak dibayar	6,0	10,9	5,9	8,0
Berusaha dibantu buruh dibayar	1,0	1,8	0,0	1,1
Buruh/karyawan/pegawai	10,0	4,5	7,8	7,3
Bekerja bebas pertanian	0,0	0,0	0,0	0,0
Bekerja bebas non pertanian	0,0	0,0	0,0	0,0
Pekerja tidak dibayar	8,0	17,3	9,8	12,3
N	100	110	51	261

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2015.

Dilihat dari status pekerjaan utamanya, Tabel 3.2.5. menunjukkan sebagian besar pekerjaan utama dilakukan sebagai usaha yang dilakukan sendiri (tidak dibantu buruh dan juga tidak menjadi buruh). Di Kahu-kahu persentasenya mencapai 75,4 persen, di Bontoborusu 65,5 persen, dan di Bontolebang 71,3 persen. Hal ini selaras dengan persentase buruh tidak dibayar yang menempati persentasi kedua etrbanyak, yaitu 12,3 persen. Artinya, sebagian besar penduduk keempat desa tidak mempunyai pendapatan tetap. Mereka hanya akan mendapatkan pendapatan ketika mereka berusaha dan bekerja pada saat itu.

Tabel 3.2.7.

Distribusi Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tambahan Utama di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Persentase)

Status Pekerjaan Tambahan Utama	Kahu-kahu	Bontoborusu	Bontolebang	Total
Berusaha sendiri	80,0	58,1	100,0	71,6
Berusaha dibantu buruh tidak dibayar	3,3	12,9	0,0	7,5
Berusaha dibantu buruh dibayar	3,3	0,0	0,0	1,5
Buruh/karyawan/pegawai	10,0	12,9	0,0	10,4
Bekerja bebas pertanian	0,0	0,0	0,0	,0
Bekerja bebas non pertanian	0,0	3,2	0,0	1,5
Pekerja tidak dibayar	3,3	12,9	0,0	7,5
N	30	31	6	67

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2015.

Sama dengan pekerjaan utama, pekerjaan tambahan ini sebagian besar dilakukan sendiri. Artinya, mereka tidak akan mendapatkan pendapatan ketika mereka tidak melakukan kegiatan pekerjaan tambahan ini (lihat Tabel 3.2.7). Selain itu, apabila dianalisis secara keseluruhan, penduduk yang mempunyai pekerjaan tambahan atau strategi nafkah ganda jumlahnya hanya sedikit. Sebagian besar dari mereka tidak punya pekerjaan tambahan. Ketika musim gelombang kuat datang, sebagian besar nelayan hanya diam di rumah dan kedai tanpa bisa melakukan pekerjaan tambahan. Padahal, berbagai pengeluaran terus berjalan dan berbagai kebutuhan hidup harus terus dipenuhi. Akhirnya, utang mereka di warung, tetangga, dan tengkulak makin bertambah.

3.3. Kesejahteraan

Pemilikan dan Penguasaan Aset Produksi

Kapal motor dominan dan perahu motor tempel sangat banyak terdapat di dibandingkan dengan aset-aset lain RT penduduk desa di Bontolebang. Pancing rawai tampaknya peralatan tangkap pasangan yang dimiliki nelayan

penduduk di desa ini. Sedangkan, perahu tempel dan perahu motor banyak dimiliki nelayan penduduk desa Kahu-kahu, dan disertai dengan pemilikan jarring insang dan pancing rawai (pancing ulur).

Jika dibandingkan kepemilikan aset produksi kapal atau perahu yang menjadi ukuran nilai aset rumah tangga, Bontolebang terlihat lebih maju dibandingkan dengan desa Kahu-kahu. Sebagaimana diketahui, aset kapal motor memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perahu motor tempel dan perahu tanpa motor tempel. Paling tidak, kapal motor memiliki jangkauan ke wilayah tangkapan yang lebih jauh dan mampu memuat hasil tangkapan lebih banyak dibandingkan dengan perahu. Kemudian, perahu motor tempel pada dasarnya bentuknya sama dengan perahu hanya bedanya terdapat motor yang menempelnya. Sebaliknya desa Bontoborusu lebih menampakkan sebagai desa nelayan yang paling tertinggal dibandingkan kedua desa tersebut. Kepemilikan perahu tanpa motor sangat dominan di desa Desa Bontoborusu dengan kepemilikan alat tangkap yang sama dengan desa Kahu-kahu.

Asset produksi lainnya, seperti keramba, bagan jumlah tidak begitu besar dibandingkan dengan asset produksi lainnya yang telah disebutkan di atas. Minimnya asset produksi ini kemungkinan karena nilai asset produksi lebih mahal, atau nelayan tidak memiliki ketrampilan mengoperasikan alat produksi tersebut, dan kemungkinan juga alat produksi tersebut merupakan pinjaman bantuan dari pedagang penampung yang sengaja diberikan untuk menjaga keberlangsungan pasokan ikan. Oleh karena itu, keramba pada dasarnya bukan asset produksi yang dimiliki melainkan asset produksi yang merupakan pinjaman dari pemodal, dimana pengoperasian keramba pembesaran ikan ini membutuhkan modal besar untuk membeli bibit ikan sunu dari nelayan-nelayan lokal yang harus dibayar dengan tunai, dan membeli pakan ikan kecil dari pemilik bagan.

Tabel 3.3.1

Distribusi Rumah Tangga Terpilih menurut Kepemilikan Alat/Sarana Produksi di Lokasi Penelitian Kabupaten Selayar, Tahun 2015

Alat/Sarana	Kahu-kahu		Bontoborusu		Bontolebang		Total	
	Jml Unit	% RT	Jml Unit	% RT	Jml Unit	% RT	Jml Unit	% RT
Perahu tanpa motor	7	15,0	12	2,5	1	2,5	20	10,0
Perahu motor tempel	13	16,3	7	8,8	32	80,0	52	26,0
Kapal motor	3	3,8	2	2,5	34	85,0	39	19,5
Keramba	2	2,5	0	0	4	10,0	6	3,0
Bagan	1	1,3	1	1,3	0	0,0	2	1,0
Jaring insang (<i>gillnet</i>)	19	23,8	25	31,3	1	2,5	45	22,5
Pancing (rawai/ulur)	19	23,8	21	26,3	10	25,0	50	25,0
Alat trans. komersial	1	1,3	0	0	0	0,0	1	0,5
Lahan (pangan&kebun)	7	8,8	8	10,0	0	0,0	15	7,5

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2015.

Pemilikan Barang-barang Rumah Tangga

Rumah, televisi dan parabola adalah barang-barang rumah tangga yang hampir dimiliki oleh sebagian besar penduduk di ketiga desa lokasi penelitian. Ketiga jenis barang rumah tangga tersebut tidak lagi merupakan barang mewah atau menjadi simbol kekayaan penduduk, karena kesenjangan kepemilikan dapat dikatakan tidak terjadi. Televisi dan Parabola adalah satu paket. Bandingkan dengan kepemilikan perhiasan. Rumah tangga yang memiliki perhiasan sebesar sepertiga dari total RT responden yang diwawancari dalam penelitian ini. Kesenjangan berdasarkan kepemilikan perhiasan berbanding 30 : 70. Perhiasan menunjukkan tabungan, yang artinya

RT ini telah memiliki simpanan yang diperoleh dari penyisihan hasil kegiatan matapencaharian dibidang perikanan maupun perkebunan, atau usaha lainnya.

Tabel 3.3.2
 Statistik Kepemilikan Barang-barang Rumah Tangga Terpilih
 di Lokasi Penelitian Kabupaten Selayar, Tahun 2015

Alat/Sarana	Kahu-kahu		Bontoborusu		Bontolebang		Total	
	Jml Unit	% RT	Jml Unit	% RT	Jml Unit	% RT	Jml Unit	% RT
Rumah	78	97,5	75	93,8	29	72,5	182	91,0
Televisi	59	73,8	60	75,0	38	95,0	157	78,5
VCD Player	36	45,0	30	37,5	29	72,5	95	47,5
Parabola	52	65,0	57	71,3	38	95,0	147	73,5
Perhiasan	11	13,8	29	36,3	5	12,5	45	22,5
Motor Roda 2	13	16,3	16	20,0	6	15,0	35	17,5
Ternak Kambing	4	5,0	5	6,3	0	0	9	4,5

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2015.

Semenantara itu, kendaraan roda 2 sebenarnya dapat dikatakan bukan sarana transportasi yang dibutuhkan karena pulau Gusung adalah pulau kecil yang tidak memiliki jalan beraspal melainkan jalan tanah (sebagian disemen) yang menghubungkan antara dusun satu dengan dusun lainnya. Mobilitas penduduk ke tiga desa cukup efektif dijangkau dengan jalan kaki. Oleh sebab itu, motor roda 2 bukan kebutuhan mendesak bagi penduduk di pulau Gusung. Transportasi antar desa lebih efektif menggunakan sarana perahu atau kapal. Oleh sebab itu, mimimnya sarana kendaraan roda 2 tidak bisa dibaca dengan kacamata yang sama kota melihat kepemilikan perhiasan.

BAB IV

PENGETAHUAN DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT TERHADAP TERUMBU KARANG, PADANG LAMUN DAN MANGROVE

Terumbu karang (*coral reef*), sebagai salah satu ekosistem perairan laut merupakan habitat berbagai biota laut yang memiliki nilai ekonomi yang penting, seperti berbagai jenis ikan karang, udang karang, alga, teripang, kerang mutiara dan sebagainya. Selain memiliki nilai ekonomi, terumbu karang merupakan pelindung fisik pantai terhadap gelombang air laut. Terumbu karang juga memiliki nilai estetika, karena menampilkan pemandangan yang sangat indah yang jarang ditandingi oleh ekosistem lain di laut. Taman-taman laut yang terkenal pada umumnya terletak di gugusan pulau-pulau kecil atau pantai yang dikelilingi oleh terumbu karang.

Berbagai nilai yang terdapat pada terumbu karang tentu akan hilang apabila terumbu karang dirusak atau dihancurkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti untuk batu pondasi bangunan rumah, mengambil ikan karang dengan cara meracun atau menggunakan bahan peledak. Perilaku-perilaku manusia tersebut mencerminkan bahwa mereka tidak memahami arti penting terumbu karang. Terumbu karang pada dasarnya merupakan ekosistem yang khas di daerah tropis. Ekosistem terumbu karang memiliki komponen biotis dan abiotis yang kesemuanya terjalin dalam hubungan fungsional yang harmonis dalam suatu ekosistem yang dikenal dengan ekosistem terumbu karang. (Nontji, 1987:114). Oleh sebab itu, hancurnya terumbu karang akan mengakibatkan terkisisnya pantai dan berbagai jenis biota yang hidupnya tergantung dengan terumbu karang tersebut.

Sementara itu, mangrove, salah satu ekosistem pesisir merupakan sumber makanan dan berfungsi sebagai habitat berbagai jenis ikan dan biota laut. Selain sebagai habitat, mangrove juga berfungsi sebagai pelindung pemukiman masyarakat dari dampak gelombang besar dan tsunami. Bagi penduduk pesisir, hutan mangrove merupakan sumberpangan alternatif, obat-

obatan dan ekowisata. Berikut ini uraian pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap terumbu karang, padang lamun dan mangrove.

4.1. Pengetahuan Masyarakat tentang Keberadaan dan Kegunaan Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang

Pengetahuan lokal yang sudah berlangsung dan diwariskan secara turun-menurun dan jika digunakan untuk mengatur tata kehidupan merupakan kearifan lokal. Sementara itu, ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang merupakan lingkungan fisik tempat masyarakat melangsungkan kehidupannya. Kemanfaatan dan fungsi ekosistem, seperti melindungi melindungi keanekaragaman ikan/biota laut, dan tempat ikan/biota hidup, bertelur, memijah, dan mencari makan atau untuk tujuan ekowisata adalah istilah ilmu pengetahuan yang kemungkinan tidak dikenal masyarakat tetapi bisa saja itu bagian dari tradisi atau kearifan lokal. Oleh karena itu, mempertanyakan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan dan kegunaan ekosistem pesisir adalah upaya melihat apakah prinsip-prinsip ilmu pengetahuan paralel dengan sistem pengetahuan lokal.

Pertama, untuk fungsi ekosistem mangrove ternyata masyarakat di lokasi penelitian hanya mengenal fungsi melindungi keanekaragaman ikan/biota laut, dan tempat ikan/biota hidup, bertelur, memijah, dan mencari makan. Hasil survai menunjukkan, sebanyak 97,5 persen responden 200 responden di tiga desa pesisir di kabupaten Selayar memiliki pengetahuan tentang fungsi ekosistem mangrove sebagai tempat ikan biota hidup, dan sebanyak 84,5 persen memiliki pengetahuan tentang fungsi ekosistem terumbu karang untuk perlindungan keanekaragaman hayati. Di desa Bontolebang pengetahuan tentang fungsi terumbu karang sebagai pelindung dari ancaman tsunami dikenal baik, ada sekitar 80 persen responden yang mengetahui fungsi ekosistem terumbu karang sebagai pelindung dari tsunami. Sementara itu, pengetahuan responden terhadap lima fungsi terumbu karang lainnya tampaknya masih minim (rata-rata dibawah 50 persen).

BAB V

PENDAPATAN DAN PENGELUARAN PENDUDUK

5.1. Pendapatan dan Perekonomian Kabupaten Selayar

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah menggambarkan struktur ekonomi suatu daerah dan mencerminkan potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki dan efektivitas pemanfaatannya. Nilai PDRB disumbang dari berbagai sektor/lapangan usaha. Semakin besar nilai/persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perekonomian daerah tersebut. Peningkatan PDRB suatu daerah juga dapat mencerminkan peningkatan perekonomian daerah tersebut.

Tabel 5.1.1.

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 - 2013
(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2010	2011	2012*	2013**
Pertanian	457.664,36	543.535,10	639.024,27	749.318,27
Pertambangan dan galian	5.426,12	6.414,97	7.847,00	9.758,56
Industri	34.100,64	36.858,63	39.842, 34	43.087,44
Listrik dan air minum	3.816,87	4.329,66	5.074,91	6.055,22
Bangunan	111.213,70	143.096,58	184.119,69	236.903,34
Perdagangan, hotel & restoran	126.553,33	145.000,76	167.801,49	194.190,83
Angkutan & komunikasi	103.390,94	116.273,95	132.519,10	151.703,87
Bank & lembaga keuangan	25.288,10	30.389,70	36.738,50	44.590,70
Jasa-jasa	264.203,10	360.161,50	496.111,26	580.281,24
PDRB	1.131.657,10	1.386.060,85	1.709.076,56	2.015.889,45

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar (2014)

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Pada Tabel 5.1 terlihat PDRB tahun 2013 atas dasar harga berlaku Kabupaten Selayar sebesar Rp 2.015.889,45 juta. Jumlah ini lebih tinggi dari PDRB tahun-tahun sebelumnya (2010-2011). Artinya, dalam kurun waktu 2010-2013, perekonomian Kabupaten Selayar mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Selayar sebesar 9,47 persen. Pada tabel tersebut juga terlihat sektor pertanian, yang meliputi sub-sektor tanaman pangan, tanaman perkebunan, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor penyumbang PDRB terbesar setiap tahunnya. Pada tahun 2013, PDRB sektor pertanian sebesar Rp 749.318,27 juta atau 37,17 persen dari total PDRB Kabupaten Selayar.

5.2. Pendapatan di Desa-desa Lokasi Penelitian

5.2.1. Pendapatan Per Tahun/Bulan Menurut Sumber Pendapatan

Pendapatan rumah tangga adalah salah satu *outcome* yang dihasilkan dari strategi nafkah (kegiatan bekerja dan usaha) yang dilakukan kepala dan anggota rumah tangga, baik dari pekerjaan utama maupun pekerjaan tambahan, baik berupa uang maupun barang. Pada Tabel 5.2.1 disajikan statistik pendapatan rumah tangga per bulan di lokasi penelitian, yang terdiri dari pendapatan per kapita, pendapatan rata-rata rumah tangga, pendapatan median, pendapatan minimum, dan pendapatan maksimum. Pendapatan yang disajikan adalah pendapatan bersih yang diterima setelah dikurangi biaya operasional/biaya produksi.

Pada Tabel 5.2.1 terlihat pendapatan rata-rata rumah tangga bulanan Kahu-kahu merupakan yang terkecil dengan nilai sebesar Rp 1.871.002, sedangkan Bontolebang merupakan yang terbesar, yaitu Rp 4.048.385.000. Tingginya pendapatan rumah tangga di Bontolebang berkontribusi terhadap pendapatan rata-rata rumah tangga secara umum, yaitu Rp 2.436.373. Jumlah ini, bahkan masih lebih tinggi sedikit dari pendapatan rata-rata rumah tangga Bontoborusu sebesar Rp. 2436.373.

yang melakukan pekerjaan ini di Kahu-kahu cukup banyak, yaitu 12 rumah tangga. Di Bontoborusu dan Bontolebang, pendapatan tertinggi setelah dari perikanan tangkap bersumber dari buruh/upah tetap. Pertanian meskipun pendapatannya relatif kecil merupakan sumber pendapatan terbanyak yang diperoleh penduduk ketiga desa. Untuk sumber pendapatan lainnya dapat dilihat pada Tabel 5.2.3.

Tabel 5.2.3.

Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Pendapatan di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Rupiah/bulan)

Sumber Pendapatan	Kahu-kahu		Bontoborusu		Bontolebang		Total	
	Rp	N	Rp	N	Rp	N	Rp	N
Perikanan Tangkap	1.651.528	65	2.272.302	79	3.907.406	40	2.408.464	184
Perikanan Budidaya	1.625.000	2	0	0	399.167	5	749.405	7
Buruh, upah Tetap dll	745.139	12	427.083	8	900.000	3	654.710	23
Pertanian	355.710	27	382.099	27	208.333	1	365.985	55
Perdagangan	1.274.444	12	308.000	1	.	0	1.200.103	13
Industri RT	683.333	3	185.556	3	735.000	1	477.381	7
Lainnya	455.952	7	266.667	3	.	0	399.167	10
N (200)		128		121		50		299

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2015.

5.2.2. Pendapatan Nelayan

Kalau pada Bagian 5.2.1 sebelumnya dibahas pendapatan rumah tangga secara keseluruhan di setiap desa, bagian ini hanya akan membahas pendapatan rumah tangga secara khusus. Pada Tabel 5.2.4 terlihat, meskipun urutan desa dengan pendapatan terkecil-terbesar masih sama, jumlah pendapatan rumah tangga mengalami kenaikan signifikan dibanding data pada Tabel 5.2.1. Pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan Kahu-kahu sebesar Rp 1.650.736; lebih besar empat kali dari pendapatan rata-rata rumah tangga secara keseluruhan. Demikian pun, dengan pendapatan rumah tangga nelayan

Bontoborusu Rp 2.272.302 yang lebih besar 3,5 kali lipat dan Bontolebang Rp 3.975.302 yang lebih besar 3 kali lipat. Hal ini menandakan pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan lebih baik dari rumah tangga non-nelayan. Pendapatan rata-rata maksimum pun di Bontoborusu dan Bontolebang diperoleh rumah tangga nelayan. Namun demikian, tabel ini juga menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata minimum di setiap desa berada pada rumah tangga nelayan. Artinya, rumah tangga termiskin dilihat dari segi pendapatan berada pada rumah tangga nelayan.

Tabel 5.2.4.

Statistik Pendapatan Rumah Tangga Nelayan dari Perikanan Tangkap dan Budidaya di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Rupiah/bulan)

Pendapatan per bulan	Kahu-kahu	Bontoborusu	Bontolebang	Total
Rata-rata	1.650.736	2.272.302	3.957.302	2.410.770
Median	1.403.500	1.752.000	3.737.167	1.813.375
Minimum	33.333	46.000	203.333	33.333
Maksimum	5.488.750	13.407.500	8.141.667	13.407.500
N (nelayan)	67	79	40	186

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2015.

Dari distribusi pendapatan rumah tangga nelayan dari perikanan tangkap dan budidaya tidak terlalu berbeda dengan distribusi pendapatan rumah tangga secara keseluruhan. Ini disebabkan mayoritas rumah tangga yang menjadi responden merupakan nelayan yang menjadikan perikanan tangkap sebagai pekerjaan utamanya (lihat Bagian 3.2.2 Bab 3 dan juga Bagian 5.2.1).

Tabel 5.2.5.

Distribusi Pendapatan Rumah Tangga dari Perikanan Tangkap dan Budidaya di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Persentase)

Kelompok Pendapatan (Ribu Rupiah)	Kahu-kahu	Bontoborusu	Bontolebang	Total
< 500	6,0	5,1	2,5	4,8
500 – 999	19,4	19,0	5,0	16,1
1.000 – 1.499	28,4	15,2	2,5	17,2
1.500 – 1.999	23,9	12,7	7,5	15,6
2.000 – 2.499	6,0	16,5	10,0	11,3
2.500 – 2.999	6,0	12,7	10,0	9,7
3.000 – 3.499	1,5	7,6	10,0	5,9
3.500 – 3.999	4,5	2,5	7,5	4,3
4.000 – 4.499	3,0	2,5	5,0	3,2
4.500 – 4.999	0,0	0,0	12,5	2,7
≥ 5.000	1,5	6,3	27,5	9,1
N	67	79	40	186

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2015.

Besar kecilnya pendapatan rumah tangga nelayan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal terutama alat/sarana tangkap dan juga musim (cuaca/iklim). Untuk alat/sarana tangkap, seperti yang telah disampaikan pada Bagian 3.3.1 Bab 3, rumah tangga di Kahu-kahu merupakan yang paling sederhana alat/sarana tangkapnya dan rumah tangga di Bontolebang merupakan yang paling canggih alat/sarana tangkapnya. Hal ini menyebabkan pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan di Kahu-kahu yang terkecil dan di Bontolebang yang terbesar.

Dari sisi musim, secara umum pendapatan di lokasi penelitian lebih besar pada musim gelombang tenang. Pada musim gelombang tenang ini, frekuensi melaut/menangkap ikan lebih banyak dari musim pancaroba dan musim gelombang kuat. Wilayah tangkap pada musim gelombang tenang pun cenderung normal dibanding musim lainnya sehingga hasil tangkapannya pun lebih banyak. Namun, dengan teknologi alat/sarana tangkap yang lebih canggih dan jumlahnya pun lebih banyak (lihat Tabel 3.3.1), nelayan di Bontolebang tetap mendapatkan hasil yang masih relatif baik. Bahkan, pada

musim pancaroba pendapatan rumah tangga nelayan di Bontolebang lebih besar dari pada musim gelombang tenang (lihat Tabel 5.2.6).

Tabel 5.2.6

Statistik Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga Nelayan dari Perikanan Tangkap Menurut Musim di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Rupiah/bulan)

Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga per bulan	Musim			N
	Gel Tenang	Pancaroba	Gel Kuat	
Kahu-kahu	2.637.954	2.023.477	516.323	65
Bontoborusu	2.867.856	2.476.038	1.595.253	79
Bontolebang	3.993.200	4.923.625	3.415.125	40
Total	3.031.280	2.848.250	1.609.734	184

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2015.

Gambaran kondisi tersebut terlihat pada distribusi rumah tangga nelayan menurut besar pendapatan per musim (Tabel 5.2.7). Pada tabel tersebut terlihat sebagian besar rumah tangga nelayan di Bontolebang menghasilkan pendapatan terbesar (lebih dari Rp 5 juta) di semua musim. Hal ini berbeda dengan rumah tangga nelayan di desa lainnya, terutama Kahu-kahu. Di Kahu-kahu, ketika musim gelombang kuat datang, nelayan tidak bisa melaut. Tanpa alat/sarana tangkap yang mumpuni, mereka pun hanya bisa menangkap ikan di pinggir pantai dengan memancing. Hasilnya, pendapatan mereka pada musim gelombang kuat hanya berada di kisaran kurang dari Rp 500.000 (49,2 persen), Rp 500.000 – 999.000 (35,4 persen), Rp 1.000.000 – 1.499.000 (13,8 persen), dan Rp 1.500.000 – 1.999.000 (1,5 persen).

Tabel 5.2.7

Distribusi Rumah Tangga Nelayan Menurut Besar Pendapatan Per Musim dari Perikanan Tangkap di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Persentase)

Kelompok Pendapatan (ribu Rupiah)	Kahu-kahu			Bontoborusu			Bontolebang			Total		
	Gel Tenang	Pancaroba	Gel Kuat	Gel Tenang	Pancaroba	Gel Kuat	Gel Tenang	Pancaroba	Gel Kuat	Gel Tenang	Pancaroba	Gel Kuat
< 500	4,6	7,7	49,2	1,3	13,9	29,1	5,0	2,5	10,0	3,3	9,2	32,1
500 – 999	9,2	24,6	35,4	15,2	12,7	17,7	10,0	0,0	10,0	12,0	14,1	22,3
1,000 – 1,499	12,3	23,1	13,8	13,9	11,4	17,7	0,0	10,0	5,0	10,3	15,2	13,6
1,500 – 1,999	13,8	10,8	1,5	11,4	22,8	6,3	5,0	2,5	10,0	10,9	14,1	5,4
2,000 – 2,499	20,0	12,3	0,0	17,7	15,2	10,1	12,5	12,5	5,0	17,4	13,6	5,4
2,500 – 2,999	12,3	4,6	0,0	13,9	7,6	5,1	5,0	5,0	7,5	11,4	6,0	3,8
3,000 – 3,499	6,2	4,6	0,0	10,1	1,3	2,5	17,5	10,0	5,0	10,3	4,3	2,2
3,500 – 3,999	3,1	1,5	0,0	1,3	5,1	5,1	7,5	17,5	10,0	3,3	6,5	4,3
4,000 – 4,499	7,7	3,1	0,0	5,1	3,8	1,3	2,5	2,5	5,0	6,5	3,3	1,6
4,500 – 4,999	,0	3,1	0,0	2,5	0,0	1,3	2,5	2,5	0,0	1,6	1,6	0,5
≥ 5,000	10,8	4,6	0,0	7,6	6,3	3,8	27,5	35,0	32,5	13,0	12,0	8,7
N	65	65	65	79	79	79	40	40	40	184	184	184

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2015.

5.3. Pengeluaran Rumah Tangga

Selain menganalisis pendapatan rumah tangga nelayan, penting juga untuk menganalisis pengeluaran rumah tangganya. Analisis pengeluaran yang dilakukan bisa digunakan untuk mengetahui penggunaan pendapatan yang telah diperolehnya dan juga untuk mengetahui selisih dari pendapatan dan pengeluaran. Dengan mengetahui penggunaan pendapatan dapat diperoleh informasi mengenai kebutuhan apa saja yang berhasil dipenuhi atau mencoba untuk dipenuhi. Sementara itu, dengan mengetahui selisih dari pendapatan dan pengeluaran dapat diperoleh seberapa besar mereka bisa menabung atau seberapa besar mereka berutang. Pada akhirnya, dengan mengetahui selisih dari pendapatan dan pengeluaran dapat diketahui apakah tingkat penghidupan mereka berada pada strategi bertahan hidup, strategi konsolidasi, dan strategi akumulasi.

Tabel 5.3.1.
Statistik Pengeluaran Rumah Tangga di Lokasi Penelitian,
Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Rupiah/bulan)

Pengeluaran RT per bulan	Kahu-kahu	Bontoborusu	Bontolebang	Total
Rata-rata	1.996.241	1.846.099	2.485.333	2.034.003
Median	1.831.506	1.508.446	2.205.417	1.840.363
Minimum	333.333	737.917	1.223.417	333.333
Maksimum	5.842.188	10.963.714	4.482.560	10.963.714
Per Kapita	449.045	452.585	642.673	489.187
N	80	80	40	200

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2015.

Pada Tabel 5.3.1 terlihat pengeluaran rumah tangga bulanan di Bontolebang lebih besar dari kedua lainnya dan Bontoborusu menjadi desa yang pengeluaran rata-rata rumah tangganya terendah. Sama dengan pendapatan, terjadi kesenjangan antara pengeluaran minimum dengan pengeluaran

maksimum. Pengeluaran minimum terkecil ada di Kahu-kahu dan maksimum terbesar ada di Bontoborusu. Meskipun terjadi perbedaan pengeluaran yang cukup besar antara Kahu-kahu dan Bontolebang, namun untuk pengeluaran per kapita, perbedaannya tidak terlalu besar

Tabel 5.3.2
Distribusi Rumah Tangga Menurut Besar Pengeluaran Rumah Tangga
Per Bulan di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015
(Persentase)

Kelompok Pengeluaran (Ribu Rupiah)	Kahu- kahu	Bontoborusu	Bontolebang	Total
< 500	1,3	0,0	0,0	0,5
500 – 999	5,0	15,0	0,0	8,0
1.000 – 1.499	17,5	35,0	10,0	8,0
1.500 – 1.999	32,5	21,3	15,0	24,5
2.000 – 2.499	25,0	12,5	40,0	23,0
2.500 – 2.999	10,0	7,5	10,0	9,0
3.000 – 3.499	5,0	2,5	5,0	4,0
3.500 – 3.999	0,0	2,5	12,5	3,5
4.000 – 4.499	2,5	1,3	7,5	3,0
4.500 – 4.999	0,0	0,0	0,0	0,0
≥ 5.000	1,3	2,5	0,0	1,5
N	80	80	40	200

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2015.

Dari sisi penggunaan pengeluaran, sebagian besar pengeluaran rumah tangga dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan Kahu-kahu sebagai desa yang tertinggi mengeluarkannya. Setelah pangan, pengeluaran terbesar dikeluarkan untuk rokok. Penggunaan untuk pendidikan, kesehatan, serta sosial dan keagamaan terlihat rendah. Distribusi penggunaan yang hampir semuanya untuk kebutuhan pangan menandakan hampir semua rumah tangga di lokasi penelitian masih memenuhi kebutuhan paling dasar dan belum banyak memikirkan untuk investasi pada kebutuhan lainnya, seperti pendidikan (Tabel 5.3.2).

Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan untuk rokok ternyata jauh lebih besar beberapa kalinya dari penggunaan untuk kesehatan, pendidikan, serta sosial keagamaan. Hal ini memang sangat terlihat dengan tingkat pendidikan ketiga desa yang sudah dibahas sebelumnya.

Tabel 5.3.3.

Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Menurut Penggunaan di Lokasi Penelitian, Kabupaten Selayar, Tahun 2015 (Rupiah/bulan)

Jenis Penggunaan	Kahu-kahu	Bontoborusu	Bontolebang	Total
Pangan	1.454.478	1.271.813	1.262.143	1.403.738
Pendidikan	44.167	159.167	833	68.306
Kesehatan	5.417	8.565	6.250	8.707
Rokok	336.138	334.945	450.000	361.098
Sosial dan keagamaan	15.258	17.163	16.667	17.032

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2015.

Terakhir, setelah dianalisis selisih antara pendapatan dan pengeluaran rata-rata rumah tangga bulanan ditemukan bahwa secara umum rumah tangga di lokasi penelitian mengalami minus/defisit Rp -498.624 per bulan. Bontolebang merupakan desa yang tertinggi minus/defisitnya, yaitu Rp 1.563.052; disusul oleh Bontoborusu Rp -590.274. Yang menarik, Kahu-kahu yang pendapatannya terendah ternyata justru menjadi satu-satunya yang surplus Rp 125.239.

Untuk memenuhi kekurangan/minus/defisit tersebut, mereka banyak mengandalkan berbagai program dan bantuan dari pemerintah, seperti program raskin; program keluarga harapan (PKH); bantuan operasional pendidikan siswa miskin; bantuan dana desa (PNPM/ADD) yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana desa yang melibatkan partisipasi mereka, baik sebagai perencana maupun pekerja yang mendapat upah kerja; dan berbagai sosialisasi/pelatihan yang biasanya diakhiri dengan pemberian uang saku/transport bagi mereka yang mengikutinya. Sayangnya, dalam survey, sebagian besar rumah tangga terpilih tidak mau menyampaikan

pendapatan pendapatan tambahan dari berbagai program dan bantuan pemerintah ini.

Kondisi ini tentunya sangat mengkhawatirkan. Ini artinya semua rumah tangga di lokasi penelitian hanya mampu melakukan strategi bertahan hidup (*survival*) saja. Mereka tidak mampu melakukan strategi akumulasi. Sekali lagi, dalam perspektif penghidupan berkelanjutan, rumah tangga di lokasi penelitian memiliki tingkat kerentanan penghidupan yang sangat tinggi.

BAB VI

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT

6.1. Faktor Internal

6.1.1. Sumber Pendapatan

Pendapatan di ketiga desa lokasi penelitian sangat dipengaruhi kegiatan perikanan tangkap. Perikanan menjadi sumber pendapatan terbesar bagi rumah tangga di ketiga desa. Letaknya yang berada pulau dan pesisir serta sangat dekat dengan perairan yang kaya dengan sumber daya laut menjadikan hampir semua penduduk/rumah tangga melakukan adaptasi *livelihood* dengan memilih bekerja sebagai nelayan tangkap.

Karena sangat terkait dengan kondisi alam (musim gelombang), tidak selamanya nelayan bisa menangkap ikan sepanjang tahun. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan keberlanjutan penghidupannya, sebagian kecil penduduk di lokasi penelitian juga menjalankan strategi nafkah ganda/pekerjaan tambahan. Pertanian yang mencakup perkebunan, tanaman pangan, dan peternakan menjadi pekerjaan tambahan yang paling banyak dilakukan Mereka memanfaatkan pekarangan dan lahan-lahan yang ada di sekitar desa. Baik pekerjaan utama maupun pekerjaan tambahan sebagian besar dilakukan sendiri. Mereka hanya akan mendapatkan pendapatan ketika mereka kegiatan melakukan pekerjaannya.

6.1.2. Teknologi Alat Tangkap/Produksi dan Wilayah Tangkap

Pancing Ikan Sunu

Alat pancing ikan sunu bone (*plectropomus oligocanthus*) merupakan alat tangkap yang dominan di desa Desa Bontolebang. Nelayan pancing termasuk

matapencaharian yang digeluti oleh sebagian besar penduduk desa ini, yaitu sekitar 90% dari jumlah nelayan yang ada di desa Bonto Lebang. Mengapa alat pancing Sunu Bone cukup dominan di desa ini? Ikan sunu adalah ikan target utama bagi nelayan pancing karena memiliki nilai ekonomis tinggi. Karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, ikan sunu bukan termasuk ikan yang dikonsumsi. (cakalang kecil, layur, biawas).

Nelayan cenderung menjual ikan sunu dan membeli dengan jenis ikan konsumsi lainnya harganya lebih murah. Tetapi, ada kalanya nelayan mendapat ikan di luar sunu yang dapat digunakan sebagai ikan makan. Saat dilakukan wawancara nelayan ini mengaku 4 hari yang lalu mendapatkan ikan sunu tetapi ikan katamba atau ikan putih. Ikan sunu yang berukuran 0,5- 1kg merupakan ukuran size yang dapat mencapai Rp. 300.000,- dalam kondisi hidup, sedangkan dalam kondisi mati, harganya dapat mencapai Rp. 75.000,-. Tingginya harga ikan ini menjadi daya tarik kegiatan menangkap ikan sunu.

Alat pancing ikan sunu hanya memiliki satu kali, hal ini yang membedakan dengan nelayan rawai yang memiliki banyak mata kail. Jenis pancing berukuran 6 dan 7. Ada 3 (tiga) jenis mata kail ikan sunu, yaitu : *tomba* (untuk menangkap ikan hidup), *bulu ayam*, dan *modeng*. Kedalaman lokasi pemancingan sekitar 80 meter. Jenis perahu yang digunakan dalam kegiatan pancing sunu adalah jenis perahu lepa-lepa kecil dengan mesin ketinthing (185 PK), yang diawaki oleh seorang nelayan pancing. Nelayan membutuhkan sekitar 4 liter solar yang harganya Rp. 10.000 per liter, dan kebutuhan lain sekitar Rp. 20.000,- dengan demikian dalam setiap harinya nelayan harus mengeluarkan sekitar Rp. 60.000,-. Informan ini mengaku tidak pernah makan siang, meskipun ia pergi melaut mulai pagi subuh dan pulang pada sore hari.

Meskipun peralatan memancing tidak begitu besar dan cukup membutuhkan sarana perahu dan mesin tempel seharga sekitar 4,5 juta rupiah tetapi nelayan pancing menerima pinjaman dari pihak pedagang ikan. Nelayan pancing bisa saja meminjam dari sumber lain, tetapi mereka tetap saja menerima tawaran pinjaman dari pedagang ikan dan sekaligus sebagai komitmen dalam ikatan bisnis. Tidak ada kewajiban mencicil modal pinjaman tetapi ada kewajiban menyetor hasil tangkapan kepada pedagang ikan di kabupaten.

Bagi nelayan pancing, hasil pancingan tidak harus dibawa ke pedagang ikan di kabupaten tetapi cukup disetor ke orang kepercayaan atau karyawan pengepul ikan yang tinggal satu desa. Biasanya pedagang ikan memiliki keramba penampung hasil tangkapan nelayan pancing. Orang pengemul mendapat mendapatkan upah Rp. 50.000 per kilo ikan hidup atau Rp, 30.000,- ikan mati yang disetor ke pedagang ikan.

Kegiatan memancing ikan sunu dapat dilakukan sepanjang tahun, tetapi hasil tangkapan yang paling banyak ikan terjadi pada musim barat atau musim ombak, yaitu sekitar bulan Februari dan Maret. Lokasi pemancingan di wilayah sebelah utara pulau, yang disebut Burugaya dan mata-mata. Sedangkan, lokasi pemancingan pada saat musim timur berada di Bejangan dan Bajang.

Ikan ikan yang besar akan dijual kepada pedagang penampung ikan, utamanya ikan Sunu (kerapu merah). Harga kerapu merah mati per kg Rp 70.000,-, harga kalau hidup Rp 300.000,-. Ikan-ikan besar akan dijual oleh bapak-bapak, dan sesampai di rumah uang tersebut akan diberikan kepada istrinya. Hari berikutnya bila bapak-bapak membutuhkan keperluan untuk melaut, akan meminta uang kepada istrinya untuk bekal keperluan melaut, seperti beli minyak, rokok, dan makanan. Dalam sekali melaut biasanya untuk menangkap ikan Sunu akan menghabiskan sekitar Rp 70.000 – Rp 100000. Rinciannya bensin 5 liter Rp 50.000. Rokok yang murah Gudang garam surya Rp 16.000, beli umpan Rp 20.000, dan bekal makanan, bisa kue-kue, atau nasi campur jagung dan lauknya ikan dan sambal. Ikan umpan harus dibeli di pedagang penampung ikan atau di perahu bagan, kalau cari sendiri waktunya habis.

Nelayan pancing ikan suni di desa Bontoborusu merasa tertunggu kegiatan memancing ikan sunu oleh adanya kegiatan penyelaman di bawah laut, baik untuk kepentingan wisata ataupun kegiatan penangkapan ikan. Sosialisasi zonasi di kawasan perlindungan terumbu karang dirasakan belum optimal dan peserta FGD menilai kebijakan pemerintah kabupaten masih belum jelas terutama terkait dengan penggunaan kompressor.

KJA Pembesaran Ikan Sunu

Kegiatan KJA pembesaran ikan sunu berkembang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pemancingan ikan sunu. Dengan adanya potensi ekonomi ikan sunu mendorong nelayan untuk mengembangkan budidaya ikan ini tetapi menurut informasi, budidaya ikan ini tidak berhasil karena berbagai faktor meskipun kegiatan ini didukung oleh pemerintah dengan berbagai program bantuan jaring keramba. Menurut informasi budidaya ikan sunu berhenti tahun 2010 karena kesulitan bibit. Namun demikian, tumbuh kegiatan pembesaran ikan sunu dalam keramba yang bibitnya diambilkan dari hasil pemancingan ikan sunu yang berukuran dibawah 0,5 kg per ekor.

Pembesaran keramba ikan sunu bagi nelayan pancing terutama yang mampu dan punya modal (karena tidak semua nelayan pancing memiliki keramba), untuk menampung hasil tangkapan yang kurang dari 0,5 kg. Ikan diperlihara dahulu sampai mencapai ukuran mencapai sekitar 1 kg. Seorang informan pemilik keramba mengaku memiliki keramba berukuran (15 x 25) meter berisi sekitar 750 ekor sunu.

Ada perbedaan yang menonjol antara kegiatan pancing sunu dengan nelayan pemilik keramba pembesaran. Nelayan pancing ikan sunu tergantung dari pedagang ikan kabupaten Selayar. Ada ikatan bisnis di antara mereka. Semua nelayan pancing sunu dapat dikatakan memiliki ikatan bisnis dengan pedagang ikan sunu. Mereka menanamkan modal berupa peralatan mesin kapal kepada nelayan pancing. Tidak ada kewajiban mencicil modal pinjaman. Modal pinjaman sebagai tanda bukti ikatan bisnis, yaitu nelayan wajib menyeter hasil tangkapan kepada pedagang ikan di kabupaten. Sedangkan, pemilik keramba tidak memiliki ikatan bisnis dengan pedagang ikan. Mereka menjual bebas hasil keramba pembesaran ikan sunu.

Kehadiran keramba pembesaran ikan tersebut di atas merupakan lapangan kehidupan yang relatif baru bagi penduduk pulau karena sebelumnya setiap hasil pancingan hidup atau mati dalam berbagai ukuran selalu dijual kepada pedagang ikan. Hasil keramba dapat memberikan pendapatan yang cukup besar setiap kali memanen dari kegiatan pembesaran yang dilakukan dalam setiap tahunnya. Hasil keramba ikan merupakan tabungan atau aset rumah tangga nelayan. Dari setiap kali memanen, nelayan bisa mendapatkan hasil

sekitar puluhan juta rupiah. Informan ini mengaku menjual hasil keramba pada bulan Maret yang lalu sekitar 30 ekor ikan sunu dengan harga total 9 juta rupiah.

Pemilik keramba umumnya nelayan pancing atau pengepul ikan tuna. Tidak semua nelayan pancing memiliki keramba pembesara karena membutuhkan biaya pakan ikan. Pemilik keramba dapat membeli ikan pakan sekitar Rp. 20.000 per kg. Nilai sebuah keramba pembesaran dapat mencapai 5,5 juta dengan ukuran 3x3 meter. Namun demikian, kegiatan keramba pembesaran sunu memberikan peluang bagi nelayan lainnya (nelayan bagan dan nelayan jaring) untuk menjual hasil tangkapan sebagai sumber pakan ikan keramba pembesaran, disamping menjual ke pasar ikan.

Bagan Perahu

Bagan perahu terdapat di desa Bonto Beruso. Alat tangkap ini belum lama berkembang di desa ini dan tidak ada bagan tancap di Selayar. Sebelum menjadi nelayan Bagan, informan ini menjadi ABK bagan perahu. Bagan tancap tidak terdapat di Selayar. Pada musim barat, bagan perahu tidak dioperasikan atau diistirahatkan. Alat ini tidak bisa dioperasikan pada musim barat. Pada umumnya, nelayan bagan perahu pada musim barat dimanfaatkan untuk memperbaiki bagan atau bekerja sebagai tukang bangunan. Nelayan bagan didesa ini mengaku tidak terampil bekerja di unit alat penangkapan lainnya. Menurut informan ini, menjadi nelayan pancing sunu tidak mudah. Memancing ikan sunu di perairan dalam yang membutuhkan ketrampilan khusus, seperti penggunaan alat bantu pemberat yang tidak dikuasainya.

Dalam satu unit bagan perahu terdapat 5 ABK. Sistem bagi hasil dalam bagan perahu pada prinsipnya dibagi dua bagian setelah dikurangi biaya operasional, yaitu antara pemilik dan ABK. Nilai bagan perahu dapat mencapai ratusan juta, tetapi informan ini membeli bagan bekas seharga 49 juta rupiah. Informan mengaku bahwa untuk membeli bagan dibantu modal oleh pedagang penampung hasil bagan. Oleh karena investasi mahal, jarang warga masyarakat yang tertarik usaha bagan perahu.

Menjual ke pedagang ikan merupakan prioritas utama. Hasil bagan yang tidak terjual karena kualitas jelek baru dijual pemilik keramba ikan. Ikan yang menjadi target bagan antara lain adalah ikan layang, Teri, dan Cumi-cumi. Pasar hasil bagan terserap di kota Benteng (ibukota kabupaten Selayanr) dan di Kampung-kampung. Tetapi untuk cumi dalam bentuk diawetkan dipasarkan di Makassar.

Jaring Kepiting Laut dan Pancing Rawe

Jaring kepiting laut (*sikuju*) dan pancing rawe merupakan sepasang alat tangkap yang dikembangkan nelayan di Kahu-Kahu. Pancing rawe memiliki 250 mata kail. Ikan yang menjadi target pancing rawai antara lain adalah lemuru, lobster dan copa, terkadang mendapatkan sunu tetapi sangat jarang diperoleh. Pengoperasian jaring rawe dilakukan secara perorangan dan berangkat pada subuh dan pulang siang hari. Hasil tangkapan dijual di pasar Padang di kota Benteng (Selayar). Di pasar ini terdapat seorang penampung hasil tangkapan yang biasa membeli hasil tangkapan.

Pancing rawai lebih berkembang di desa ini karena tidak serumit pancing sunu, yang harus dilengkapi dengan batu pemberat dalam memancing. Oleh sebab itu, nelayan pancing rawai lebih berkembang di desa Kahu-Kahu. Bagi nelayan Kahu-Kahu, penggunaan pancing rawe bisa mendapatkan cumi yang memiliki harga tinggi. Harga cumi bisa dibeli Rp. 150.000 per kg. Sementara itu, biaya operasi setiap kali melaut membutuhkan biaya Rp. 300.000,-. Informan nelayan pancing mengaku selalu merugi dengan ongkos melaut yang harus dikeluarkan dalam setiap kali melaut. Namun demikian, pancing rawe pada musim barat tidak bisa dioperasikan, dan nelayan pancing rawe pindah alat tangkap, yaitu mencari kepiting laut. Jadi dengan demikian, antara pancing rawe dan jaring kepiting merupakan alat tangkap ini saling melangkapi sehingga sepanjang tahun nelayan di Kahu-Kahu dapat mendapatkan penghasilan, meskipun ada resiko yang dihadapi, yaitu menangkap kepiting membuat jaring kepiting laut mudah robek yang berakibat harus mengeluarkan ongkos tambahan perbaikan jaring sekitar Rp. 125.000,-.

Pancing Gurita

Memancing Gurita adalah matapencaharian lain yang berkembang di desa Kahu-Kahu. Matapencaharian ini cukup dominan, yakni sekitar 100 orang penduduk desa Kahu-Kahu yang mengeluti matapencaharian ini. Gurita termasuk hasil laut yang memiliki nilai ekonomi. Harga Gurita super yang memiliki berat 2 kg dapat diperli dengan harga Rp. 34.000 per kg. Kemudian ukuran dibawahnya Rp. 26.000,- (1-2)kg, Rp. 22.000 (5-9)Ons, dan Rp. 10.000 berukuran dibawah 1 kg (bebi). Tidak ada ikatan bisnis antara nelayan Gurita dengan penampung. Nelayan Gurita beroperasi mulai jam 06.00 (pagi) dan pulang jam 16.00 sore. Informan ini mencari gurita setiap hari, kecuali hari Jumat. Ongkos yang harus dikeluarkan sekitar Rp. 50.000,- yang digunakan untuk membeli bensil 2 liter dan bekel di laut. Kedalaman laut untuk menangkap Gurita sekitar 15 depa. Alat tangkap Gurita disebut “pocong”, yakni Guritan buatan terbuat dari kain sebagai daya tarik Gurita. Pada saat Gurita mendekat maka diturunkan mata kail sehingga Gurita dapat tersangkut di mata kail tersebut.

Pedagang Ikan Perempuan

Peranan perempuan pedagang ikan keliling tidak bisa diabaikan sumbangnya bagi pendapatan rumah tangga. Di Desa Bontoborusu terdapat dua orang yang berprofesi sebagai penjual ikan keliling dari pintu ke pintu. Beberapa jenis ikan yang dijual meliputi ikan-ikan kecil yang berharga murah, seperti, belanak, honti, katamba, linggis, bandeng, bete-bete, moru-moru, toda, layang, Ikan-ikan tersebut diambil dari suaminya setelah pulang melaut sekitar pukul 5 – 7 pagi.

Ikan ikan kecil hasil menjaring, dan memancing disisihkan untuk dijual ke konsumen langsung atau di pasar Padang. Jenis ikan kembung misalnya 10 ekor dijual Rp 10.000 (saat mahal seperti sekarang), saat murah hanya Rp 5000. Ibu papalele berjualan dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang. Kalau tidak laku akan di es dengan membeli dari pasar Padang. Ikan yang tidak laku dijual hari ini akan dijual pada hari esoknya. Kalau juga tidak laku, akan dibuat ikan

asin . Ikan-ikan asin ini akan dijual di pasar Padang, harganya tergantung jenis ikan dan kualitasnya. Harga yang bagus ikan kering di pasar Padang antara Rp 35.000 – 40.000 per kg. Biaya transportasi untuk menuju ke pasar Padang dengan Ojek perahu sebesar Rp 5000 per orang.

Suka duka yang dialami pedagang ikan adalah kalau dagangannya cepat terjual dan mendapatkan uang tunai untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga hari itu juga. Kegagalan sang suami dalam mencari ikan juga dirasakan duka bagi nelayan, karena penghasilannya memang sangat dinantikan oleh nelayan. Bila suaminya tidak mendapat ikan, maka seorang pedagang papalele akan membeli dari nelayan tetangganya. Ikan-ikan kecil disini, selain dikonsumsi untuk lauk pauk sehari hari, juga biasa dibeli oleh nelayan pembudidaya (yang sebenarnya adalah pembesaran/penampungan ikan kerapu hasil memancing atau mungkin juga hasil membius yang ukurannya masih di bawah 3 ons untuk dibesarkan). Harganya sama dengan harga yang dibeli oleh papalele.

Dukanya ya kalau dagangan tidak cepat laku terjual, pada hal hari itu uang sangat dibutuhkan misalnya untuk membayar anak sekolah, untuk membiayai keluarga yang sakit, atau hanya sekedar untuk membeli beras sebagai campuran dengan jagung. Hampir seluruh warga di sini mendapatkan Raskin, dibagi rata. Dukanya ya kalau dagangan tidak cepat laku terjual, pada hal hari itu uang sangat dibutuhkan misalnya untuk membayar anak sekolah, untuk membiayai keluarga yang sakit, atau hanya sekedar untuk membeli beras sebagai campuran dengan jagung. Hampir seluruh warga di sini mendapatkan Raskin, dibagi rata, masing-masing 10 kg. Tahun ini baru turun sekali, harga per kg beras raskin dibayar Rp 2000 per kgnya. Ikan-ikan yang tidak laku terjual hari ini akan di awetkan dengan Es yang di beli di Pasar Padang. Di kampung ini kualitas esnya kurang bagus karena aliran listriknya tidak stabil, terpaksa harus beli di Padang. Dalam satu hari jualan ikan, uang yang didapat antara Rp 50.000 sampai Rp 150.000 per hari.

Selain berdagang ikan, perempuan di desa Bontoborosu juga bekerja sebagai pekebun. Jenis tanaman yang diusahakan meliputi, jagung varietas lokal atau lazim pula disebut jagung pulut, ubi kayu, pisang, mete, kelapa, dan aneka tanaman sayuran seperti kacang panjang, terung, cabe, dan labu. Jagung

tampaknya masih menjadi makanan pokok mereka dicampur dengan beras. Jagung tersebut digiling di rumah Ibu Rodawati, dengan biaya giling Rp 600 per kg. Jagung yang sudah digiling ini lazim disebut “bete”. Pernah juga diujicobakan dengan tanaman jagung bonggol kuning, tetapi hasilnya tidak bagus. Rasanya juga tidak disukai masyarakat. Malah ada pengalaman kalau masyarakat mengkonsumsi jagung kuning tersebut, orang yang mengkonsumsinya akan sakit perut dan buang-buang air. Masyarakat menganggap bahwa jagung tersebut hanya layak untuk bahan makanan ternak. Jagung kuning juga hanya akan hidup kalau menggunakan pupuk kimia. Berbeda dengan jagung putih, rasanya enak seperti beras ketan, mudah perawatannya, dan tanpa menggunakan pupuk kimia. Tanaman jagung menjadi makanan utama penduduk Desa di sini, dicampur dengan beras. Tanaman jagung ini tidak dijual, karena untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, disamping hasilnya memang tidak banyak. Dalam waktu 1 tahun tanaman jagung dapat panen 2 kali.

Selain tanaman pangan, tanaman yang diusahakan penduduk adalah tanaman buah mete. Harga mete glondongan per kg Rp 10.000. Harga yang sudah dikupas dan dikemas dalam ukuran 1 kg, di Benteng (Kota Kabupaten Selayar Rp 110000,-). Buah mete tersebut dijual dalam bentuk glondongan, karena di Desa ini belum ada mesin pengupas mete. Buah metenya juga hanya dibuang saja. Baru saja ibu Rodawati menjual mete sebanyak 1 ton, dengan nilai jual Rp 10.000.000,-. Dalam satu tahun mete ini akan panen. Ibu Rodawati memang termasuk berstatus sosial ekonomi tinggi di Desa ini, sekalipun suaminya tidak bekerja sebagai nelayan, tetapi hanya menekuni kebunnya. Rata-rata penduduk di sini hanya memiliki luas tanaman mete yang sempit, biasanya hasilnya sekitar 2 kuintal atau setara dengan harga Rp 2 juta. Rata-rata kepemilikan tanah di sini adalah sekitar 0,5 ha, kalau ibu Rodiah memiliki 1 ha, tergolong luas. Untuk menjual hasil kebun, sudah ada penampungnya sendiri, yang siap mendatangi ke rumah-rumah penduduk. Di desa ini terdapat 3 orang pedagang pengumpul buah mete.

Tanaman komersial lainnya adalah kelapa. Buah kelapa menjadi andalan industri rumah tangga membuat minyak kelapa. Minyak kelapa ini akan digunakan sendiri, dan sisanya akan dijual di Pasar Padang. Harga per liter Rp

10.000,-. Tahi minyaknya “tenyonyo” akan diambil untuk dijadikan lauk makan, dimakan dengan singkong rebus, atau disambal. Sisanya akan dibuang saja di kebun. Untuk menggarap kebun, biasanya dikerjakan bersama-sama dengan suaminya. Bagi yang tidak memiliki waktu, bisa juga diupah, dengan upah harian Rp 60.000 per hari. Mulai bekerja jam 8 – jam 5 sore dengan membawa bekal makanan sendiri. Tidak ada wanita yang menjadi buruh kebun. Pekerjaan dikebun, meliputi pembersihan rumput, penanaman jagung, penjarangan ranting-ranting mete, memetik buah mete, memetik jagung dan memetik buah kelapa. Bagi kaum laki-laki juga masih memiliki pekerjaan di kebun yakni menjaga kebunnya dari serangan hama, seperti tikus, tupai, babi hutan, dan serangan belalang. Hama yang lain adalah serangan ulat. Penjaga kebun ini dilakukan siang malam dengan tinggal di pondok-pondok kebun.

Selain berkebun, perempuan di desa Bontoborusu juga bekerja sebagai pedagang pembuat makanan ringan kue. Dijual di rumah saja, seperti ibu Siti Nurhayati, suaminya hanya bekerja dikebun saja, istrinya menjual kue, dan membuka usaha gilingan jagung, per kg Rp 600. Menurut ibu Nursiah, lebih baik berusaha saja dikebun. Bapaknya lebih suka memilih bekerja dikebun. Menurut penilaian ibu Siti Nursiah, pendapatan dikebun lebih menjanjikan, dari pada bekerja sebagai nelayan. Diantara ibu-ibu yang di wawancarai dalam FGD mengatakan kecuali “mafia nelayan”, yang dimaksud adalah para pembom, dan pembius ikan Sunu. Di kampung ini tidak ada orang yang berprofesi sebagai Mafia Nelayan, kecuali di kampung lain.

Selain itu, ada juga wanita nelayan yang bekerja sebagai pedagang keliling jualan pakaian. Pakaian tersebut dibeli di Kota Benteng, tepatnya di Toko Cahaya Rahmat. Pakaian tersebut ada yang dijual dan dibayar tunai, ada juga yang dikreditkan. Orang yang menjadi langganan kreditnya sebanyak kurang lebih 100 orang di desa ini. Hampir setiap hari ibu Siti Marwah menagih utangannya dengan berkeliling dari pintu ke pintu. Umumnya tagihannya lancasr asal kita mau keliling. Mulai jam 7 pagi setelah mengurus anak-anak mau sekolah, ibu Marwah kemudian berkeliling menarik tagihan, sambil menawarkan barang dagangannya. Ibu Marwah akan pulang Jam 12 siang untuk istirahat dan makan bersama anak-anak. Makanan tersebut sudah disiapkan pada pado harinya sekalian untuk sarapan pagi.

Modal usaha ibu Marwah ini semula hanya Rp 300.000,-. Usaha ini ditekuni sejak 8 tahun yang lalu. Keuntungan rata-rata per pakaian antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Dalam satu bulan ibu Marwah bisa menarik uang sekitar Rp 400.000. Suami Ibu Marwah orang Bugis, menjadi pemilik nelayan bagan. Disamping itu, Ibu Marwah juga membuka kios warung kelontong. Ibu-ibu yang diwawancarai dalam FGD ini juga bergabung dalam kelompok PKK. Ibu-ibu ini berharap agar ada bantuan yang masuk ke desa ini, agar kelompok dasa wisma memiliki kegiatan usaha dan keterampilan.

Tidak jauh berbeda di drda Bontoborusu, di desa Kahu-Kahu, kaum perempuan berusaha menutupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya dengan cara berjualan, ada yang jualan ikan seperti ibu Darmi dan Romlah, jualan ikan teri, lure, tete, dan cumi-cumi. Pekerjaan ini biasa dilakukan oleh kalangan ibu rumah tangga. Tidak ada perempuan yang masih bujang yang berjualan membantu ibunya. Pekerjaan sebagai pedagang di desa ini tidak menarik bagi perempuan desa, kecuali ibu-ibu rumah tangga nelayan karena alasan ekonomi rumah tangga. Di desa ini, perempuan penjual ikan dalam bahasa Selayar disebut sebagai “Pabalujuku”. Wadah yang biasa digunakan untuk jualan adalah “talam”, kadang juga pakai baskom. Para Pabalujuku berjualan hanya pada bulan gelap selama 15 hari, sebab pada bulan terang tidak ada ikan. Istilah lokal membawa talam di atas kepala lazim disebut “Song Juku”. Ibu-ibu pedagang ikan ini berkeliling dari rumah-ke rumah menjajakan ikannya, dengan meneriakkan “ikan-ikan, ikan-ikan”. Jenis-jenis ikan di kelompokkan dan di tumpuk “Gompok” di dalam baskom, saat ditawarkan pembeli.

Selain ikan-ikan kecil, ibu-ibu juga ada yang membeli ikan-ikan besar yang mati, seperti ikan kerapu yang mati dibeli Rp 12.500, kalau tidak sampai 5 ons, kemudian di filet (dibelah) untuk dijadikan ikan asin, sedang yang hidup harganya mencapai Rp 400.000,. Caranya ikan dibelah, dibersihkan, kemudian dikasih garam, dijemur, dicuci lagi dengan air laut, kemudian dijemur lagi. Harga ikan asin per kg di Desa ini Rp 50.000,- per kg, di Kota Benteng Rp 80.000,- per kg.

Seperti juga masyarakat nelayan lainnya, umumnya belum terjangkau oleh lembaga pelayanan keuangan secara resmi. Tekanan ekonomi rumah tangga nelayan, telah mengundang hadirnya para pelepas uang. Di Desa Kahu-Kahu, mereka umumnya datang dari kota Benteng, mengaku sebagai koperasi dari Benteng. Di desa setempat sendiri juga terdapat 5 orang pelepas uang yang siap meminjamkan uangnya. Bila meminjam Rp 1000.000 akan dikembalikan sebesar Rp 1300.000 per bulan. Orang yang bekerja sebagai pelepas uang lazim disebut “Pakjekue Doik”.

Kebutuhan akan uang tunai yang mendesak juga telah melahirkan lembaga-lembaga keuangan tradisional seperti gadai ladang (pitak gala). Baru nanti setelah memiliki uang untuk menebus, uang akan dikembalikan dan tanah akan digarap kembali oleh pemiliknya. Di Desa ini tidak ada kebiasaan orang menjual tanah kalau tidak karena terpaksa sekali. Kalau memang sudah terpaksa, biasanya akan diutamakan pembelinya dari kalangan keluarga dekat dulu. Kalau memang keluarga dekat tidak ada yang mau, baru ditawarkan kepada orang lain.

Lembaga Ekonomi Lokal

Lembaga ekonomi lokal yang pernah berdiri di Desa Bontolebang, tetapi bukan koperasi nelayan, lembaga ini hanya bergerak dibidang simpan pinjam. Terdapat 3 kelompok simpan pinjam, antara lain Kelompok Melati, Kelompok Tanjung Harapan. Lembaga ini didirikan pada tahun 2003 melalui program PNPM. Namun, kegiatan simpan pinjam tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena simpanan pokok dan wajib tidak disetor. Lembaga ekonomi lokal ini semata-mata hanya mengandalkan bantuan keuangan pemerintah.

Lembaga ekonomi lokal lainnya adalah kelembagaan “ijon tanaman” atau dalam bahasa Selayar disebut “ambil panjar”. Jenis tanaman yang biasa diambil panjar adalah tanaman komersial Mete, atau kelapa. Pekebun mengambil duit dahulu, nanti akan diperhitungkan kemudian setelah panen. Di Desa ini terdapat sekitar 15 orang yang biasa membeli dengan sistem ijon atau “Ambil Panjar”. Orang yang biasa membeli jambu mete dengan sistem ijon/

panjar Jambu Mete disebut “Pahalli Jambu-Jambu”, sedangkan orang membeli dengan sistem ijon kelapa disebut “Pahalli Njoro”.

Buruh Perempuan Petik Mete

Lapangan pekerjaan yang tumbuh dengan adanya sistem ijon adalah pekerjaan buruh tani petik buah, yang disebut “Kombong”. Pekerjaan petik buah mete dalam satu hari berlangsung 9 jam (mulai bekerja jam 8 sampai jam 5 sore) dengan upah Rp 50.000,- (makanan membawa sendiri). Selain berasal dari desa Bontoborusu, tenaga buruh petik mete sebagian berasal dari desa Kahu-Kahu, ada sekitar 35 orang. Pekerjaan seperti menyabit (membersihkan rumput), menyapu kebun, petik jambu. Umumnya dilakukan oleh janda-janda tua. Bekerja sebagai buruh petik mete ini sering kali bagian dari pengembalian uang pinjaman kepada tuan tanah

Ada juga kebun-kebun penduduk yang dikerjakan dengan sistem gotong royong, saling bergantian antar tetangga mengerjakan kebun (re-ra”. Selain itu, banyak juga wanita-wanita di Desa ini yang bekerja sebagai pedagang sayur-sayuran, diantaranya Siti, Swaha, Sahria, Ati, dan Darma. Pedagang sayur ini lazim disebut “Soung Gangang”. Jenis sayuran yang dijual seperti, kangkung, bayam, labu, terong, nangka, cabe, tomat, dan sebagainya.

Industri Pembuatan Terasi

Pada musim banyak udang, di desa ini juga dikenal dengan usaha industri rumah tangga pembuatan terasi. (terasi). Di Dusun Dopa terdapat 2 kelompok wanita pembuat terasi. Salah satu diantaranya yang diingat adalah Kelompok Kaletutu, pernah mendapat bantuan alat mesin giling terasi dari Dinas Perikanan kabupaten Selayar masing-masing kelompok mendapat satu bantuan alat giling terasi lazim disebut “asu”. Tetapi masyarakat lebih suka hasil produksi terasi yang dikerjakan secara manual dengan ditumbuk. Rasanya lebih enak yang ditumbuk. Harga terasi per 10 biji sebesar butir kelereng Rp 1000, (2011), sekarang 6 butir Rp 1000,. Udang kecil-kecil ini diambil dengan alat tangkap yang disebut “tamba”.

Pengumpul Ikan Hidup

Pengumpul ikan terdapat di Desa Bontolebang (10 orang). Hasil pembelian ikan hidup dibawa ke Benteng. Mereka sesungguhnya adalah karyawan pengumpul di Benteng yang diupah dengan memberi prosentase. Misalnya kalau menjual sebesar 1 kg ikan sunu nhidup akan diberi bonus Rp 50.000,-. Mereka juga dipercaya Bos di Benteng untuk menampung ikan-ikan kerapu sunu yang masih hidup yang belum memenuhi ukuran zize 5 ons ke atas untuk dipelihara. Para pengumpul ini juga membeli ikan hasil menjaring, dan bagan untuk dibeli yang akan digunakan sebagai pakan alami. Kesepuluh orang tersebut antara lain, Haji Muhammad, Haji Salim, Basri, Abdul Rauf, Aminudin, Demanapu, Jupri, dan Mustari, baharudin, Jalaludin. Ikan-ikan hasil pancingan yang dijual ke pengumpul, biasanya akan dibayar setelah laku dijual di pengumpul Benteng. Di Benteng terdapat 3 orang penampung, yakni Aping, Titik, Feri, dan Bonto. Penentuan harga ditentukan di Benteng.

Jasa Ojek Laut

Sumber penghasilan, selain dari alat atangkap adalah jasa transportasi ojek laut yang mengubungan antara pulau Selayar denga ketiga desa tersebut yang berada di Pulau Gusung. Ada 14 perahu ojek laut yang melayani jassa transportasi penduduk.

6.1.3. Biaya Produksi

Terkait dengan semakin sulitnya menangkap ikan dan sudah tidak ada lagi wilayah tangkap yang pasti, tentunya biaya produksi, terutama BBM, pun meningkat. Selain itu, biaya produksi juga mengalami peningkatan ketika melaut pada musim gelombang pancaroba dan gelombang tinggi. Apalagi menurut mereka, belakangan ini kondisi cuaca dan gelombang di perairan semakin tidak menentu. Jika dikaitkan dengan penelitian-penelitian IPCC, BMKG, LIPI, dan lembaga lainnya, ketidakpastian ini sangat terkait dengan perubahan iklim yang diakibatkan pemanasan global. Biasanya, untuk menghadapi persoalan ini, terutama pada saat gelombang tinggi para nelayan

hanya menangkap ikan di pinggir-pinggir pantai saja. Peningkatan biaya produksi dan berkurangnya hasil tangkapan ini tentunya mengurangi pendapatan mereka. Biaya lainnya yang memiliki kontribusi cukup besar dalam biaya produksi melaut adalah pembelian rokok.

Untuk biaya produksi lainnya, seperti upah awak kapal, jumlahnya tidak terlalu signifikan. Sebagian besar dari mereka melakukan penangkapan ikan sendiri; dan seandainya pun dibantu, lebih banyak dibantu oleh anak (anggota rumah tangga) yang tidak dibayar. Mereka pun sangat jarang yang bekerja sebagai nelayan buruh (ABK) yang bekerja di kapal/perahu orang lain.

6.1.4. Kualitas Sumber Daya Manusia

Mayoritas nelayan di ketiga desa lokasi penelitian termasuk nelayan kecil jika dilihat dari ukuran armada penangkapan. Mereka tidak memiliki ketrampilan sebagai nelayan modern karena peralatan yang dikembangkan sangat sederhana. Meskipun akses pasar ikan untuk permintaan ikan ekspor terbuka tetapi tidak berkaitan dengan kondisi nelayan di ketiga desa, yang masih dikategorikan sebagai nelayan kecil yang tidak memiliki kemampuan berkembang sebagai nelayan besar. Oleh karena itu, alat tangkap berukuran besar seperti pukat cincin atau jaring gae tidak berkembang disini karena disebabkan faktor kondisi SDM kenelayanan yang masih rendah. Kondisi SDM yang rendah ini terindikasi masih terdapat jalan pintas dalam mencari ikan dengan melakukan destructive fishing, seperti pembiusan atau pengemboman yang di masa lalu marak terjadi di kawasan sini.

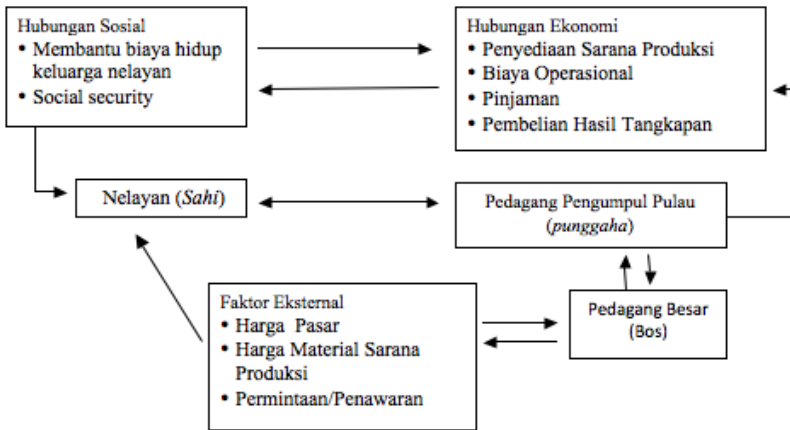
6.2. Faktor Eksternal

6.2.1. Pemasaran: Harga dan Pemasaran

Dalam penggambaran harga dan pemasaran hasil produksi nelayan di wilayah kajian, analisisnya diawali melalui konstruksi jaringan social dalam system produksi. Dengan tipe yang sama, nelayan-nelayan pancing di ketiga pulau adalah pemilik alat produksi dan ikut terlibat langsung dalam proses produksi. Hanya sebagian kecil dari mereka yang masih tergolong menjadi buruh

upahan atau *sahi*. Konstruksi jaringan sosial sehubungan dengan kegiatan produksi kenelayanan, secara sederhana terbagi dalam tiga pola hubungan kerja yaitu; kegiatan penyediaan alat-alat produksi, kegiatan produksi serta kegiatan pemasaran. Dengan demikian, relevansi keterlekatan perilaku ekonomi dalam hubungan sosial melalui jaringan sosial yang terjadi dalam kehidupan ekonomi termaknai melalui bagaimana individu terkait antara satu dengan lainnya dan bagaimana ikatan afiliasi tersebut melayani baik sebagai pelicin untuk memperoleh sesuatu yang dikerjakan maupun sebagai perekat yang memberikan tatanan dan makna pada kehidupan sosial ekonomi mereka.

Dari hasil keterangan informan diperoleh informasi bahwa konstruksi jaringan aktivitas mata pencaharian di wilayah kajian terbentuk dalam tiga model jaringan baik yang sifatnya vertikal (hirarkis), horizontal atau jaringan yang sifatnya diagonal. Ketiga model jaringan yang dimaksud dapat saja berdiri sendiri atau terintegrasi satu sama lain, tergantung dari tingkat kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing individu dalam tujuan membangun jaringan (*social net work*). Meskipun demikian, pola jaringan yang paling dominan yang terbentuk dalam aktivitas produksi dan pemasaran adalah pola jaringan yang sifatnya vertikal (hirarkhis) yang dikenal dengan istilah lokal kelembagaan "*punggaha-sahi*". Secara skematik pola jaringan yang dimaksud dalam konteks hak dan kewajiban dari masing-masing pihak (*punggaha* dan *sahi*) tergambarkan pada Gambar 6.2.1.



Gambar 6.2.1.

Skematik Pola Jaringan *Punggaha* dan *Sahi* dalam Konteks Hak dan Kewajiban Masing-Masing

Pola jaringan produksi dan pemasaran yang terjalin, menunjukkan bahwa masing-masing aktor saling mendukung dan melengkapi dalam aktivitasnya meskipun melahirkan implikasi pola jaringan yang sifatnya patron-klien dengan dimensi ketergantungan yang tinggi dan eksploitatif.

Hasil observasi dan wawancara dengan informan ditemukan keterangan bahwa pola ketergantungan yang eksploitatif sebenarnya tersadari oleh nelayan dalam konteks "remunerasi dan manipulasi normatif" tetapi kekuatan dan kemampuan patron (*punggaha* dan *bos*) menerapkan pola *social security* (jaminan sosial) terhadap nelayan (*sahi*) mampu menjawab "kepastian di tengah ketidakpastian" dari aktivitas mata pencaharian yang dilakoni oleh nelayan. Ketidakbebasan menjual hasil produksi karena ada prinsip jaringan yang terjadi bahwa "dimana modal diperoleh, disitu hasil dijual" menjadikan posisi nelayan menjadi ter subordinasi. Pembelian harga ikan karang yang lebih dari 1 kg menjadi harga ekoran menjadi eksploitatif tetapi terkaburkan oleh jaminan ketersediaan modal produksi.

Tabel 6.2.1.

Kemampuan Akses dan Kontrol Kelembagaan *Punggaha- Sahi* dalam Relasi Pola Hubungan Produksi dan Pemasaran di Wilayah Kajian

No	Aspek	Akses		Kontrol	
		Nelayan	<i>Punggaha</i> dan Bos	Nelayan	<i>Punggaha</i> dan Bos
1.	Sarana Produksi				
	• Perahu	+	+++	+	+++
	• Mesin	-	+++	-	+++
	• Alat Tangkap	+	+++	+	+++
	• Bahan Bakar	-	+++	-	+++
2.	Modal Produksi	-	+++	-	+++
3.	Operasi Penangkapan				
	• Pengetahuan	+++	-	++	-
	• Penangkapa	+++	-	++	-
	• Biaya Operasional	+	+++	+	+++
4	Pemasaran				
	• Lokasi	-	+++	-	+++
	• Harga	-	+++	-	+++

Ket :

+++ : tinggi

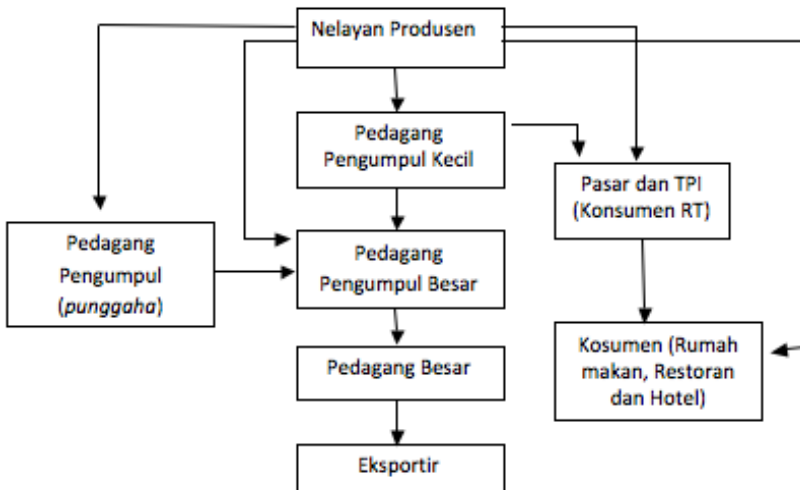
++ : sedang

+ : rendah

- : tidak ada

Penawaran modal dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga menjadikan *sahi* masuk dalam lingkaran utang yang tidak pernah habis sehingga dimensi ketergantungan terpraktekkan. Ketidakberdayaan nelayan tersebut menjadikan mereka pada umumnya berprinsip ” “*dahulukan selamat*” sehingga nelayan;*sahi* akan senantiasa tunduk dan patuh menerima mekanisme yang ada. Konteks ini telah memperlihatkan bahwa ketika uang mereduksi setiap entitas menjadi abstraksinya, maka dalam perkembangannya, uang mereduksi dirinya menjadi entitas kuantitatif. Kelebihan dan ketidak-wajaran menjadi standar kebenarannya. Ini ditunjukkan secara subjektif dengan fakta bahwa ekspansi produksi dan kebutuhan menjadi sebuah ketundukan yang cerdas dan selalu memperhitungkan nafsu yang tidak manusiawi (dehumanisasi), tidak alamiah dan imajiner.

Adapun lembaga dan saluran pemasaran untuk ikan-ikan karang di wilayah kajian secara skematik tergambarkan sebagai berikut :



Gambar 6.2.2.

Lembaga dan Saluran Pemasaran untuk Ikan-ikan Karang di Lokasi Penelitian

6.2.2. Permintaan Terhadap Hasil Tangkap/Produksi

Tabel 6.2.3.

Jenis-Jenis Ikan Karang yang Memiliki Nilai Ekonomis Penting di Lokasi Penelitian

Istilah Nama Ikan (Istilah Lokal)	Jenis Ikan	Harga Pasaran Ikan Hidup
MC	Sunu Merah	Mahal
CP	Cappang (Kerapu)	Sedang
Tiger	Kerapu Macan	Mahal
CPK	Kerapu Merah	Mahal
TKS	Kerapu Tikus	Mahal
Mosso	Kerapu Lumpur	Sedang
Pappa	Sunu	Mahal
Bebi	Campuran jenis ikan (0,3 – 0,5 kg)	Murah
Langkoe	Napoleon (dilindungi)	Mahal

Sumber : Nelayan Pulau.

Keterangan :

Bebi : 0,3 – 0,5 kg. (Rp. 100.000 – Rp. 150.000)

Super : 0,6 - 1 kg. (Rp. 200.000 – Rp. 360.000)

Ekoran Kecil : 1 – 3 kg. (Rp. 360.000 – Rp. 500.000)

Ekoran Besar : 3 – 5 kg (Rp. 750.000 – Rp. 800.000)

Fenomena transformasi dari pasar lokal ke pasar nasional dan internasional teramati cukup kuat dalam pasar perdagangan komoditas ikan-ikan hidup di pulau ini, sehingga jika dikaitkan dengan perkembangan pasar merupakan faktor utama dalam transformasi ekonomi suatu masyarakat, nampaknya tidak sepenuhnya berlaku bagi nelayan *grassroot* yang hidup di pulau-pulau. Karena persoalan orbitasi wilayah yang jauh dari daratan serta fenomena jarak sosial dalam jaringan sosial (produksi dan pemasaran) serta tidak tersedianya kelembagaan formal yang menangani masalah ini, menyebabkan nelayan banyak di perlakukan tidak adil oleh pelaku-pelaku ekonomi baik dari dalam (pengusaha aras local; broker; *punggaha*) maupun di luar pulau (pengusaha supra local; bos), sehingga transformasi ekonomi yang signifikan akibat pengaruh pasar yang positif faktanya justru sebaliknya, yaitu hanya dinikmati

segelintir orang yaitu elit-elit lokal saja, dan pelaku-pelaku ekonomi di luar pulau yang menguasai kapital, pasar dan informasi.

Data yang diperoleh dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Selayar disebutkan bahwa rata-rata volume perdagangan ikan hidup yang dipasarkan pedagang besar yang ada di Kota Benteng tujuan Makassar dan Bali adalah kurang lebih 1 ton per bulan atau sekitar 13 ton per tahun. Harga jual rata-rata sekitar Rp. 350.000 – 600.000./kg. Puncak penjualan pada bulan Februari setiap tahunnya bertepatan dengan hari raya imlek.

6.2.3. Musim/Iklim

Seperti yang telah banyak dibahas sebelumnya, musim dan kondisi alam lainnya sangat berpengaruh terhadap kegiatan perikanan tangkap yang dilakukan nelayan di lokasi penelitian. Ketika musim pancaroba dan gelombang tinggi datang, frekuensi mereka melaut menjadi sangat berkurang, kecuali nelayan di Bontolebang yang mempunyai teknologi alat/saran tangkap yang lebih mumpuni dan wilayah tangkap dekat desa yang relatif tetap tenang.

Berkurangnya frekuensi melaut, terutama bagi nelayan Kahu-kahu, tentunya sangat berpengaruh pada hasil tangkapan dan pendapatan. Semakin sedikit frekuensi melaut, semakin sedikit pula pendapatan yang bisa diperoleh. Apalagi, ketika mereka melaut pada musim gelombang tinggi, mereka tidak bisa lagi menangkap ikan di wilayah tangkap yang biasanya. Hasilnya pun jauh menurun. Padahal, biaya produksi melaut meningkat. Kondisi ini tentunya mengurangi pendapatan bersih sekali menangkap.

6.2.4. Degradasi Sumber Daya Pesisir Dan Laut

Fenomena kerusakan perairan Kabupaten Kepulauan Selayar dari hasil pengamatan di lapangan dapat diketahui pada terjadinya pelumpuran atau sedimentasi di perairan pantai Desa Bontoborusu. Para ahli mengatakan bahwa sesuai dengan hukum keseimbangan alam apabila terjadi sedimentasi, ada beberapa kemungkinan telah terjadi fenomena kerusakan lingkungan di tempat lain, kuat duan telah terjadi kerusakan terumbu karang akibat berbagai

praktek pemanfaatan sumber daya yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan racun potasium atau penggunaan bom.

Kerusakan dasar perairan berdampak pada perubahan arus laut yang mampu mengangkat lumpur dan serpihan-serpihan pecahan terumbu karang pada suatu tempat. Dalam kasus perairan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, kuat dugaan fenomena alam ini terjadi di Pantai Desa Bontobarusu. Hal ini tampak pada materi endapan lumpur, berupa tanah, bercampur dengan pasir putih dan serpihan terumbu karang. Menurut informasi masyarakat, dahulu dasar perairan ini berupa pasir putih yang bersih dan terbebas dari lumpur dan sampah. Kini pemandangan pantai pasir putih tersebut telah berubah dengan dasar perairan pantai berlumpur, airnya keruh dan sampah berserakan dimana-mana.

Fenomena lain yang menunjukkan bahwa telah terjadinya kerusakan sumber daya perairan pantai adalah semakin langkanya ikan di perairan pesisir. Dampaknya telah dirasakan langsung oleh nelayan Desa di ke tiga lokasi penelitian, yakni sulitnya nelayan mencari ikan di perairan pesisir pantai, semakin jauhnya nelayan mencari ikan, ikan-ikan yang didapat hanya berupa ikan-ikan pelagis yang memiliki nilai ekonomi rendah, seperti, kembung, tembang, teri, dan belanak. Tingkat keragaman jenis ikan di wilayah perairan pantai juga mengalami penurunan, seperti ikan napoleon dan ikan yang warnanya beraneka ragam telah menghilang dari perairan pesisir pantai Bontobarusu.

Dahulu nelayan mudah sekali mencari ikan di pesisir pantai ini. Hanya dengan menggunakan perahu dayung, mengayuh beberapa meter dari bibir pantai, menebar jaring atau dengan memancing, dalam sekali melaut 10 – 20 kg ikan sudah di dapat. Dalam rentang waktu 10 – 20 tahun terakhir ini terasa ikan sudah semakin langka dan sulit didapat. Sekalipun sudah menggunakan perahu bermesin, lokasi tangkapnya sudah di tengah laut, tetap saja ikan sulit di dapat. Dahulu sekali melaut dengan menggunakan perahu lepa bermesin 5 PK (ketinting) jumlah ikan yang didapat hanya pada kisaran 5 kg – 10 kg ikan pelagis seperti ikan tembang, kembung, peperek, lemuru, cumi, belanak, ekor kuning, kuniran, yang harganya hanya pada kisaran antara Rp10.000, - Rp 15.000,- per kg.

Kerusakan kawasan perairan bukan hanya terjadi di Desa Bontobarusu, tetapi juga meluas di hampir seluruh wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, bahkan yang lebih memprihatinkan lagi kerusakan terumbu karang telah memasuki wilayah perairan Taman Laut Nasional Takabonerate. Kerusakan sumber daya perairan di Kabupaten Kepulauan Selayar ini sungguh terasa ironis. Disaat pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan daerahnya sebagai daerah konservasi sekaligus menjadikan sebagai tujuan wisata bahari di kawasan timur Indonesia, kerusakan terumbu karang justru terasa semakin meluas.

Banyak sumber menyebutkan tingkat kerusakan terumbu karang di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil kajian Pusat Studi Terumbu Karang Unhas pada tahun 2000 menunjukkan bahwa rata-rata tutupan hidup terumbu karang di perairan Sulawesi Selatan sekitar 30%, di Takabonerate tingkat tutupan karang hidup sekitar 40% - 60%, perairan Spermonde antara 25% - 50%, kondisi tutupan terumbu karang di Kabupaten Kepulauan Selayar, masih lebih bagus, demikian kata Prof. Dr. Ir. Sudirman (<http://www.google.respository.unhas.ac.id>).

Sumber lain menyebutkan bahwa dari seluruh luas terumbu karang yang ada di wilayah perairan Kepulauan Kabupaten Selayar sedkitar 70% telah mengalami kerusakan akibat pemboman (<http://www.google.selayar.go.green.8/08.2009>). Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012, menyebutkan bahwa tingkat perusakan kawasan perairan di Sulawesi Selatan mencapai 55%. Kerusakan terparah ada di tiga daerah yakni perairan Spermonde di Selat Makasar, perairan Taman Nasional Laut Takabonerate di Selayar, dan perairan Kepulauan Sebilan di P. Sinjai (<http://www.google.mangobay.co.id.2012.07.09>).

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2012, Profr. Ir. Baharudin Nur, Dpl. . Env, menyebutkan dari seluruh terumbu karang di Takabonerate seluas 530.000 ha, hanya tinggal 36.214 ha atau 17% yang kondisinya masih bagus (<http://www.google.kadinas.tripot.com>). Hasil kajian Tim LIPI Implementasi Coremap di Kabupaten Selayar Partisipasi Masyarakat dan Sosial ekonomi Tahun 2009, menyebutkan bahwa tingkat

kerusakan terumbu karang di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar mencapai 30% dari luas tutupan terumbu karang yang ada (Suko Bandiyono, dk, 2009, 1)

Daftar tingkat kerusakan terumbu karang di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar masih diperpanjang dengan berita-berita yang disampaikan oleh pejabat instansi terkait setempat dan kunjungan wisata atau kegiatan ekspedisi, antara lain dalam sebuah wawancara live dengan sebuah radio swasta di Kabupaten Kepulauan Selayar, Dr. Ir. Marjani Msi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, keceplosan mengeluarkan kalimat bahwa kerusakan terumbu karang dikawasan perairan Zona Inti Taman Nasional Laut Takabonerate di Selayar lah parah terumbu karang yang tersisa dalam kondisi baik tinggal 20%. Penyebabnya adalah kegiatan illegal fishing dengan menggunakan bom ikan dan bius . Taman Nasional Laut Takabonerate Selayar dinyatakan telah hancur akibat kegiatan illegal fishing yang berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. (<http://www.compasina.com/arsilihkan/taman-laut-nasional-takaonerate-selayar-dinyatakan-telah-hancur-akibat-kegiatan-illegal-fishing-selama-berpuluh-puluh-tahun> 550a4e26a333119e712e).

Berita yang lain, disampaikan oleh Dan Lantamal VI Laksamana Pertama Bambang Wahyudi, mengaku kecewa dengan kondisi Taman Nasional Laut Takabonerate, Sulawesi Selatan, karena realitasnya tidak seperti yang dipromosikan ke dunia internasional. “Pada ekspedisi Takabonerate yang di gelar baru-baru ini, kami sedikit merasa kecewa karena potensi dan keindahan laut yang dipromosikan secara besar-besaran selama ini, mungkin hanya kan tinggal nama jika tidak dilakukan rehabilitasi secepatnya kata Bambang menanggapi potensi terumbu karang di Takabonerate”. Dia mengatakan ekspedisi Takabonerate dengan bantuan kapal Angkatan Laut Oktober 2009, ternyata banyak menyisakan kekecewaan pengunjungnya. Kerusakan trumbu karang tersebut diakibatkan oleh aktivitas pemboman dan pemotasan oleh pihak-pihak tertentu. Fakta dan kenyataan saat ini dari 5305.000 ha luas terumbu karang 85% rusak dan hanya tersisa 15% yang dinyatakan masih utuh (<http://www.google.zona.inti.ardipraja.blogspot.com/2013/04/lemahnya-kebijakan-pemerintah-ki>)

Fakta seperti ini jelas berentangan dengan tujuan dari pembangunan nasional di sektor perikanan tangkap, sebagaimana diamanatkan dalam UU No: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan yang telah diubah menjadi UU No: 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, antara lain dinyatakan bahwa tujuan pembangunan sektor perikanan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menjaga kelestarian sumber daya ikan beserta ekosistemnya.

Kenyataan seperti ini mengingatkan kembali pada sebuah teori Tragedy of the Common sebagaimana dikemukakan oleh Hardin (1968). Dalam teorinya Hardin mengatakan bahwa sumber daya milik bersama mendorong seseorang untuk memaksimalkan tingkat eksploitasinya, sebab kalau hari ini absen dari kegiatan eksploitasi, maka sumber daya yang tersisa akan dieksploitasi oleh orang lain.

Celakanya semua orang yang terlibat dalam pengeksploitasian sumber daya, tidak ada pihak yang bersedia menanggung kerusakan akibat tindakan eksploitasi tersebut, sehingga hal ini akan berakibat hancurnya sumber daya milik bersama. Sesungguhnya Hardin juga sudah mengatakan, bahwa kehancuran sumber daya milik bersama, bukan semata-mata karena sifat kepemilikan bersama tersebut, akan tetapi lebih pada etika dan moralitas para pihak yang terlibat dalam eksploitasi sumber daya tersebut. Untuk itu, agar sumber daya milik bersama terhindar dari kehancuran, dianjurkan otoritas pengelolaan diberikan kepada negara, karena negara memiliki kewenangan untuk memaksa.

Melihat kebijakan yang dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama ini, tampaknya jalan pikiran sebagaimana yang dianjurkan Hardin telah dempuh oleh pemerintah daerah sebagai representasi negara untuk mengeluarkan kebijakan pengelolaan sumber daya laut. Pandangan masyarakat Nelayan Sulawesi Selatan pada umumnya juga seperti yang dikemukakan Hardin, bahwa masyarakat menganggap sumber daya laut adalah milik bersama, yang siapa saja, kapan saja, dimana saja, dan berapa pun jumlahnya boleh dieksploitasi. Peluang pemerintah daerah mengambil porsi kewenangan dalam mengelola sumber daya laut, dimungkinkan seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah.

Kuatnya dominasi peran negara dalam mengelola sumber daya laut pada kasus Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berdampak pada tergerusnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya laut. “Pengambilalihan” kawasan konservasi Daerah Perindungan Laut (DPL) yang semula dirancang dan dibangun berdasarkan pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat, tiba-tiba kebijakan pemerintah daerah dengan memasukkan kawasan DPL ke dalam Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang diinisiasi oleh pemerintah daerah telah melahirkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat, bahwa tindakan tersebut seolah-olah telah mengalihkan pengelolaan kawasan perairan DPL kepada pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

6.3. Faktor Struktural (Program Wilayah Pesisir dan Laut serta Program Pembangunan Lainnya)

Sama dengan desa-desa lainnya di Kabupaten Selayar, selain mendapatkan bantuan dan program pemerintah, seperti program raskin, program keluarga harapan (PKH), dan bantuan operasional pendidikan siswa miskin, keempat desa juga mendapatkan bantuan dana PNPM yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana desa secara partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan desa.

Selain itu, karena ketika desa berada di wilayah pulau dan pesisir, DKP Kabupaten Selayar juga memberikan bantuan dan program berupa pemberian perahu/kapal motor dan alat tangkap ikan, pelatihan pengolahan hasil tangkap, pelatihan budidaya ikan, pembangunan pabrik es, pembangunan instalasi air bersih, dan pembagian beras nelayan bagi keluarga nelayan miskin. Sebagai kabupaten kepulauan, pemerintah daerah juga melakukan program unggulan, yaitu pengembangan selayar sebagai pusat penih ikan karang nasional yang dijelaskan pada uraian di bawah.

Pengembangan Selayar Sebagai Pusat Benih Ikan Karang Nasional

Dengan semakin menurunnya kapasitas produksi tangkapan ikan secara nasional, serta kebijakan pengembangan perikanan nasional ke depan yang

akan lebih mengarahkan pada upaya peningkatan produksi perikanan melalui kegiatan budidaya, maka diperlukan kemampuan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal untuk menjamin keberlangsungan dan keseimbangan daya dukungnya. Salah satu langkah strategis yang ditempuh di Kabupaten Selayar adalah dengan mendorong aktivitas budidaya perikanan, agar kapasitas produksinya dapat mendukung ketersediaan stock komoditas sesuai permintaan ekspor. Untuk kepentingan tersebut, maka Selayar dapat menjadi alternatif daerah pengembangan budidaya sekaligus menjadi pusat benih ikan karang nasional. Untuk mewujudkan Selayar sebagai Pusat Benih Ikan Karang Nasional, maka program dan kegiatan yang dilakukan meliputi :

1) *Program Penyiapan Masyarakat Pesisir dan Nelayan*

Program ini diarahkan pada terciptanya kemandirian masyarakat lokal agar dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan budidaya dan pembenihan ikan khususnya ikan karang melalui kegiatan : (a) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; (b) Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Masyarakat Pesisir; (c) Penguatan Kelembagaan masyarakat pesisir dan Nelayan; (d) Penyusunan peta konflik pemanfaatan ruang wilayah laut; (e) Kaji Terap Teknologi Tepat Guna dalam pengembangan kegiatan budidaya dan pembenihan ikan karang; (f) Studi Kelayakan Usaha Budidaya dan pembenihan ikan karang; (g) Pelatihan Da'i Terumbu Karang; (h) Penyadaran Masyarakat (Public Awareness)

2) *Program Penyediaan Infrastruktur*

Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan infrastruktur kelautan dan perikanan khususnya yang mendukung kegiatan budidaya dan pembenihan ikan karang yang mampu melayani kebutuhan benih ikan karang nasional, melalui : (a) Pembangunan Hatchery; (b) Pembangunan Gedung karangtina ikan dan biota laut lainnya dan penyediaan fasilitas pendukungnya.

3) *Program Pengembangan dan Penguatan Pasar Komoditas*

Program ini diarahkan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat terhadap informasi harga komoditas dan permintaan pasar. Kegiatan yang dilakukan, meliputi : (a) Pembangunan dan pengembangan bursa komoditas; (b) Pengembangan SDM pengelola bursa komoditas; (c) Pengembangan dan penguatan kelembagaan bursa dan pasar komoditas.

4) *Program Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan*

Program ini diarahkan untuk mendukung aktifitas budidaya dan pembenihan dengan hasil yang berkualitas melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Kegiatan yang dilakukan, meliputi : (a) Penelitian genetika untuk mendukung pelestarian berbagai jenis ikan biota laut langka; (b) Peningkatan populasi ikan melalui Perkayasaan genetik; (c) Kajian kelembagaan masyarakat pesisir dan peranannya terhadap upaya pelestarian ekosistem wilayah pesisir dan kawasan terumbu karang

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan

Ketiga desa, Kahu-kahu, Bontoborusu, dan Bontolebang, berada di Pulau Pasi Gusung yang berjarak tidak terlalu jauh (1-2 km) dari Pulau Selayar (*mainland*)—tempat Ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar. Pulau Pasi Gusung sebetulnya terdiri dari dua pulau, yaitu Pulau Pasi dan Pulau Gusung yang dipisahkan oleh hutan mangrove yang tumbuh lebat di antara keduanya sehingga ketika air surut atau dilihat dari udara, kedua pulau ini seperti saling terhubung.

Panjang garis pantai Pulau Pasi Gusung 29,5 km. Hamparan pasir putih yang diselingi batu cadas berada di sepanjang Pantai Sisi Selatan, Barat, dan Utara; sedangkan batu cadas dengan pantai yang sempit mendominasi kondisi pantai sisi Timur. Pulau dan perairan pulau ini memiliki tiga ekosistem utama, yaitu terumbu karang 608,36 Ha dan terumbu karang yang bercampur pasir 606,61 Ha, mangrove 66,62 Ha, dan padang lamun bercampur pasir 799,53 Ha. Padang lamun terhampar di sepanjang pantai sisi Selatan, Barat, dan Utara pulau, terutama di perairan Bontolebang.

Tipe terumbu karang di lokasi penelitian adalah terumbu karang tepi (*fringing reef*) dari jenis karang batu, karang lunak, dan biota asosiasi lainnya yang sebagian besar terhampar cukup luas dan lebar berkisar 300 – 1.000 meter di pantai sisi Barat dan Selatan. Kondisi penutupan karang hidup di perairan Pulau Pasi Gusung berkisar antara 44,66 – 74,83 persen dengan kategori rusak, kurang baik, dan baik.

Kondisi terumbu karang dan ekosistem terkait sangat mempengaruhi sumber daya ikan dan biota laut lainnya. Berbagai spesies ikan sangat tergantung kepada terumbu karang dan ekosistem terkait sebagai tempat tinggal, memijah, dan mencari makan. Sebagai sebuah sistem rantai makanan, keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan ikan dan biota laut di ekosistem

terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan ikan di seluruh perairan.

Sebagai sebuah sistem sosial dan ekologi yang saling terkait, ikan dan kekayaan sumber daya laut inilah yang dijadikan sumber penghidupan utama penduduk/rumah tangga ketiga desa sejak dulu sampai sekarang. Untuk bertahan hidup dan menjamin keberlanjutan penghidupannya, sebagian besar penduduk/rumah tangga ketiga desa menjalankan strategi nafkah dengan cara menangkap ikan (menjadi nelayan). Mereka sangat tergantung pada hasil tangkapan ikan dan biota lainnya. Sebagian lagi yang menjadikan pertanian sebagai pekerjaan utamanya juga menjadikan perikanan tangkap sebagai pekerjaan tambahannya. Selain menjadi nelayan tangkap, sebagian kecil dari mereka melakukan kegiatan perikanan budidaya berupa pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung dan keramba jaring tancap.

Sayangnya, ketiga ekosistem yang menjadi tempat hidup, memijah, memberarkan anak, dan mencari makan ikan dan biota laut lainnya, saat ini kondisinya sebagian besar rusak dan kurang baik. Terbatasnya pengetahuan terhadap fungsi dan manfaat ketiga ekosistem membuat sebagian penduduk/rumah tangga di ketiga desa membuat terbatasnya kepedulian dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketiga ekosistem. Program COREMAP II yang pernah dilakukan, terutama *public awareness*, hanya melakukan penyadaran terhadap pelestarian terumbu karang saja. Itu pun hanya mampu menysar seperempat penduduk pulau dan tidak cukup menyadarkan seluruh penduduk dan meningkatkan kepeduliannya, termasuk untuk terumbu karang sekalipun. Pengamatan yang dilakukan menunjukkan perilaku perusakan, terutama yang tidak langsung, masih banyak ditemukan di ketiga desa. Penduduk di ketiga desa masih banyak yang membuang sampah langsung ke laut.

Pendidikan formal yang rendah dan alat/sarana tangkap yang terbatas juga membuat sebagian besar mereka berusaha memperoleh hasil tangkapan dengan berbagai acara, termasuk menjalankan *destructive fishing*. Alasan untuk bertahan hidup dan kurangnya kepedulian pemerintah menjadi faktor yang menyebabkan pengrusakan ketiga ekosistem terus berlangsung. Penetapan ketiga desa dan perairannya sebagai KKPd sejak tahun 2011 juga

belum memberikan manfaat bagi penduduk. Menurut penduduk, pemerintah hanya pernah memberikan satu kali sosialisasi saja tanpa pernah mengetahui dan menerima manfaat dengan jelas dari KKPD.

Pemerintah daerah dan jajaran penegak hukum juga dinilai kurang peduli terhadap kegiatan penangkapan ikan yang merusak, terutama oleh nelayan luar desa maupun luar kabupaten. Dengan armada dan alat tangkap yang lebih canggih dan juga dengan cara-cara merusak leluasa menangkap ikan di perairan sekitar desa mereka. Penggunaan alat bantu kompresor dan penggunaan potassium untuk menangkap ikan kerapu dan ikan karang lainnya yang nampak dengan jelas tidak membuat aparat keamanan menegakkan hukumnya dengan tegas. Pembiaran ini membuat para pelaku terus melakukan *destructive fishing* dan yang pernah tertangkap pun kembali melakukannya. Di sisi lain, pembiaran ini menggoda penduduk desa yang sebelumnya tidak melakukan *destructive fishing* untuk ikut-ikutan melakukannya. Karakter perairan yang *open access* membuat semua pihak bisa melakukan eksploitasi berlebihan dengan cara-cara yang merusak.

Padahal, kembali pada uraian awal, penduduk di ketiga desa sangat tergantung pada ketiga ekosistem. Kerusakan dan terancamnya keberlanjutan ketiga ekosistem ini terbukti telah mengganggu stabilitas penghidupan penduduk/rumah tangga di keempat desa. Mereka mengeluhkan semakin sulitnya menangkap ikan, semakin tidak jelasnya wilayah tangkapan ikan sehingga hasil tangkapan ikan dan pendapatan mereka semakin menurun. Mereka memprediksi apabila terus dibiarkan, apalagi sebagian besar mereka tidak mempunyai pekerjaan tambahan (mata pencaharian alternatif), pengrusakan akan terus terjadi dan turunnya tingkat penghidupan mereka pun akan terjadi.

Keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan aset produksi, membuat tidak semuanya mampu memiliki pekerjaan tambahan (strategi nafkah ganda). Beberapa penduduk/rumah tangga yang mempunyai lahan atau yang mempunyai akses terhadap lahan memang bisa menjadi petani, meskipun hasil pendapatannya tidak terlalu besar. Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga mengakibatkan kesempatan kerja, percaya diri, dan kreatifitas penduduk/rumah tangga di keempat desa terbatas. Sebagian besar

penduduk/rumah tangga nelayan yang tidak punya lahan/akses terhadap lahan tidak bisa melakukan pekerjaan lain, apalagi bekerja di sektor formal dengan pendapatan yang besar dan rutin.

Padahal, seperti yang telah diketahui bersama, penduduk/rumah tangga nelayan tidak bisa melaut setiap hari sepanjang tahun. Dinamika cuaca membuat mereka hanya bisa melaut dengan tenang setiap hari di musim gelombang tenang. Ketika musim pancaroba datang, apalagi musim gelombang kuat datang, sudah dipastikan mereka tidak bisa melaut.

Belajar dari pengalaman program COREMAP II, inisiasi pemberian pekerjaan tambahan melalui program mata pencaharian alternatif (MPA) sebetulnya bisa memberikan pengalaman, ide, dan peningkatan kapasitas bagi penduduk/rumah tangga nelayan. Bahkan, dalam jangka pendek dan sementara bisa meningkatkan pendapatan mereka. Namun, kurangnya persiapan, pendampingan, dan pengawasan membuat program MPA tidak bisa berkelanjutan, bahkan beberapa sudah gagal sejak awal. Sistem program yang berbasis kelompok tanpa penguatan kelompok terlebih dahulu menjadi faktor utama lainnya. Belum kuatnya kelompok, termasuk kapasitas kelompok dan anggota kelompok, saling kepercayaan yang belum terbangun, dan pembagian peran yang jelas, membuat semua program tidak berjalan, bahkan sejak awal program digulirkan sudah banyak yang bertengkar.

Jenis MPA yang cenderung dipaksakan tanpa penguatan kapasitas sumber daya manusia dan tanpa melihat kesesuaian ekologi juga menjadi awal kegagalan program ini. Aspek pemasaran juga seringkali dilupakan dan tidak dipersiapkan dengan baik. Seringkali program budidaya bisa panen, namun tidak bisa panen. Terakhir, yang sering kali menjadi masalah adalah perencanaan, implementasi, pendampingan, dan pengawasan yang masih sangat sektoral. Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat kabupaten, misalnya, hanya membatasi MPA dalam bentuk budidaya ikan, baik ikan laut maupun ikan air tawar, padahal berdasarkan karakteristik sosia-budaya dan juga kondisi ekologi, yang cocok dan dibutuhkan adalah ternak kambing bagi penduduk/rumah tangga muslim dan ternak babi bagi penduduk/rumah tangga nasrani. Akhirnya, program gagal dan tidak berkelanjutan.

7.2. Rekomendasi

Dari kesimpulan di atas, peneliti merekomendasikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di lokasi penelitian, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan informal yang intensif, meluas, dan kontinyu. Materi yang diberikan dalam pelatihan harus holistik, mulai dari membuka pandangan/wawasan sampai ke hal-hal yang praktis dan detail. Pelatihan harus lebih banyak dilakukan di lapangan dan langsung praktek, seperti model sekolah lapang.
2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap karakteristik dan manfaat terumbu karang, padang lamun, dan mangrove secara intensif, meluas, kontinyu, holistik. Sama dengan pelatihan pada nomor 1, peningkatan pengetahuan dan pemahaman ini juga harus lebih banyak dilakukan di lapangan dan langsung praktek, seperti model sekolah lapang. Proses ini juga harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada dalam ketiga ekosistem tersebut, termasuk nelayan luar, penduduk “atas”, pemerintah daerah, TNI, POLRI, dan kejaksaan.
3. Penguatan kelembagaan dan koordinasi dalam menjaga, mengawasi, dan menindak setiap kegiatan yang merusak ketiga ekosistem tersebut, termasuk pengawasan internal di semua lembaga dan aparat penegak hukum untuk menghilangkan oknum-oknum yang justri menjadi pelindung para pelaku pengrusakan.
4. Program MPA (atau apapun namanya) sangat penting dilakukan. Namun, harus dilakukan dengan perencanaan dan persiapan yang matang. Program MPA harus berbasis karakteristk sosial-budaya, kebutuhan penduduk/rumah tangga, dan kesesuaian ekologi. Peningkatan kapasitas penduduk/rumah tangga sebagai penerima manfaat serta pendamping dan pelaksana program harus dilakukan sebelum pelaksanaan program dimulai. Pendamping harus tinggal menetap di desa selama program dilaksanakan. Pendamping juga harus menjadi penghubung antara masyarakat, LPSTK, dan pemerintah. Jaminan pemasaran juga menjadi

hal yang sangat penting yang tidak boleh dilupakan dan harus disiapkan sebelum pelaksanaan program.

5. LPSTK harus diperkuat, baik kapasitas pengurusnya, koordinasinya, maupun kemampuan operasional. Penyerahan aset-aset LPSTK COREMAP II juga harus segera dilakukan kepada pengurus LPSTK COREMAP-CTI. Pengurus LPSTK COREMAP-CTI harus bisa belajar dari keberhasilan dan kegagalan pengurus LPSTK COREMAP II.
6. Transparansi anggaran dan pengawasan yang ketat dari semua program COREMAP-CTI menjadi sangat penting dilakukan agar semua rangkaian kegiatan dapat partisipatif dan memberikan manfaat bagi kelestarian ekosistem dan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
7. Terakhir, karena ketiga desa juga sudah ditetapkan sebagai KKPD, pemerintah daerah harus mampu mensinergiskan dan menyelaraskan antara kegiatan COREMAP-CTI dan KKPD.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Kepulauan Selayar. 2014. Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka. BPS Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Kabupaten Kepulauan Selayar a. Tanpa Tahun. Profil Pasi Gusung. Tidak dipublikasikan.
- _____ b. Tanpa Tahun. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Pulo Pasi Gusung Kaupaten Kepulauan Selayar. Tidak dipublikasikan.
- KKP. 2013. Kerangka Kerja Pengamanan Lingkungan dan Sosial- Project COREMAP-CTI. Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan:

- Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 466/IX/2011 tentang Penetapan Perairan Pulau Pasi dan Perairan Pulau Gusung sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 61/III/2014 tentang Penetapan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pulo Pasi Gusung Kabupaten Selayar.

DAFTAR SINGKATAN/ ARTI /INDEKS

Purse seine	=	pukat cincin
Trawl	=	patrol/ pukat hela/ pukat harimau
Seine nets	=	pukat tarik
DKP	=	Dinas Kelautan dan Perikanan
GT	=	Gross Ton
CTI	=	Coral Triangle Initiative (Wilay Tiga TK Dunia)
T0	=	Baseline Study (Tahun Awal)
FGD	=	Focus Group Discussion

Sebagai sebuah sistem sosial dan ekologi yang saling terkait, penduduk/rumah tangga ketiga desa di lokasi penelitian, yaitu Desa Kahu-kahu, Desa Bontoborusu, dan Desa Bontolebang di Pulau Pasi Gusung sejak dulu sampai sekarang sangat tergantung pada hasil tangkapan ikan dan biota lainnya. Sebagian lagi yang menjadikan pertanian sebagai pekerjaan utamanya juga menjadikan sektor perikanan sebagai pekerjaan tambahannya. Selain menjadi nelayan tangkap, sebagian kecil dari mereka melakukan kegiatan perikanan budidaya berupa pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung dan keramba jaring tancap.

Sayangnya, ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait (padang lamun dan mangrove) yang menjadi tempat hidup, memijah, membesarkan anak, dan mencari makan ikan dan biota laut lainnya, saat ini kondisinya sebagian besar rusak dan kurang baik. Terbatasnya pengetahuan terhadap fungsi dan manfaat ketiga ekosistem membuat sebagian penduduk/rumah tangga di ketiga desa membuat terbatasnya kepedulian dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketiga ekosistem.

Buku ini (1) memaparkan gambaran profil lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografis, kondisi sumber daya alam, sarana dan prasarana sosial ekonomi, kelembagaan sosial ekonomi, program pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya laut; (2) mendeskripsikan potret penduduk yang terdiri dari jumlah dan komposisi penduduk, kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan penduduk; (3) mengemukakan tentang pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap upaya perlindungan dan penyelamatan *mangrove*, padang lamun dan terumbu karang; (4) menyajikan tentang analisis pendapatan dan pengeluaran rumah tangga penduduk; (6) membahas tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan dan pengelolaan sumber daya laut, meliputi faktor internal, eksternal dan struktural. Kemudian yang terakhir ditutup dengan kesimpulan dan beberapa rekomendasi terkait kegiatan COREMAP-CTI di Kabupaten Kepulauan Selayar.